



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT  
KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : II  
Rapat ke- : 12  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)  
Dengan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 4 Februari 2020  
Waktu : Pukul 13.52 s.d 17.50 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. 1  
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Ketua Rapat : Emanuel Melkiades Laka Lena/Wakil Ketua Komisi IX DPR RI  
Acara : 1. Penjelasan Kepala BKKBN terhadap Perubahan BKKBN (*rebranding*) terkait Logo Baru, Pola Advokasi, Konseling dan Sosialisasi Program BKKBN kepada Masyarakat;  
2. Penjelasan Kepala BKKBN terkait Pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) Tahun 2020 dan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia bersama dengan Pemerintah Daerah;  
3. Penjelasan Kepala BKKBN terkait Hasil Uji Coba dan Rencana Penggunaan Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) sebagai Tolak Ukur Pembangunan Keluarga yang merupakan Salah Satu dari 3 (Tiga) Pilar yang dimiliki BKKBN;  
4. Membahas Pelaksanaan Kampung KB yang diharapkan bisa menjadi Episentrum Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPk).
- Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H.  
Hadir : **A. Anggota DPR RI:**  
36 dari 51 orang Anggota dengan rincian:  
1. **Fraksi PDI Perjuangan**  
1. Dra. SRI RAHAYU  
2. Dari. RIBKA TJIPTANING  
3. Dr. H. EDY WURYANTO, S.KP., M.Kep.  
4. H. IMAM SUROSO, S.H., S.Sos.  
5. RAHMAD HANDOYO, S.Pi., M.M.  
6. MUCHAMAD NABIL HAROEN, S.Pd., M.Hum.  
7. Dr. DEWI ARYANI, M.Si.

**2. Fraksi Partai Golongan Karya**

1. EMANUEL MELKIADES LAKA LENA
2. Drs. H. DARUL SISKI
3. Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.
4. Dra. WENNY HARYANTO, S.H.
5. M. YAHYA ZAINI, S.H.

**3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**

1. dr. H. SUIR SYAM, M.Kes., MMR.
2. Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.
3. Ir. SRI MELIYANA
4. ADE REZKI PRATAMA, S.E., M.M.
5. drg. PUTIH SARI
6. Dra. Hj. RUSKATI ALI BAAL

**4. Fraksi Partai Nasionalis Demokrat**

1. FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.
2. Hj. SRI KUSTINA
3. Drs. FADHOLI
4. RATU NGADU BONU WULLA, S.T.
5. drg. Hj. HASNAH SYAM, MARS.

**5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

1. Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.
2. ANGGIA ERMA RINI, M.K.N.
3. H. HARUNA, M.A., M.B.A.

**6. Fraksi Partai Demokrat**

1. Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD
2. Dra. LUCY KURNIASARI
3. Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, S.E.
4. MUHAMMAD DHEVY BIJAK

**7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

1. H. ANSORY SIREGAR
2. Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.
3. Dr. Hj., NETTY PRASETIYANI, M.Si.
4. H. ALIFUDDIN, S.E., M.E.

**8. Fraksi Partai Amanat Nasional**

1. Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag. M.Hum., M.A.
2. Hj. INTAN FAUZI, S.H., LL.M.

**9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

-

**KETUA RAPAT:**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita sekalian.*

Yang terhormat Saudara Kepala BKKBN, Bapak Hasto Wardoyo dan Jajarannya,  
Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, Ibu Felly, yang lain masih menunggu,

Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah* kita diberikan waktu, kesempatan, tenaga, pikiran semuanya untuk berbakti kepada nusa dan bangsa kita pada rapat kita, rapat dengar pendapat kita pada hari ini.

Sebelum rapat kita mulai alangkah bagusnya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.

**(BERDOA BERSAMA)**

Berdoa selesai.

Pada saat ini yang hadir yang sudah menandatangani jumlah Anggota hadir 28, jumlah fraksi 8, jumlah Anggota izin 5, sudah kuorum dan sudah melewati kuorum. Tadi juga kita menunggu sebentar untuk kuorum biar kita langsung, tidak perlu skors-skors lagi begitu ya. Maka rapat sudah bisa kita mulai. Rapat kita mulai.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.52 WIB)**

Mengenai waktu...

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag. M.Hum., M.A.):**

Ini rapatnya terbuka atau tertutup, Ketua?

**KETUA RAPAT:**

*Oh ya, rapat terbuka untuk umum, saya ketok lagi.*

Baik, mengenai rapat tadi sebenarnya kita di undangan Jam 13.00 rapatnya. Tapi tadi kita ada pertemuan dengan Bupati dan Ketua DPRD dan masyarakat Natuna, sehingga tadi teman-teman kita tadi hampir Jam 13.00 juga, sehingga teman-teman butuh waktu untuk Ishoma, sehingga rapat kita juga sambil menunggu kawan-kawan tadi maka kita mulai sekarang ini. Jadi sekarang sudah Jam 13.50, kita batasi sampai Jam 16.00 ya?

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik.

Bapak-bapak/Ibu-ibu hadirin semuanya,  
Bapak Hasto, kemudian Anggota Komisi IX DPR RI semuanya,

Acara rapat hari ini adalah:

1. Penjelasan Kepala BKKBN terhadap perubahan BKKBN (*rebranding*) terkait logo baru, pola advokasi, konseling dan sosialisasi program BKKBN kepada masyarakat;
2. Penjelasan Kepala BKKBN terkait pelaksanaan pendataan keluarga 2020 dan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia bersama dengan pemerintah daerah;
3. Penjelasan Kepala BKKBN terkait hasil uji coba dan rencana penggunaan indeks pembangunan keluarga sebagai tolok ukur pembangunan keluarga yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) pilar yang dimiliki BKKBN;
4. Membahas pelaksanaan Kampung KB yang diharapkan bisa menjadi episentrum program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

4 (empat) ini nanti Bapak fokuskan di situ. Apalagi kemarin Komisi IX sudah berkunjung juga salah satunya ke Surabaya bertemu dengan Ibu Walikota, Ibu Tri Rismaharini, dan beliau memaparkan *best practice* keberhasilan-keberhasilan di sana yang cukup... Mungkin nanti Pak Hasto kalau bisa, ini usul saya nanti, kalau bisa mungkin 2-3 kepala daerah begitu kita bawa ke sini, entah itu walikota, bupati atau gubernur, keberhasilannya tentang program KB ini maupun juga ketahanan keluarga ini demi untuk bonus-bonus demografi.

Baik.

Bapak-Bapak/Ibu-Ibu sekalian,

Tidak berpanjang lebar, kita dengarkan sama-sama paparan dari Kepala BKKBN. Silakan, Bapak Hasto.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag. M.Hum., M.A.):**

Interupsi dulu, Ketua. Sebelum lanjut ini.

Saya lihat ini paparannya kan panjang *nih* dan kita baru dapat pagi ini ya dan mungkin belum tentu terbaca juga semua. Saya berharap kita batasi juga Pak Kepala untuk mempresentasikan sesuai dengan tema-tema ini saja, ada empat kan kalo tidak salah tadi, tapi tidak usah dibaca semua satu-satu supaya menghemat waktu. Kita nanti mengelaborasi, Pak Kepala. Saya sarankan begitu supaya kita juga interaksinya itu bisa lebih mendalam. Saya kira itu, Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Siap, Bang Saleh. Ini namanya Jam 4 ini. Sebenarnya bisa satu juga, disatukan. Tapi mudah-mudahan bisa dipaparkan secara... Siap, siap, siap.

Terima kasih.

Ada yang lain? Ya silakan Kepala BKKBN, Bang Hasto.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Terima kasih.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang saya hormati Ibu Ketua Komisi, Pimpinan Komisi IX dan juga Pimpinan Rapat pada sore hari ini, dan  
Segenap Anggota Komisi IX yang kami muliakan, kami hormati,

Kami terima kasih diberikan kesempatan pada sore hari ini untuk menyampaikan paparan tentang *rebranding*, pendataan keluarga, kemudian indeks pembangunan keluarga dan juga kampung KB.

Mohon izin sebelumnya, kami sampaikan sedikit bahwa selama saya 6 bulan di BKKBN kami punya program percepatan untuk *quick win* untuk 6 bulan ini dan yang pertama adalah mengatasi kekosongan alat kontrasepsi dan kelebihan alat-alat kontrasepsi di seluruh provinsi. Karena ada seperti contoh Jawa Tengah itu *overload* obat suntik KB tetapi di daerah-daerah lain justru sebaliknya dan banyak obat suntik KB yang mendekati *expired* yang harus dimusnahkan. Ini sangat merugikan negara. Oleh karena itu *quick win* kami adalah mengatasi itu dan *alhamdulillah* sampai bulan Desember kemarin teratasi dengan baik dan masih kita lanjutkan di tahun 2020 ini.

Yang kedua, kami membangun sistem rantai pasok sampai ke *end user*, sampai ke pelosok-pelosok agar lancar untuk pemberian distribusi obat dan alat kontrasepsi.

Yang ketiga, program kami adalah restrukturisasi kelembagaan dan menyederhanakan jabatan struktural menjadi fungsional. Ini kami sudah melakukan penataan dan kami membuat 16 jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh 800 jabatan struktural yang ada di BKKBN. Karena ada 800 jabatan struktural Eselon III dan IV yang harus kami ubah menjadi fungsional. *Alhamdulillah* ini sudah tertata, tinggal menunggu keputusan dari Menpan, artinya surat sudah kami layangkan ke Kementerian.

Program *quick win* yang keempat kami membuat zona integritas bebas korupsi dan melayani dan *alhamdulillah* kemarin Jawa Timur dan Babel juga mendapatkan penghargaan dari zona bebas korupsi.

Program yang kelima kami melakukan *rebranding* untuk program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga.

Pimpinan yang kami hormati, dan  
Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati,

Bahwa BKKBN di tahun 2019 bisa merealisasi anggaran sebesar 92,56% dan ini sesuai dengan harapan dari Pimpinan dan juga Anggota Komisi IX bahwa tahun 2018 capaiannya 77,12%, sehingga waktu itu kami dipacu untuk supaya 2019 kami bisa memperbaiki realisasi dan *alhamdulillah* atas dukungan dan juga motivasi dari Komisi IX kami bisa merealisasi 92,56%.

Selanjutnya kami sampaikan tentang *rebranding* bahwa pembangunan manusia di Indonesia ini memang sekarang ini tentu mengalami suatu

pergeseran dimana BKKBN sendiri berhadapan dengan generasi baru, dalam hal ini generasi yang menjadi pengguna layanan BKKBN adalah generasi X, generasi milenial dan generasi zilenial. Tentu ini sangat berbeda sekali dengan beberapa dekade waktu yang lalu. Karena sekarang pada generasi-generasi yang ada ini adalah dia generasi yang punya konsep diri yang berbeda, juga punya konsep hidup yang berbeda, juga mereka adalah generasi yang terdisrupsi oleh penggunaan teknologi. Oleh karena itu BKKBN tentu harus mempunyai cara baru dengan BKKBN baru untuk menghadapi generasi yang baru. Dari situlah maka kami harus melakukan suatu *rebranding*, karena pangsa pasar kami sudah berubah. Tentu BKKBN melakukan suatu *repositioning* dan juga tetap relevan dan bisa menjadi mitra terpercaya untuk menyampaikan informasi pembangunan bagi masyarakat dan dalam hal ini *rebranding* tentu dengan harapan dan tujuan bisa lebih mengena, jadi lebih mengena untuk generasi muda mulai dari perubahan logo, *next slide*, perubahan logo dan juga kemudian *tagline*, kemudian juga tentu ada *jingle* dan juga ada mars yang kemudian diaransemen ulang.

Memang ada beberapa prinsip yang mana dulu era formal seremonial didalam kita memberikan materi-materi kepada masyarakat, maka sekarang ini harus bergeser menjadi sahabat yang membantu keluarga Indonesia dalam merencanakan kehidupan yang berkualitas. Saya kira sahabat ini adalah kalimat yang sangat diinginkan oleh generasi muda, sehingga ketika dulu kita itu misalkan dua anak cukup itu sebagai bahan yang luar biasa untuk kita memberikan suatu doktrinasi rupanya anak-anak muda sekarang tidak begitu mau didoktrinasi dengan dua anak cukup. Tetapi kalau kita melakukan riset formatif pada mereka, mereka lebih suka terencana atau berencana itu keren, sehingga mereka memang tidak suka doktrinasi. Inilah dari hasil *formative research* yang kebetulan kita menyikapi seperti apa kemauan anak-anak milenial sekarang.

Sebetulnya kalau saya ditanya kalau dari pikiran saya tentu munculnya bukan berencana itu keren, tapi dari para pemegang program ini dua anak itu masih hal yang penting. Oleh karena itu saya juga masih sering menyampaikan bahwa BKKBN itu Dahsyat (dua anak lebih sehat). Karena memang dua anak itu kalau secara biologis lebih sehat. Kalau cukup itu kan relatif. Tetapi kalau sehat itu satu yang sangat logis dan sangat ilmiah. Semua yang beranak tiga lebih mempunyai resiko kematian ibu dan bayi lebih tinggi dibandingkan yang anaknya dua dan satu. Ini satu bukti ilmiah yang sudah *evidence-based* di beberapa *center* penelitian. Oleh karena itu kemudian kami tentu melalui lomba dan juga melalui generasi milenial itu untuk menggerakkan mereka pada tahap pertama, *next, next*. Kami ada beberapa tahap didalam *rebranding* ini, mulai dari Juli sampai Oktober kita sudah memulai tahap-tahapan ini. *Next, next slide, next*.

Tahap yang pertama kami melakukan riset, *formative research* dalam hal ini, dimana kita melakukan wawancara mendalam dan juga fokus grup diskusi serta *workshop* dan juga kemudian hasil dari *formative research* ini kita pakai sebagai suatu pengantar untuk lomba dan *alhamdulillah* ada 5.196 peserta lomba dan ini hampir 80%-nya adalah anak-anak milenial yang mengikuti lomba logo, *tagline, jingle* maupun juga kegiatan yang dalam hal ini untuk mars. Oleh karena itu kemudian kita juga melibatkan tim kurasi serta dewan juri yang kompeten di bidangnya dan kemudian tahap berikutnya kami melakukan *expert meeting* dan juga melakukan *pretesting*, kemudian juga kita

melakukan finalisasi terhadap logo, *jingle* maupun *tagline*. Itu tahapan yang kami lakukan.

*Next*, ada beberapa yang sedikit kami informasikan di sini hasil *formative research* tersebut bahwa kalau kita lihat seperti apa sebetulnya komen anak-anak muda ketika kita tanya tentang BKKBN, maka bagian-bagian yang bisa kita lihat seperti yang kami tayangkan di sana mungkin juga di luar ekspektasi kita atau di luar dugaan kita bahwa mereka merasa sesuatu yang kadang-kadang merasa tidak terhubung atau bahkan memang tidak terhubung, BKKBN itu dia tidak terhubung dengan BKKBN, sedikit yang tahu tentang BKKBN dan juga masalah perhatian hanya sebatas pada soal KB. Jadi dia mungkin mengenalnya KB dan mengenal jargon tentang dua anak cukup.

Ada beberapa kalimat yang cukup menarik, diantaranya seperti yang terlihat dalam layar: “tidak tahu”, “seperti pernah lihat saja, tulisan itu kayaknya di mobil ya”. Kemudian kalau ditanya BKKBN ada yang jawab, “Pernah lihat tulisannya itu dekat di kantor desa.” Itu kemudian ada juga yang menjawab singkatan BKKBN itu B-nya Bimbingan pasti ya, terus KB-nya Keluarga Berencana. Jadi mereka ini pemahamannya jauh dengan yang ada pada kita. Padahal kita sebagai pelayan masyarakat tentu kita ingin terhubung antara pemahaman kami dengan pemahaman yang ada di masyarakat. Ini sebagai gambaran bahwa *rebranding* tentu sudah sangat penting untuk dibutuhkan. *Next*.

Bapak/Ibu, Hadirin yang saya hormati,

*Rebranding* kemudian di tahun-tahun yang akan datang kami punya tahapan-tahapan yang seperti dalam *slide* bahwa kita harus mengimplementasikan internal dan juga harus menjaga konsistensi dan juga kemudian kita melakukan promosi tentu.

*Next*, ini sebagai gambaran dari waktu ke waktu, tahun 1970, tahun 2009, 2010, ada perubahan-perubahan yang kalau kita lakukan *formative research* memang anak-anak muda juga sudah merasa bahwa ini kurang merasa terhubung dengan logo-logo yang ada ini.

*Next*, dan ini adalah logo yang pemenang dan kemudian kita tetapkan menjadi logo BKKBN di tahun 2019, ini dengan warna biru menunjukkan keberlanjutan kerja BKKBN dari waktu ke waktu, sekaligus memiliki nuansa yang tenang, bersahabat dan stabil. Dan ini ada gradasi dari kiri ke kanan, menunjukkan dari warna gelap kemudian menjadi terang, artinya habislah gelap terbitlah terang. Harapannya kita menuju yang lebih terang. Kemudian juga warna biru dongker ini melambangkan unsur ketulusan, kesungguhan dan kehangatan. Kemudian warna biru muda melambangkan semangat seluruh insan BKKBN untuk menjadi BKKBN yang lebih lembaga yang lebih dinamis, bersemangat, muda dan sekaligus berintegritas dan terpercaya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab di masa-masa yang akan datang.

*Next*, unsur-unsur yang membentuk logo itu sebetulnya ada unsur cinta dimana kita tentu sangat memahami bersama bahwa logo cinta ini sebagai lambang cinta yang dalam dari hati dan juga merepresentasikan bahwa dari sebuah perencanaan adalah kasih sayang menjadi modal yang utama dan dalam keluarga pun tentu keluarga yang sakinah, mawaddah,

warahmah, keluarga yang tenteram, keluarga yang masalah, itu menjadi bagian yang sangat penting untuk menjadi modal utama sebelum menjadi keluarga yang lebih langgeng. Yang kedua, ada simbol merangkul yang artinya menjadi sahabat, memfasilitasi dan juga menjadi mitra dalam perencanaan dan juga dilakukan oleh masyarakat maupun oleh keluarga dan tentu dengan para remaja. Kemudian ada lambang kupu-kupu, di sini sebetulnya kupu-kupu itu merupakan lambang atau proses dimana ada metamorfosis di dalam keluarga itu dan kupu-kupu selalu terbang rendah, karena keluarga adalah komponen terendah dari penduduk dan keluarga adalah komponen terendah dari masyarakat. Namun demikian keluarga mengalami metamorfosis dan juga harapannya keluarga itu menjadi keluarga yang berkualitas di kelak kemudian hari. Kemudian juga yang keempat itu ada logo *continuing* atau tanpa batas, angka delapan itu tidak putus-putusnya, sehingga kami berharap bahwa kependudukan merupakan potensi yang tidak terbatas. Kemudian perencanaan dan pengelolaan yang tepat akan menghasilkan berbagai manfaat keuntungan yang besar yang terus berkesinambungan dari waktu ke waktu. Begitu juga makna bagi keluarga, tentu kita tidak ingin ada putusnya. Jadi keluarga sekarang banyak perceraian. Tetapi kita berharap *continuing*, kesinambungan, tidak ada perceraian ini menjadi suatu harapan.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Bapak/Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya tentang *rebranding* ini tentu memberikan suatu motivasi kepada kami semua agar kami lebih percaya dengan cara baru untuk generasi baru maka BKKBN akan sukses didalam melakukan advokasi, kemudian melakukan KIE kepada masyarakat dan juga kita akan mengenal di era *disruption* ini dengan media dengan baik dan tentu akan lebih banyak melibatkan unsur-unsur *stakeholder* dari masyarakat.

Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari *rebranding* dan selanjutnya mohon izin kepada Pimpinan untuk melanjutkan ke pendataan keluarga. Dan pendataan keluarga ini memang sangat diperlukan, karena secara filosofis bahwa untuk mengetahui data keluarga itu sama dengan mengetahui problematika dalam keluarga, sedangkan data yang ada dari BPS selama ini adalah profil data makro, sedangkan kalau yang kita lakukan dari BKKBN ini adalah data mikro. Jadi potret dari keluarga ini yang akan kita dapatkan. Namun demikian memang dengan 35 juta keluarga yang kita data di tahun 2020 yang sudah dianggarkan tersebut itu memang sebagian itu kemudian kita sensus, sebagian kita survei. Namun demikian kami tentu penuh harap nanti sesuai dengan apa yang dulu diputuskan di Komisi IX, seandainya anggaran di perubahan ditambahkan untuk melakukan pendataan sebanyak 65 juta KK, maka kami *full* survei kita sesuai dengan rencana semula. Mohon izin, kami nanti akan dilanjutkan oleh Pak Deputi, Pak Deputi KSPK, untuk melanjutkan tentang pendataan keluarga ini.

Terima kasih.

Mohon izin.



**DEPUTI BKKBN BIDANG KSPK (Dr. dr. M. YANI, M.Kes., PKK.):**

Izin, Bapak dan Ibu Pimpinan serta para Anggota yang terhormat, Dewan yang terhormat, Bapak Kepala, saya melanjutkan terkait dengan pendataan keluarga ini di *slide* selanjutnya, *slide*.

Bapak dan Ibu sekalian,

Pendataan keluarga ini tentu dilaksanakan didasarkan atas yang pertama Undang-Undang 52, ini menjadi dasar pertama di Pasal 49 dan 41 yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengolah dan tentunya menyajikan informasi tentang data kebutuhan keluarga yang ini juga tentang PP 87 dan terakhir tentu Undang-Undang 23. Inilah yang menjadi dasar bagi kita dalam pelaksanaan pendataan keluarga yang akan kita laksanakan *Insyallah* di bulan Juni akan datang ini.

Bapak dan Ibu sekalian,

Pendataan keluarga ini merupakan pengumpulan data primer, Bapak dan Ibu sekalian, tentang kependudukan keluarga berencana dan tentunya pembangunan keluarga dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah secara serentak yang waktunya yang kita akan tentukan tentunya di bulan Juni.

*Slide* selanjutnya, *slide* berikut.

Bapak dan Ibu sekalian,

Pendataan keluarga ini dilaksanakan oleh tentunya kader. Kader ini merupakan petugas kita di lapangan yang selama ini mengerjakan program-program kita di kelompok-kelompok, merupakan penduduk asli setempat atau mereka merupakan penduduk desa setempat dan tentunya yang telah melewati pelatihan-pelatihan yang kita lakukan.

Di *slide* berikut metode yang kita akan pakai seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala tadi untuk pendataan keluarga ini sesuai dengan penerimaan kita saat sekarang ini data keluarga yang kita terima keseluruhan Bapak dan Ibu sekalian ada 80.194.285 keluarga dan yang terjangkau oleh kita saat ini sebesar 35.427.146 KK atau lebih kurang sekitar 44% dari keseluruhan dari penduduk ini. Mudah-mudahan kalau tertulis seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kepala, kita bisa melakukan keseluruhan daripada total pada penduduk ini. Dengan anggaran 246,9 miliar ada dua metode yang kita gunakan. Yang pertama, untuk pendataan keluarga tetap melakukan sensus di 6 (enam) provinsi (Sumut, Jabar, Kalbar, Sulbar, Maluku dan DKI Jakarta). Kita memilih 6 (enam) provinsi ini berdasarkan tentunya program kita, karena *unmet need* pada daerah itu tinggi, prevalensi kelahiran anak cukup tinggi, selebihnya ada 28 provinsi lain, ini yang kita akan lakukan survei untuk IPK yang lebih kurang sebanyak 10.817.940 KK.

Didalam pelaksanaan pengumpulan data ini kita menggunakan dua metode: Yang pertama, masih menggunakan formulir, tapi lebih kurang menyangkut 44%, selebihnya 60% kita sudah menggunakan *smartphone* yang ini tentu sangat membantu kita didalam pelaksanaan, bahkan didalam

analisis dan/atau nanti terkait dengan pengolahan data. Sedangkan penggunaan formulir ini tentu masih mengikuti tata cara, baik nanti penyelesaian, kemudian input yang akan kita lakukan di Balai Penyuluhan, baru kemudian nanti masuk ke data pusat.

Bapak dan Ibu sekalian,

Terkait dengan mekanisme pengumpulan data ini pada *slide* di berikutnya, di tingkat desa enumerator atau pengumpul data ini melakukan baik tadi survei maupun sensus. Kemudian sebelum data ini dikirimkan nanti ke Balai penyuluh, data ini oleh supervisor yang ada dipastikan bahwa seluruh data ini sudah terisi sebelum mereka keluar daripada desanya. Jadi data ini dipastikan oleh supervisor sudah lengkap, baru kemudian data ini dikirim di kecamatan, tepatnya di Balai Penyuluh kita, yang di sinilah nanti baik itu data yang masih bersifat tadi yang menggunakan formulir itu akan diinput, kemudian akan tentunya dikirim ke pusat. Begitu juga terus sampai di tingkat kecamatan kita ada dua, ada supervisi atau manajer pengolahan data, ada manajer kecamatan yang juga akan melakukan tentunya pengawasan terkait dengan proses pengumpulan data ini.

Bapak dan Ibu sekalian,

Ini 3 (tiga) *slide* berikut tentang formulir. Terlalu kecil-kecil, Bapak, tidak akan terlihat. Tapi saya berharap di dalam presentasi kita yang sudah diberikan itu bisa terbaca. Ada 3 (tiga) di sini untuk pengumpulan data PK kita, *slide* berikut, ini belum, kembali mohon, ini menyangkut tentang pendataan keluarga dan terakhir terkait dengan keluarga berencana. Ini sangat halus-halus sekali di sini, tapi terbaca kalau nanti didalam proses pengumpulan data.

Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, izin saya melanjutkan kepada *slide* berikut, terkait dengan indeks pembangunan keluarga ini Bapak dan Ibu sekalian, indeks pembangunan keluarga ini merupakan sebuah pengukuran, ini merupakan pengukuran yang baru sekali, belum pernah ada, tidak hanya tentunya di Indonesia ini di dunia juga hanya beberapa yang mempunyai indeks walaupun tidak persis sama yaitu negara Brazil, kemudian ada di sebagian negara Amerika, negara bagian Amerika, tapi juga belum... Dan oleh karena itu tentunya bagi kami indeks pembangunan keluarga ini disamping ini juga merupakan sebuah tantangan, tapi sekaligus didalam pelaksanaan ini juga membawa persoalan-persoalan yang justru ini yang menjadi kekuatan kita nanti didalam pelaksanaan tentunya penyusunan indeks pembangunan keluarga.

Bapak dan Ibu sekalian,

Perkembangan keluarga seperti yang dikemukakan oleh Bapak Kepala tadi, disamping perkembangan keluarga kita di era revolusi industri 4.0, era globalisasi total ini terjadi perubahan-perubahan tidak hanya menyangkut tentang struktur keluarga, tapi juga terjadi pergeseran-pergeseran didalam fungsi-fungsi keluarga. Ini tentunya membawa pengaruh besar tidak hanya kepada keluarga dan masyarakat, tetapi juga berpengaruh kepada negara

kita ini. Disamping itu tuntutan-tuntutan, baik global maupun secara nasional, adanya SDGs (*Sustainable Development Goals*), kemudian cita-cita Indonesia di 2025 dan tentunya cita-cita Indonesia di tahun 2045 didalam mewujudkan Indonesia emas, kesemua ini merupakan tantangan dan segala kebutuhan yang harus kita sikapi.

Bapak dan Ibu sekalian,

Bergerak tentunya dari dinamika perubahan penduduk ini BKKBN merasa perlu melakukan.

**WAKIL KETUA (H. ANSORY SIREGAR):**

Bapak Yani, Bapak Yani ya? Bapak Yani kan? Interupsi sedikit saja.

Jadi usahakan yang dibagikan ke kita yang berwarna, jangan hitam putih, ke depan ya biar kita *nyambung* juga ini. Kalau hitam putih semua tadi tidak ini. Jadi usahakan.

**DEPUTI BKKBN BIDANG KSPK:**

Baik.

**WAKIL KETUA (H. ANSORY SIREGAR):**

Sudah ada ininya kan, sudah ada alatnya?

**DEPUTI BKKBN BIDANG KSPK:**

Ada, Pak.

**WAKIL KETUA (H. ANSORY SIREGAR):**

Silakan, Pak.

**DEPUTI BKKBN BIDANG KSPK:**

Mohon maaf, Pak. *Insy Allah.*

Bapak dan Ibu sekalian,

Tentunya saya lanjutkan kembali. *Slide* berikut, IPK ini kita maksudkan tentu itu sejalan dengan apa yang menjadi tujuan pemerintah daerah. Kita pahami betul bahwa pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas itu kita sadari bahwa peran daripada keluarga itu cukup besar. Keluarga yang berkualitaslah yang nanti tentu akan menghasilkan masyarakat yang berkualitas dan akhirnya negara tentunya yang berkualitas. Bergerak tentunya dari konsep ini, di *slide* berikut, dengan berlandaskan beberapa landasan hukum yang kita gunakan di sini, disamping tentu Undang-Undang 52, Undang-Undang 23 dan PP 87 juga ada Amanat Kemendagri 86. ini yang menjadi landasan kita untuk melaksanakan IPK ini. Disamping itu tentunya

dalam penyusunan indikator-indikator di dalam pengukuran IPK ini kita tentunya tidak lepas dari beberapa teori-teori dasar terkait juga dengan teori keluarga yang telah dikembangkan. Ini sudah diterima tentunya di kalangan dunia ini, juga terkait dengan konsep dari Bappenas, ini juga menjadi landasan kita, juga beberapa survei-survei yang sudah dilakukan, baik yang dilakukan oleh Kementerian PPPA, ini juga menjadi dasar kita terakhir tentunya pengukuran-pengukuran yang sudah dilakukan BKKBN sejak beberapa tahun yang lalu. Inilah yang menjadi landasan teori daripada kita dalam pelaksanaan IPK.

*Slide* berikut, ini terkait dengan definisi keluarga berkualitas, saya tidak bacakan di sini. Ini kita kutip daripada Undang-Undang 52 apa yang dimaksud. *Slide* selanjutnya.

Bapak dan Ibu sekalian,

Indeks pembangunan keluarga ini terdiri dari tiga dimensi: dimensi ketenteraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan. Kita melihat keluarga-keluarga Indonesia yang tenteram, mandiri dan akhirnya tentu bahagia, ini yang kita harapkan dari tentunya pembangunan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah kepada keluarga-keluarga Indonesia.

Bapak dan Ibu sekalian,

Tentunya IPK ini memberikan gambaran peran/fungsi keluarga di Indonesia. Ini yang kita kombinasikan, sehingga tiga dimensi ini menjadi dasar daripada nanti pengukuran daripada IPK kita.

Dari hasil uji coba, di *slide* berikutnya, dari hasil uji coba yang sudah kita lakukan indeks pembangunan keluarga berkisar diantara 49,90%. Kalau kita melihat/mengartikan nilai 49% dari tentunya keputusan para ahli, 49 ini sudah dikategorikan cukup baik. Di bawah 40 dikategorikan yang jelek. Di *slide* berikut, di atas 40 ini, mohon maaf di *slide* berikutnya, lebih kecil dari 40 angka ini dikatakan kurang baik, antara 40 dan tentunya 70 cukup baik dan di atas 70 kita anggap baik.

Bapak dan Ibu sekalian,

Saat ini dari hasil uji coba IPK (Indeks Pembangunan Keluarga) di daerah uji coba kita dapatkan angka 50 kurang atau tepatnya di 49 yang tergolong cukup baik ini.

Bapak dan Ibu sekalian,

Lanjutkan di *slide* berikut, *slide* saja ini merupakan dasar kita bahwa IPK ini terdiri dari tiga dimensi, ada 11 indikator, ada 17 pertanyaan yang menyusun daripada Indeks ini. Dan tentunya, *slide* berikut, dalam penyusunan, selanjutnya *slide* berikut, dalam penyusunan IPK ini tentu dari awal setelah tentunya para ahli menyusun indeks-indeks tadi tentunya dari Undang-Undang 52, dari beberapa sumber-sumber teori-teori tadi ini sudah dilakukan, kemudian diawali tentang setelah indeks ini berhasil disusun pertama, kemudian setelah uji coba ini kita koordinasikan dengan Bappenas,

kemudian setelah itu tentu dilanjutkan dengan masukan-masukan Bappenas ini dikaji kembali. Ini sudah berlangsung, Bapak dan Ibu, sejak 2018 sebenarnya awal hingga 2019. Kemudian berbagai diskusi pakar sudah kita laksanakan, termasuk pakar-pakar sosial, pakar-pakar tentunya terkait dengan psikologi dan keluarga, baik yang ada tentu di Bogor, kita juga sudah ke UI, termasuk juga ke Gajah Mada dan ke Universitas Negeri Yogyakarta, yang ada Prodi-prodi keluarga kita konsultasikan ketika itu. Kemudian kita lakukan uji coba pertama terkait dengan kuesioner, kita uji coba terakhir kemarin, ini kita dapatkanlah terakhir angka tadi yang 49,9%. Silakan, mohon *slide* berikutnya.

Bapak dan Ibu sekalian,

Tahapan, terus saja, tahapan terakhir ini Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau ini juga terlalu kecil, ini yang saya katakan ada tiga dimensi, ada 17 penyusun pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan IPK ini, termasuk kalau ke bagian itu ada dua indikator-indikator interaksi keluarga, termasuk interaksi sosial yang kita gunakan. Ini semua tentunya sudah berdasarkan dari pemikiran-pemikiran para pakar, termasuk tentu referensi-referensi yang sudah digunakan.

Bapak dan Ibu sekalian,

Di *slide* berikut ini hanya menunjukkan proses, *slide* berikut, proses kita ketika mulai di awal tadi, terus, sebelumnya mohon maaf, satu *slide* tadi, ini setelah tadi melewati beberapa proses-proses tadi, termasuk kunjungan-kunjungan ke universitas.

Terakhir Bapak dan Ibu sekalian, indeks pembangunan keluarga ini kita maksudkan tentunya untuk mengukur keberhasilan daripada pembangunan keluarga, indeks pembangunan keluarga bisa juga digunakan untuk mengukur level pembangunan keluarga antara satu wilayah, bisa digunakan sebagai pembandingan keberhasilan pembangunan keluarga. Indeks pembangunan keluarga ini bersamaan dengan pendataan keluarga tadi bisa atau berguna untuk menentukan persoalan keluarga di tingkat keluarga. Kita bisa mengetahui *by name by address* dengan mengetahui dengan kombinasi dengan IPK.

Bapak dan Ibu sekalian,

Kita berharap tentunya indeks pembangunan keluarga yang tadi telah digunakan atau menjadi gambaran pembangunan keluarga di tingkat tentunya wilayah atau kabupaten/kota bisa dijadikan dasar penyusunan kebijakan bagi daerah tersebut.

Bapak dan Ibu sekalian,

Inilah yang kita maksudkan daripada indeks pembangunan keluarga ini. Kita berharap di 2020 nanti indeks pembangunan kita laksanakan, selesai ini tentunya bisa dilaksanakan atau bisa digunakan oleh kabupaten/kota

sebagai dasar untuk penyusunan kebijakan, terutama terkait dengan pembangunan keluarga.

Bapak dan Ibu sekalian,

Inilah terkait dengan indeks pembangunan keluarga. Izinkan mungkin terakhir saya akan membacakan terkait dengan Kampung KB yang menjadi salah satu dari program inovasi dan program episentrum kita.

Bapak dan Ibu sekalian,

Kampung KB atau program Keluarga Berencana ini, nanti mohon Bapak Kepala juga mohon bisa ditambahkan kalau ada hal-hal yang tentu terlewatkan hal-hal baru, program Kampung keluarga ini merupakan amanah presiden setelah di tahun 2015 yang lalu Bapak Presiden meresmikan Kampung KB tepatnya tentu di Cirebon ketika itu. Sejak 2015 ketika itu BKKBN dimintakan untuk menyusun *roadmap* daripada pembentukan Kampung KB. BKKBN telah menyusun *roadmap* tersebut sampai tahun 2019.

Bapak dan Ibu sekalian,

Pembentukan di tahun 2015 kemudian kita mulai melakukan di 2017 itu sesuai dengan *roadmap* Kampung KB dibentuk di 707.160 kecamatan ketika itu, di tahun berikutnya pembentukan Kampung KB ditambah sebesar 6.727. Pada saat di 2018 ini pembentukan Kampung KB sudah menyesuaikan dengan kriteria-kriteria lain dari pemerintah. Kita sudah fokus pada daerah tertinggal. Kalau tadi di awal hanya beberapa daerah atau desa-desa yang sesuai dengan tentu program-program kita dimana program kita rendah di situlah kita melakukan pembentukan Kampung KB, tapi 2018-2019 kita sudah menyesuaikan dengan tentu kriteria-kriteria pemerintah yang lain. Saat sekarang ini jumlah Kampung KB yang sudah terbentuk, di *slide* sebelumnya, sebelumnya, balik ya, lebih kurang ada 15.585 yang tersebar di seluruh Indonesia seperti yang terlihat pada peta tentu yang ada di hadapan kita ini.

Bapak dan Ibu sekalian,

Mohon di *slide* berikutnya, Kampung KB ini kita maksudkan adalah wujud integrasi lintas sektor. Kebetulan namanya Kampung Keluarga Berencana, tapi yang dimaksudkan sebenarnya adalah integrasi lintas sektor di unit paling kecil di desa dan..., berikutnya, dan inilah yang tadi Bapak Pimpinan sudah berkesempatan melihat mungkin di Jawa Timur tepatnya mungkin di Surabaya. Tentu ada yang banyak membawa keberhasilan, tapi juga harus kami akui tidak semua juga memberikan *best practice* yang baik. Inilah menjadi tugas kita ke depan untuk semua Kampung KB yang sudah kita bentuk tentunya dapat menjadi semua Kampung KB seperti yang kita maksudkan.

Di *slide* berikutnya, mohon maaf, Bapak dan Ibu sekalian, Kampung KB ini tentunya diawali dengan pembuatan peta jalan tadi yang kita sebut dengan *roadmap* tadi, kemudian membangun kemitraan. Bapak dan Ibu

sekalian, Kampung KB terdiri dari Pokja-pokja, Pokja-pokja ini SK-nya ditandatangani oleh pimpinan daerah atau paling tidak setingkat sekretaris daerah di setiap kabupaten/kota. Pokja yang ditandatangani oleh pimpinan daerah ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi di lapangan dalam rangka untuk menggerakkan daripada lintas sektor yang lain dalam rangka untuk pembangunan Kampung KB. Penunjukan Kampung KB ini berdasarkan kriteria dan..., *slide* berikut, sebelum..., mohon maaf, sebelum *slide* terakhir ini, dilanjutkan dengan pembinaan pengelolaan Kampung KB tentu BKKBN menyiapkan pedoman, pelatihan-pelatihan, satu *slide* sebelum ini mohon maaf, sebelum sekali lagi, ya, tentunya dengan pelatihan-pelatihan, kemudian tentu disamping pelatihan-pelatihan seperti ini kita juga melengkapi kebutuhan-kebutuhan Kampung KB. Di setiap Kampung KB ini tentunya ada pojok kependudukan, ada terkait juga dengan data. Jadi setiap Kampung KB dilengkapi dengan data dan tentunya fasilitas-fasilitas dasar dari pengolahan-pengolahan data juga kita lengkapi, ini ada di semua Kampung KB.

Bapak dan Ibu sekalian,

Dalam rangka untuk mendorong pemerintah daerah dalam rangka untuk mendorong Kampung-kampung KB ini BKKBN juga melakukan lomba-lomba Kampung KB, memberikan *reward* bagi yang baik, ini dalam rangka untuk mendorong Kampung KB ini dan kita berharap juga Kampung KB ini menjadi contoh bagi Kampung KB-kampung KB yang telah tentunya baik.

Terakhir tentunya, Bapak dan Ibu sekalian, didalam pengelolaan Kampung KB kita tidak terlepas daripada monitoring. monitoring Kampung KB ini terus kita kembangkan dan mulai dari sifatnya yang pertama sangat tentunya yang bersifat dari yang masih menggunakan tentunya manual sampai saat sekarang ini Kampung KB itu sudah bisa dipantau lewat *website* dan tentunya pemantauan ini juga monitoring ini kita maksudkan untuk memudahkan pelaksanaan daripada Kampung KB.

Bapak dan Ibu sekalian,

Kampung KB ini bisa kita ikuti lewat *website* kita. Di semua Kampung KB ini tentu sudah terhubung, Bapak dan Ibu sekalian. Dan ini tentunya kita maksudkan bukan hanya untuk sebagai monitoring, tapi ini juga bisa kita maksudkan untuk bagi semua kalangan yang ingin menggunakan Kampung KB, termasuk bagi penelitian-penelitian oleh mahasiswa, ini tentu kita persilakan dengan menyusuri tentunya *web* ataupun tentunya sumber-sumber lain yang ada di BKKBN ini.

Bapak dan Ibu sekalian,

Ini hanya sekedar untuk persyaratan Kampung KB. Tadi di awal sudah saya kemukakan, satu *slide* berikut, ini syarat-syarat yang di awal, kemudian bagaimana Kampung KB-kampung KB ini, apa yang ada di Kampung KB...

**KETUA RAPAT:**

Pak Yani, coba saya lihat sebelumnya, itu yang percontohan provinsi 35 itu bagaimana coba? 35 provinsi atau 34 atau bagaimana atau percontohnya 35?

**DEPUTI BKKBN BIDANG KSPK (Dr. dr. M. YANI, M.Kes., PKK.):**

Jadi ada di 35 Kampung KB tersebar tentunya di semua 34 provinsi kita, Pak. Ada 35, tapi di 34 provinsi kita ini yang terbaik. Ya, ada yang dua. Ya, betul.

Terakhir di *slide* sebelum, Bapak dan Ibu sekalian, ini hanya menggambarkan apa yang terdapat atau yang ada di Kampung KB, Bapak dan Ibu sekalian.

Boleh *slide* berikutnya.

Bapak dan Ibu sekalian,

Ini data terakhir di... Kita mencoba, karena di awal Bapak dan Ibu sekalian pembentukan Kampung KB berdasarkan kriteria yang kita buat, kemudian mengikuti beberapa kriteria yang ada di Kementerian lain. Terakhir, kita mencoba menempatkan Kampung KB sesuai dengan desa-desa *stunting* yang kita terima dari Bappenas.

Bapak dan Ibu sekalian,

Memang tidak semua Kampung KB beririsan dengan desa-desa *stunting*. Terakhir ada 946 Kampung KB yang mampu kita iriskan atau berdempet dengan desa *stunting*. Ya, yang teriris dengan Kampung KB sebesar ini, ini tentunya untuk memudahkan baik program pengentasan *stunting* dan tentunya Kampung KB sendiri. Dan ini jumlah yang tertera, mungkin tidak terlalu kecil, jumlahnya ada tertera di dalam tabel yang di sebelah kiri.

Bapak dan Ibu sekalian,

Dari pelaksanaan Kampung KB ini tentunya seperti yang di awal saya katakan tadi, *slide* berikutnya, kita harapkan yang pertama tentu program-program yang ada di BKKBN ini dapat tercapai dengan jauh lebih baik, disamping tentunya program-program di luar program-program BKKBN. Khusus untuk program kita tentu sesuai dengan Tupoksi kita, kita berharap di Kampung KB ini akan terjadi peningkatan capaian atau program-program kita.

Dari evaluasi kita, pada *slide* berikut, *slide* berikutnya, *next slide*, ini Bapak dan Ibu sekalian, ada dua grafik di sebelah kiri dan sebelah kanan yang membedakan tahun. Seperti kita lihat, mohon maaf, di tahun 2018 kontribusi Kampung KB terhadap program kependudukan secara umum ini terlihat dari 7, 2018 ada 7, kita melihat luar biasa kenaikan di 2019 kontribusi Kampung KB terhadap program tersebut.



**KETUA RAPAT:**

Sebentar, Pak Yani. Ini malah saking hitamnya tidak kelihatan, Pak.

**DEPUTI BKKBN BIDANG KSPK (Dr. dr. M. YANI, M.Kes., PKK.):**

Mohon maaf, Pak. Saya mohon maaf betul, ini fotokopi warna agak...

**KETUA RAPAT:**

Berarti begini Pak Yani, ini kan bagus paparannya. Jadi diganti nanti yang baru. Bukan rapat ke depan, tapi ini nanti diganti, dikasih lagi ke Anggota.

Terima kasih.

**DEPUTI BKKBN BIDANG KSPK (Dr. dr. M. YANI, M.Kes., PKK.):**

Siap, baik, Pak. Mohon maaf sekali. Iya, Ibu. Saya mohon maaf betul ini, karena warna kami jadi hitam.

*Slide* berikut, ini juga terkait dengan kepesertaan KB, kontribusi Kampung KB terhadap capaian program Kampung KB, ini juga terlihat sangat..., walaupun angkanya tidak perlu besar, tapi dari angka yang gambar di bawah 55 terlihat 59, dalam satu tahun pertama terjadi lebih kurang 4 poin naiknya di sini.

Berikut terkait dengan Poktan-poktan kita di setiap kampung, Poktan ini Kelompok Kegiatan ada Bina Keluarga balita, Bina Keluarga remaja, ini merupakan bentuk kegiatan, terkait juga dengan peningkatan upaya ekonomi keluarga dan terakhir dengan Pusat Informasi Konseling Remaja dibandingkan di tahun 2018 dan 2019 kita lihat di sini walaupun jumlahnya tidak mencolok tapi terlihat pada Kampung KB semua Poktan baik jumlah di sini hanya terlihat tentunya kuantitasnya, terlihat kenaikan daripada jumlah-jumlah ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Bapak dan Ibu sekalian,

Ada beberapa hal, *slide* berikut, ada beberapa hal yang baik yang bisa menjadi contoh bagi tentunya Kampung KB atau katakan desa-desa lain yang tentu dalam pembentukan awal Kampung KB ini yang pertama yang kita dapatkan dari Kampung KB yang berhasil ini dapat menumbuhkan kesadaran bersama dari berbagai pihak untuk membangun tentunya masyarakat. Yang kedua, dirasakan sekali oleh masyarakat tersebut tentang kehadiran daripada Kampung KB ini, terutama terkait dengan tentunya usaha-usaha dan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan di sana. Dan terjadi kita lihat tadi percepatan capaian program, ini yang kita lihat dari Kampung KB-Kampung KB yang tentunya setelah terbentuk. Dan karena di Kampung KB ini terjadi integrasi lintas sektor, terdapat pertumbuhan desa, ini yang bisa terlihat mungkin dari beberapa daerah-daerah atau Kampung KB yang *best practice* seperti yang telah dikunjungi oleh Bapak Ketua tadi. Ini yang salah satu manfaat dari Kampung KB setelah 2015 Kampung KB ini terbentuk.

Bapak dan Ibu sekalian,

Di *slide* terakhir ini Kampung KB ini merupakan sebuah episentrum, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pimpinan tadi bagi tentunya pembangunan program KKBPk di tingkat tentunya wilayah yang paling kecil di desa, ini merupakan momentum untuk menuju perubahan dengan cara baru. Kita menganggap hal seperti itu, karena Kampung KB juga merupakan hal yang baru. Memang masih dibutuhkan penguatan payung hukum untuk Kampung KB. Kita berharap Kampung KB ini dapat tentunya dikuatkan dengan instruksi presiden. Saat ini tentunya draft ini sudah berada di Setneg, mudah-mudahan dalam waktu mungkin tidak terlalu lama instruksi presiden ini dapat keluar.

Bapak dan Ibu sekalian,

Tentunya dalam evaluasi Kampung KB ini BKKBN menetapkan ada tiga jenis: ada dasar, berkembang dan mandiri. Kita berharap semua Kampung KB terakhir dengan mandiri, ini yang kita maksudkan dengan Kampung KB yang sudah berhasil dan tentunya, Bapak dan Ibu sekalian, kita berharap lewat Kampung KB ini kemitraan dapat terwujud dengan lintas sektor kita berharap *civil society* ini dapat terbangun di dalam tentunya Kampung KB ini.

Bapak dan Ibu sekalian,

Kira-kira inilah terkait dengan Kampung KB mulai dari pembentukan Kampung KB tadi, kemudian beberapa tentu keberhasilan. Kami akui belum semua Kampung KB ini memberikan tentunya hal-hal yang positif, tapi itu justru yang menjadi tantangan kita ke depan. Dengan belajar dari beberapa Kampung KB yang berhasil kita berharap seluruh Kampung KB ini dapat dihasilkan.

Bapak dan Ibu sekalian,

Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tadi, baik tentang PK, IPK, terakhir dengan Kampung KB. Demikian.

Izin, Pak Kepala.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Terima kasih, Pak Deputi.

Saudara Pimpinan dan Bapak/Ibu Hadirin yang kami hormati,

Demikian paparan kami mulai dari *rebranding*, kemudian pendataan keluarga, indeks pembangunan keluarga dan yang terakhir adalah Kampung

KB. Tentu kami mengharapkan banyak masukan dari Bapak/Ibu sekalian, dimana indeks pembangunan keluarga ini memang kami harus mendapatkan arahan, karena belum pernah ada indeks pembangunan keluarga di Indonesia maupun juga secara internasional. Oleh karena itu kami merasa diberi amanah membuat ukuran baru, tetapi kami juga tentu harus khawatir jangan-jangan ukuran ini tidak bisa mengukur yang realistis yang validitasnya tidak tinggi. Oleh karena itu kami tentu mohon dengan hormat arahan-arrahannya terkait dengan pembuatan indeks pembangunan keluarga tersebut.

Begitu juga pendataan keluarga, kami sangat ingin memotret keluarga dengan potret yang baik, dengan diagnosis yang baik, sehingga bisa dipakai untuk *treatment* yang baik juga dalam rangka untuk pembangunan keluarga itu sendiri.

Dan yang terakhir tentu ada plus minus tentang Kampung KB ini. Sudah tidak menjadi rahasia lagi, tentu kami akan banyak mendengar masukan dari Bapak/Ibu sekalian.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Terima kasih Bapak Hasto dan tadi Bapak Yani atas paparannya semuanya.

Bagus sekali ya, komprehensif. Kalau ini terlaksana, ini pembangunan manusia seutuhnya di kita ya dan juga mungkin bonus demografi yang didengung-dengungkan berada di tangan Bapak soalnya. Kita siap nanti banyak kawan-kawan di sini apa yang mungkin kita bantu semuanya, baik anggarannya... Kalau ada di APBN-P ataupun ada nanti yang baru kita siap. Bagus soalnya.

Jadi sebelum ke Anggota, Bapak/Ibu sekalian, di sini saya ingin memperkenalkan ada Anggota baru di Komisi IX namanya Bapak Ade Rizki Pratama, S.E., M.M.. Silakan berdiri Pak, Fraksi Partai Gerindra, Nomor Anggota A-67, Dapil Jateng I, dengan Pak Fadholi ya, menggantikan Anggota Komisi IX DPR RI Bapak Nuroji dari Gerindra.

**INTERUPSI F-PAN (Dr. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag. M.Hum., M.A.):**

Izin, Pimpinan.

Suruh saja yang bersangkutan memperkenalkan diri. Tadi salah Pimpinan itu. Langsung saja.

**KETUA RAPAT:**

Oh ya, saya berikan waktu..., tenang Bang Saleh, saya berikan waktu buat Bang Ade. Silakan ya Bang, beri waktu.

**F-GERINDRA (ADE REZKI PRATAMA, S.E., M.M.):**

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih, Bang Saleh Daulay juga *nih*.

Pimpinan dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IX DPR RI yang kami hormati,  
Kepala BKKBN dan seluruh Jajaran yang kami hormati,

Perkenalkan nama saya Ade Rezki Pratama, Dapil Sumatera Barat II, Fraksi Partai Gerindra menggantikan Pak Nuroji. Sebelumnya saya di Komisi V, Bapak dan Ibu sekalian.

Terima kasih, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Bang. Terima kasih sebelumnya.

Selamat datang di Komisi IX, mudah-mudahan kita di Komisi IX ini mendapatkan tambahan gizi ya.

Baik, untuk para penanya ada sebelah kiri, ada sebelah kanan. Saya mulai dari sebelah kanan saya, Ibu Wenny Haryanto, kemudian siap-siap dari sebelah kiri Bapak Sutan Adil.

**F-PG (Dra. WENNY HARYANTO, S.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Yang saya hormati Pimpinan beserta Rekan-rekan Komisi IX,  
Yang saya hormati Kepala BKKBN beserta Jajaran,

Pertama-tama saya menyampaikan aspirasi atas logo yang baru. Saya penasaran tadi mendengarkan Kepala BKKBN menjelaskan maksud dari logo itu apa semua. Tapi saya masih penasaran itu titiknya yang bulat itu maksudnya apa begitu *loh, kok* tadi tidak dijelaskan. Adanya kupu-kupu, ada hati, tapi yang bulatnya itu apa? Saya pikir itu kepala orang atau apa begitu. Itu *kok* tadi terlewatkan penjelasannya.

Kemudian ini ada beberapa pertanyaan saya yaitu:

- Yang pertama, mengapa *sih* cara pendekatan kampanye program BKKBN untuk era *baby boomer* yaitu tahun 1946 sampai 1955 sudah tidak relevan lagi. Mengapa? Bukankah sasaran pendekatan kampanye program BKKBN sejak dahulu itu usianya sama, hanya saja teknik dan metodenya serta media penyampaiannya yang berbeda yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan masyarakat saat ini dengan media yang jauh lebih beragam dan *update* dengan adanya *social media*, tapi isi materi yang disampaikan kurang lebih sama.
- Kemudian pertanyaan yang kedua, *rebranding* BKKBN menuju cara baru dengan *tagline* "Terencana itu Keren, Berencana itu Keren" menggantikan *tagline* terdahulu "Dua Anak Cukup", apakah hal itu justru jadi akan mendorong generasi milenial dan zilenial yang merupakan sasaran BKKBN jadi berencana mempunyai banyak anak? Kalau dulu kan dua

anak cukup kan jadi kita betul-betul berpaku pada dua anak. Tapi kalau “Terencana itu Keren”, *wah* berarti lebih dari dua anak keren juga, yang penting terencana, yang penting mampu menghidupi, seperti itu kan. Akhirnya jadi banyak anak. Jika terjadi semacam itu bukankah akan menimbulkan masalah demografi? Lalu bagaimana BKKBN menanggapi ini? Apakah orang di Indonesia ini masih kurang banyak? Seperti itu.

- Kemudian yang ketiga mengenai pendataan keluarga di Juni 2020, Mengapa harus didata dari awal? Mengapa BKKBN tidak mengambil data awal dari Disdukcapil atau Biro Pusat Statistik atau dari data pemilih pada Pemilu 2019 yang lalu? Tinggal dilakukan pembaruan data saja di 2020, sehingga bisa menghemat anggaran.

Kemudian ini saya menanggapi Bapak siapa baju biru, Pak? Pak Yani ya? Pak Yani, ini jika sasaran yang dituju BKKBN adalah generasi milenial dan zilenial, mengapa namanya programnya Kampung KB, bukan Kota KB atau Komunitas KB? Seperti itu. Karena kata *kampung* itu kesannya seperti daerah, seperti pulang kampung. Jadi kalau untuk generasi milenial dan zilenial itu kurang pas, karena mereka itu maunya kan sesuatu yang serba berbau kota, berbau modern, seperti itu. Kemudian keluarga itu kan berperan penting dalam mencetak generasi masa depan yang berkualitas, sehingga dapat menentukan kualitas masyarakat dan bangsa. Uji coba pengukuran kualitas keluarga atau IPK yang telah dilakukan BKKBN di 10 provinsi rata-rata saat ini masih berada pada nilai 49,90. Memang *sih* masih berada di posisi cukup baik dengan masih dalam *range* 40 sampai 70. Namun karenanya masih diperlukan banyak hal peningkatan kualitas agar dapat mencapai nilai 70. Bagaimana cara BKKBN membantu masyarakat agar dapat mencapai atau memenuhi semua indikator dimensi kemandirian, dimensi ketenteraman dan dimensi kebahagiaan masyarakat Indonesia mencapai nilai 70 di masa mendatang?

Terima kasih, mohon jawabannya.

*Wassalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E.):**

*Wa’alaikumsalam.*

Selanjutnya Pak Sutan.

**F-GERINDRA (Ir. H.A.R. SUTAN ADIL HENDRA, M.M.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Di sini, Pak Hasto, sebelah kanan Bapak. Di sini, Pak.

*Oh ya*, terima kasih. Sekali lagi saya ulangi, terima kasih.

Pimpinan, Rekan-rekan Komisi IX, Pak Hasto beserta Jajaran yang kami hormati,

*Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Dari paparan yang telah disampaikan tentu kami melihat dan ingin memberikan beberapa catatan-catatan. Pertama Pak Hasto terkait dengan masalah *rebranding*. *Rebranding* ini tentu suatu pemikiran yang cerdas, tetapi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang sungguh sangat baik. Karena kami melihat dalam halaman 13 Bapak menyampaikan di situ dalam melihat dan mencermati generasi milenial. Tentu ini situasi kecerdasan yang Bapak melihat bonus demografi yang ada saat sekarang. Karena kita ketahui penduduk kita tentu lebih banyak sekarang usia muda. Untuk itu dalam kondisi demografi Indonesia yang penuh tantangan dalam pembangunan ini saya lebih menitikberatkan bagaimana mengedepankan kesejahteraan, karena kata kuncinya adalah kesejahteraan. Kita juga kemarin berkunjung ke Surabaya, di sana diikuti oleh sinergitas Pemdanya, pemerintah kotanya. Tentu ini juga saya minta bagaimana BKKBN semakin bersinergi dengan sektor-sektor kesehatan, sosial, tenaga kerja maupun Dukcapil ya Pak, Dukcapil, dalam pembangunan keluarga. Karena kita ketahui sebagaimana Bapak punya *branding*, tetapi ini akan diikuti oleh sosialisasi, Pak. Karena menurut saya semakin banyak sosialisasi program di berbagai kegiatan... Karena ini sasarannya kan remaja. Ini kita tidak ada melihat dalam pemaparan Bapak bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap hal ini. Saya sangat menyesalkan begini program cerdas tetapi tidak ada sosialisasi, sehingga nanti tidak akan ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah maupun nanti penyuluh. Ini yang saya sangat ragukan. Ini barangkali catatan, bagaimana ini nanti menjadi sesuatu simpulan kita untuk meningkatkan sosialisasi itu. Apalagi menurut saya ini kan ada dua hal penting, terutama bagi yang muda-muda ini ya, Pak.

Kita ketahui generasi muda ini dua catatan penting. Yang pertama, mereka merupakan penduduk usia produktif yang menjadi pelaku pembangunan. Ini tidak bisa kita pungkiri, karena mereka adalah SDM yang harus dilanjutkan dengan berkualitas. Yang kedua, tentu mereka merupakan pasangan yang akan nantinya menjadi harapan kita penerus bangsa. Jadi untuk itu saya ingin tahu, ini berupa pertanyaan Pak, apa sumbangsih daripada BKKBN untuk menciptakan SDM yang unggul? Apalagi kita tahu program presiden sekarang menuju SDM unggul. Ini pertanyaannya yang pertama, Pak. Yang kedua, sebegitu luar biasanya bahwa ini sudah ada pemenangnya di bulan Desember ya terhadap *branding* ini ya, Pak. Tentu ini akan mengubah pola pikir kita dua anak ini menjadi sesuatu pemahaman yang sudah tertanam lama dan ini mudah diingat oleh semua masyarakat oh ya KB, cerita KB dua anak. Ini mengubah *mindset* lagi. Tentu saya ingin tahu strategi daripada BKKBN dengan mengubah pola pikir itu bagaimana terhadap KB ini kesinambungannya, bisa tidak tercapai lagi kembali nanti? Yang berikutnya, tentu ini nanti kan akan kita sosialisasikan kepada masyarakat dan kita akan tahu bahwa ini yang melaksanakannya tentu para penyuluh, para penyuluh terutama di tingkat bawah. Di Dapil saya di Jambi saya sampaikan itu ada 1.156 desa. Artinya kalau saya cek penyuluh yang ada di sana baru ada 320. Ini masih sangat kurang SDM dalam rangka itu. Walaupun tadi pemaparan saya mendengar sudah akan dilakukan melalui teknologi, sudah dilakukan melalui hal-hal elektronik dan sebagainya itu, tetapi maaf, di desa-desa itu jangankan teknologi, lampu pun listrik tidak ada. Ini saatnya sekarang. Makanya terkadang mohon maaf, "Kenapa banyak anak?" "Tidak ada gawe, Pak", katanya. Karena lampu mati. Ini harus catatan,

Pak. Ini harus catatan. Makanya saya sampaikan sosialisasi ini sangat perlu. Kan Bapak punya mitra, ini kami Komisi IX, cukup banyak di sini. Dengan banyaknya kami di sini, ini membantu Bapak dalam tugas-tugas itu bagaimana ini sampai ke desa-desa. Saya sudah dilakukan sekali ada acara dengan BKKBN... *Eh*, Balai POM yang sudah. BKKBN belum ini, Pak. Ini *sanking* rindunya ini sosialisasi dengan BKKBN ini. Kenapa? Karena kalau kita banyak memberikan pengarahan terhadap Keluarga Berencana ini, keluarga sejahtera, kan ibadah juga bagi kita, Pak Hasto.

Jadi intinya yang ingin kami sampaikan bahwa dengan kurangnya penyuluh ini, ini menjadi catatan, Pak. Karena ini nanti bersinggungan lagi dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Deputy bahwa Pak Deputy akan melakukan pendataan, apakah ini sudah ada sinkronisasi dengan pemerintah daerah? Karena pemerintah daerah juga akan melakukan hal yang sama terhadap hal itu. Jadi jangan nanti BKKBN melakukan, pemerintah daerah melakukan, ini nanti data kita sampai kapanpun tidak ada validnya.

Jadi mungkin ini beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sesuatu masukan dan ada beberapa pertanyaan untuk bagaimana KB kita ke depan menjadi lebih baik lagi tentu, ujungnya SDM kita unggul dan rakyat kita sejahtera.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima Kasih, Pak Sa.  
Selanjutnya Pak Nur Yasin.

#### **F-PKB (H. Ir. NUR YASIN, MBA, MT):**

Terima kasih, Pimpinan.

Ketua dan Wakil Ketua Komisi IX dan Anggota Komisi IX yang saya hormati;  
Pimpinan BKKBN dan Staf yang saya hormati,

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Pertama tentang *rebranding*. Sebetulnya pertanyaan saya hampir sama tadi. Cuma saya tidak mengkritisi dari 'Dua Anak Cukup' yang sangat jelas menjadi 'Terencana itu Keren', ini kan menjadi tidak jelas. Tapi tadi sudah diuraikan oleh Pak Kepala secara ilmiah *lah*. Ini hasil survei ini, saya tidak mempertanyakan dalam arti walaupun sebetulnya saya tanda tanya juga, dari jelas menjadi kurang jelas, kan begitu. Tapi oke *lah* itu. Yang saya tekankan dalam kaitannya *rebranding* ini adalah sosialisasi, Pak. Sosialisasi harus dilaksanakan secara serentak, masif dan menggunakan media-media yang digunakan oleh generasi milenial khususnya. Jadi jangan nanti konsepnya sudah bagus tadi, dalam arti sudah melalui studi yang benar, pada saat harus dikenalkan kepada target sasarannya menjadi tidak tersampaikan secara benar atau secara cukup, itu pertama.

Yang kedua tentang pendataan keluarga, Pak. Dua hal di sini yang saya pertanyakan. Pertama, ini kan data primer Bapak tadi jelaskan. Artinya data ini sangat penting dan pada periode lima tahun kita punya data ini dan ini

akan dipakai oleh semua pemerintah instansi yang ada di pemerintahan untuk menyusun program-program pembangunan. Jadi demikian pentingnya data ini. Hanya masalahnya hasilnya akan menjadi baik dan benar kalau diisi juga dengan data yang benar. Data yang benar ini kan sangat tergantung juga dengan surveyornya atau pendatannya. Saya tahu di kantor-kantor kecamatan itu ada staf yang berkaitan dengan ini, menggunakan ini, menggunakan yang ada di kecamatan-kecamatan itu. Kalau *toh* menggunakan surveyor itu pasti tidak cukup kan, karena ini besar sekali kan, besar sekali sampelnya, sehingga besar sekali yang harus dicacah, sehingga mungkin nanti menggunakan juga surveyor-surveyor atau pengisi data yang direkrut.

Dalam hal perekrutan ini kalau dia tidak memahami yang tertulis dan tidak tertulis yang ada di kuesioner ini, dia bisa bias dalam pelaksanaan atau tingkat kesalahannya akan tinggi. Apalagi datanya sama. Bagi seorang surveyor nanti kan bisa menebak itu, maksudnya sesudah didata mungkin lima kuesioner pertama masih bagus, kuesioner keenam dan seterusnya jawabannya kira-kira sama saja, kan begitu. Jangan-jangan nanti diisi di rumah, kan begitu. Ini mohon kalau itu salah ya data Bapak yang sangat diperlukan oleh negara ini ya salah, begitu *loh*. Ini pentingnya surveyor dalam kaitannya dengan survei data primer ini.

Yang lain, didalam pendataan keluarga ini saya mau tanya persentase-persentasenya ini. Bapak gunakan 44,18% untuk yang akan diambil data primernya ya atau nanti mohon jelaskan, saya tadi kurang begitu menyimak. Dan juga kenapa 40% dari KK yang akan disurvei dengan formulir dan 60% dengan *smartphone*, Pak? Kenapa tidak 20-80 atau 50-50? Dasarnya ini apa? Apa dasarnya hanya karena ketersediaan anggaran atau apa? Kalau dasarnya karena ketersediaan anggaran mungkin perlu ditinjau kembali, Pak. Jadi nanti saya berharap dasarnya ini ilmiah dan dari angka-angka statistik.

Tentang IPK, saya kemarin salah satu dari..., saya mohon maaf tidak mencatat namanya, lupa yang berkunjung ke Surabaya Bapak yang baju hijau siapa, beliau mendampingi, ikuti semua presentasinya Ibu Risma. Saya yakin saya rasa itu bukan main, seorang pemimpin yang begitu hebat dalam membangun masyarakat ya. Sampai di situ pemanfaatan SDM itu sampai..., mohon maaf, yang cacat pun tetap dipekerjakan dengan pekerjaan-pekerjaan yang pantas dan bisa, dengan gaji juga yang mengikuti gaji yang pantas. Anak remaja pada saat jam belajar tidak ada yang main-main di Surabaya itu. Kalau ada ditangkap, Pak. Bukan dipukuli, tapi dididik, orang tuanya dipanggil. Pengemis tidak ada. Kalau ada pengemis ditangkapnya, bukan juga untuk dipukul, tapi dia *assess* dia sebetulnya bisa apa *sih*, begitu *loh*. Akhirnya dia oleh Ibu Risma dikasih pekerjaan yang sesuai. Bukan main, Pak. Sehingga kalau menurut saya..., saya sampai waktu itu usulkan karena di akhir masa jabatannya Ibu Risma untuk menulis buku supaya buku ini menjadi buku pintar untuk para pejabat, walikota dan bupati yang lain.

Di sini saya juga tadi tidak terlalu melihat, karena mungkin juga kita tidak bahas detail ya, hal-hal seperti itu diungkap juga didalam menyusun IPK ini, kenapa kita dapat 49,9, itu tadi tidak..., karena mungkin terbatasnya waktu, tidak tersaji. Tapi karena kemarin sekali lagi dari Pimpinan BKKBN ada yang ikut mungkin bisa mengerti yang saya maksud bahwa apa yang dilakukan Ibu Risma itu harusnya menjadi komponen-komponen juga yang diteliti di sini. Seperti menutup Doli, itu tidak mudah, itu tidak terbayang saya bisa... Saya orang Jawa Timur, jadi paham karakter orang Jawa Timur. Jadi



itu sesuatu yang sangat bagus untuk ditiru dan diduplikasi oleh masyarakat Indonesia yang lain.

Saya pikir sementara itu saja, karena masih banyak teman-teman yang lain.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Bapak/Ibu sekalian,

Tolong menyampaikan ininya waktunya diatur sendiri. Saya tidak membatasi, tapi diatur, karena yang tanya banyak *banget* poin-poinnya.

Selanjutnya Ibu Dewi Asmara, silakan.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

Pada BKKBN pertama-tama berkaitan dengan presentasi yang disampaikan. Terus terang mungkin kalau menurut anggapan kami presentasi ini rasanya kurang lengkap ya, kurang informatif, jujur saja. Pertama-tama kalau kita berbicara mengenai *rebranding*, pada saat anggaran diajukan konsepsi yang diajukan kepada kami seolah-olah *rebranding* itu akan muncul sesuatu yang baru, menarik, seksi untuk kaum milenial. Itu adalah benar-benar satu semangat baru, api baru yang menjadi semangat baru di tahun yang baru di era pemerintahan Pak Jokowi yang baru. Ternyata ketika kami melihat laporan ini kami cukup terkejut bahwa untuk *rebranding* logo saja ini memakan waktu satu tahun ya, baik dari... Kalau kita lihat dari penjelasannya di depan dari mulai mau ada sayembara dan lain-lain satu tahun hanya untuk *rebranding* logo saja. Padahal itu baru *rebranding* loh. Belum kalau kita bicara, setelah *rebranding* kita mesti *repositioning*. *Repositioning* di sini cuma digambarkan Bapak sedikit, berpindah era dari *baby booming* ke generasi Y, belum nanti ke generasi Z, sudah pindah lagi itu. Tidak jelas digambarkan *repositioning*-nya seperti apa. Baru *repositioning*. Belum lagi nanti Bapak kan harus *recomparing*, seperti apa rencananya. Setelah *recomparing* Bapak juga harus buat lagi *replanning*, seperti apa *planning*-nya. Dan yang terakhir adalah *reaction*. Di sini kita tidak dapat gambaran. Ini sudah awal, baru awal sini... Kita kan ingin dapat gambaran. Mana *time table*-nya, Pak? Jangan Bapak masuk tahun baru hanya gambarkan sama kita, "Oh saya sudah *rebranding*". Setahun bicara cuma logo saja. Mungkin itu ada, tapi tidak digambarkan ke sini. Entahlah, yang jelas presentasi ini tidak tergambarkan. Itu catatan pertama. Kasihlah kepada kita bahwa untuk tahun ini bahwa kami mempunyai program dalam satu tahun sekian bulan kami *rebranding*, sekian bulan kami *repositioning*, sekian bulan kami *replanning*. Jadi kami juga tahu. Misalnya *repositioning*-nya mau di milenial, itu akan masuk lewat mana, lewat mana, apa radio atau apa, apa TV. *Repositioning* kami akan berhubungan

dengan perguruan tinggi, dengan sekolah-sekolah, kami kerjasama dengan Mendiknas dan sebagainya dan sebagainya. Ini apa begitu. Masak kita masuk hanya bicara soalnya *rebranding*. Mau ada titik, mau gambar hati, *whatever*, tidak jelas. Karena kan kita bicara di sini adalah penggunaan anggaran, bukan soal gambar. Itu yang pertama. Jadi saya minta mana *planning*-nya, *timetable*-nya apa yang mau dibuat. Dengan anggaran yang dimintakan pengertian *rebranding* bukan hanya ganti logo, tapi mana perencanaannya, sehingga kita jelas. Itu tidak tergambar di sini.

Kemudian yang kedua pendataan keluarga. Memang ini yang diminta sebagai program unggulan pada 2020. Tetapi saya berharap bahwa BKKBN ini jangan terjebak bahwa pembangunan keluarga ini sebagai tugas yang paling utama. Justru sebetulnya kalau kita bicara logonya, tadi bicara juga *rebranding*-nya, harus ada persentasenya, mana yang mau tujuan utamanya itu berapa persentasenya untuk supaya katakanlah konsepsi keluarga itu keluarga yang siap, keluarga yang tidak pasangan terlalu muda dan sebagainya. Karena ini kita belum apa-apa sudah bicara dengan dana. Katakanlah yang dibutuhkan 600 miliar. Memang yang tersedia baru 200 miliar, tapi kalau kita ambil rasionya... Waktu 2019 katakanlah anggarannya saja kan berapa, 3,5 triliun, itu 600 butuhnya, itu kan hampir 20% lebih. Sekarang lebih menurun lagi kan, anggaran-anggaran BKKBN itu kan turun. Katakanlah 3 triliun, 3 triliun itu kalau kita mau bicara..., berapa tadi, 200 miliar kan yang tersedia, itu sudah berapa persen tersendiri. Sementara yang ingin saya sampaikan pembangunan keluarga itu bukan hanya tugas BKKBN. Cobalah untuk berkoordinasi juga. Karena Kementerian Sosial juga membangun keluarga. Namanya saja mereka punya program, Program Keluarga Harapan, keluarga juga namanya. Mau keluarga miskin, setengah miskin, hampir miskin, *whatever*. Semua sama, BPJS juga sama, patokannya data lagi, keluarga yang miskin, yang harus dapat PBI. Ini negara kita begitu banyak *spending* keluar hanya untuk data keluarga lagi, keluarga lagi, semua. Departemen Sosial minta data buat keluarga, sekarang BKKBN juga keluarga, nanti lagi kita mau Pilkada atau Pemilu keluarga lagi, terus saja hanya data-data, akhirnya tidak tahu kemana. Maksud kami di sini coba fokus dulu tugas utama BKKBN itu apa. Karena kalau pembangunan keluarga ini kan itu semua memang kalau di daerah... Kan Bapak di sini mengatakan dalam peraturan pemerintah, mana tadi itu, undang-undang *lah* kalau tidak salah ini, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pada Pasal 30 menyebutkan bahwa:

*“Instansi pemerintah dalam hal ini BKKBN dapat membentuk satuan organisasi lingkungannya untuk melaksanakan statistik sektoral.”*

‘Dapat’, ‘dapat’ itu artinya tidak wajib ya, pengertian undang-undang dapat itu tidak wajib. Jadi Bapak juga harus menyaring masukan dari tim-tim Bapak yang dari BKKBN. Jangan karena supaya kelihatannya banyak pekerjaan malah jadi tidak fokus. Pengertian ‘dapat’ itu tidak harus, Pak. Kecuali kalau wajib, itu saya yakin. Tapi kalau bicara undang-undang, pengertian ‘dapat’ itu berarti bukan wajib. Maksud saya daripada kita *spend* uang segitu banyak, apa *sih* tugas utama BKKBN, itu dulu, supaya Bapak itu jadi fenomenal begitu. Targetnya Bapak itu apa begitu. Jadi orang kalau menyebut nama Bapak sudah ingat kayak zaman dulu orde baru, kalau

kita..., tahu *lah* bapaknya BKKBN. Kita ingin juga ada itu di era Bapak. Jadi kayak Pak Haryono Suyono, kita ingin menyebut Bapak juga seperti itu. Jadi kita tidak perlu misalnya kayak pembentukan keluarga. Walaupun itu penting, tidak usah kita *ngotot* itu sementara itu kewajibannya pemerintah daerah, kewajibannya Departemen Sosial, dengan anggaran yang 200 miliar tadi itu *loh*, Pak. Bukan saya bilang apa-apa, tapi rasanya itu menyebabkan kurang fokus. Contohnya saja di depan Bapak bilang kan kalau menurut program SEMAR PUS-nya (pasangan usia subur) pengetahuannya itu masih minim. Tahun 2019..., itu saja kan sudah contoh, di-*spend* uang pasangan usia subur sudah pakai program SEMAR saja masyarakat banyak tidak tahu. *Ngapain* kita masih mengurus yang pembentukan keluarga dan yang lain-lain sampai sebegitu besarnya. Itu hanya untuk data. Mendingan yang 200 sekian miliar itu kasih buat penyuluh KB biar dia kerja benar. Jadi bagaimanalah Bapak fokus supaya milenial ini benar-benar paham mengenai program Bapak ini dan Bapak sukses di situ. Mau *advertise* dengan sesuatu gebrakan yang bagaimana, ini yang kami ingin lihat. Daripada banyak kerja itu cuma *window dressing* saja tapi targetnya tidak ada, tidak sampai tercapai. Itu yang artinya meskipun anggaran itu kita setuju, tapi di sini tidak kelihatan habiskan data banyak. Itu tugasnya juga nanti kan Bapak kerjasama sama Pemda. Kan Bapak badan yang *independent*. Kita ingin lihat keberhasilan Bapak. Terserah, Pemda lain juga belum tentu, Pak. Kebijakannya masing-masing Bupati kan. Lain padang lain belalang, kira-kira seperti itu.

Kemudian juga mengenai Kampung KB. Di sini Bapak sampaikan Kampung KB begini, begini, begini. Kenyataannya jujur saja, Kampung KB itu hanya *window dressing* saja dari BKKBN, tidak seperti itu di lapangan. Contoh itu hanya seremonial. Bapak bilang kan di halaman 14 ini ada dari PMK, apa tadi itu, Setneg dan sebagainya. Di lapangan tidak ada, Pak. Jangan Bapak bilang di sini Kampung KB bagaimana. Di daerah..., kami kan ke daerah, betul bupati berlomba-lomba meresmikan Kampung KB, Kampung KB. Setelah itu apa? Rakyat tanya-tanya sama kita, "Ibu, kalau kita sudah Kampung KB di situ bagaimana ya? Kita juga bingung." Kalau kata Ibu Ribka ini cuma urusan kita buat apa itu, Ibu Ribka? Gapura, cuma buat gapura Kampung KB, gapura. Sudah, habis itu buat sosialisasi di situ, habis itu sudah, jepret, jepret, jepret Kampung KB. Habis itu *so what?* Tidak ada, Pak. Jadi kalau dibilang di sini ada berbagai Kampung mungkin percontohan kalau Bapak bilang seluruh Jawa Tengah I iya barangkali, Pak. Tapi kan ini kita bicara ribuan Kampung KB. Apa memang benar begitu dijalankannya? Tidak, Pak. Pemerintah daerah itu cuma tertarik berhasil waktu meresmikan. Setelah itu tidak ada, tidak berjalan. Artinya perhatian dari pemerintah daerah tidak kemudian berjalan. Jadi hanya apa ya, hidup segan matipun tak mau. Itulah keberadaan Kampung KB-Kampung KB yang ada di daerah. Artinya apa? Niat baik dari BKKBN ide membuat programnya itu bagus, tetapi implementasi yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah daerah, meskipun mereka punya yang namanya Dinas Kependudukan apakah namanya panjang sekali di daerah, itu kenyataannya tidak begitu, Pak. Tergantung bupatinya, kalau dia perhatian *ya iya*. Tapi kan *majority* lebih memperhatikan yang lain, infrastruktur, daripada sekedar Kampung KB, paling cuma diambil peresmian saja supaya kelihatannya keren punya Kampung KB sekian, peresmian saja. Ini yang kami mintakan perhatian. Jadi jangan ketika kita di sini di ruangan ini bicara seolah-olah kita sukses ada

Kampung KB segala macam dengan segala macam. Tidak jalan itu, Pak Benar-benar. Artinya Kampung KB-nya iya pada awalnya ada pengurusnya. Kadang-kadang kejadian *nih* di Dapil, "Mana pengurusnya?" "Oh sedang ke rumah sakit." "Bendaharanya mana?" "Oh sedang ke sini." Itu saja tingkat kota, Pak. Jadi asal-asalan sekali. Itu juga banyak kita temui. Ketika kita mau tegur agak sulit ya, karena itu kan di bawah bupati, walikota, tidak langsung di bawah BKKBN. Kami juga pahami. Untuk itu daripada kita mau bicara-bicara muluk-muluk Kampung KB itu mau bagaimana, coba yang ada dulu dievaluasi bagaimana tindak lanjutnya. Jangan mau makin beribu, beribu, beribu. Ini semua cuma kelihatannya saja program bunga-bunga, kayaknya *tuh* banyak kerja BKKBN, tapi cuma kerja *window dressing* saja, tidak benar *kok* di lapangannya. Bukan BKKBN tidak bekerja benar, tetapi kurang fokus. Bekerja biar sedikit tapi sukses, Pak. Daripada kerja banyak tapi *ngegerambyang*.

Itu yang saya minta sebagai masukan agar menjadi kontrol. Karena di daerah kami juga memang memaklumi bahwa Bapak tidak punya fungsi kontrol kepada Dinas Kependudukan, Dalduk atau apalah itu namanya di daerah. Ini menjadi catatan, sehingga lebih perhatikanlah kepada penyuluh-penyuluh KB, walaupun kami juga tidak tahu dari sisi kepegawaian apakah di bawah Bapak atautkah di bawah Pemda. Kalau ternyata di bawah Bapak, ini kan juga masalah lagi. Bagaimana jalan keluarnya? Lebih baik ini yang dipikirkan daripada kita mau berpikir muluk-muluk dengan pembentukan keluarga yang lain-lain bagaimana. Tugas utamanya saja yang kita ingin dan kita ingin dukung Bapak untuk berhasil.

Mungkin itu saja, Pimpinan.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih, Ibu Dewi.

Ibu Anggia.

**F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Baik, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ibu Anggia ada?

**F-PKB (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):**

Ibu Anggia di sini, sebelah kanan, jilbab merah sama kayak Mbak Yayuk.

Terima kasih, Pimpinan.

Teman-teman Komisi IX, Pak Hasto dan semua Pejabat di BKKBN yang saya hormati,

Pertama, tadi sudah ada beberapa teman-teman yang sudah mempertanyakan tentang *rebranding*. Sebenarnya pertanyaan saya sejauh mana, seefektif apa *sih rebranding* ini mampu mendongkrak BKKBN, kerja-kerja BKKBN. Namanya *branding* ini kan tidak hanya logo saya pikir ya, tetapi itu gerakan, itu apapun *lah*, gerakan secara massif, sehingga masyarakat tahu *value* yang diangkat oleh BKKBN ini bisa dipahami oleh masyarakat. Sejauh mana *sih* efektivitas *rebranding* yang sudah dibuat yang sudah setahun tadi dikerjakan ini? Apa *nih* jaminannya kalau ini efektif untuk mem-*booming*-kan kerja-kerja BKKBN? Ini sangat penting, karena kita perlu usaha-usaha. Usaha-usaha Bapak-bapak semuanya kan sudah.., saya tidak tahu ini sudah maksimal atau tidak, tetapi untuk mencoba untuk meng-*update*-kan apa yang sekarang dimaui oleh masyarakat. Itu pertama. Jadi apa ini jaminannya atau bagaimana kita bisa melihat bahwa *rebranding* yang sudah dilakukan ini efektif? Dan saya yakin tidak hanya logo *doang*. Ini yang perlu penjelasan lebih lanjut.

Kemudian yang kedua tentang survei. Kita banyak..., tadi Mbak Dewi sudah memberikan beberapa ulasan tentang survei, banyak sekali setiap departemen, setiap kelembagaan, setiap kementerian mempunyai survei-survei, segala macam survei. BPS punya, melakukan, departemen apa..., Kementerian Sosial melakukan, mungkin Kemenag juga melakukan. Bagaimana kalau ini dijadikan satu saja? Atau bisa tidak *sih* itu bareng-bareng, sehingga kita bisa efektif secara tenaga, efisien juga secara keuangan (*budget*)? Bisa tidak ini dijadikan satu? Tidak ada ego sektoral begitu, jadi hanya BPS melakukan ini ternyata besok KPU melakukan itu lagi, survei lagi, nanti BKKBN melakukan ini lagi? Jadi tidak satu-satu, tidak sendiri-sendiri, orangnya beda, budgetnya beda, waktunya beda, tetapi sebenarnya menanyakan hal yang hampir sama. Kalaupun *toh* tidak sama bisa dijadikan satu. Kira-kira bisa tidak begitu? Mestinya bisa ya, mestinya bisa. Jadi kalau kita bisa menyatukan saya pikir itu akan lebih baik. Karena survei ini menurut saya penting untuk melihat *landscape* kependudukan kita. Apapun *treatment* yang kita lakukan pasti berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat. Survei ini juga penting, tetapi bagaimana ini bisa dikerjasamakan dengan kelembagaan yang lain.

Yang lain adalah tentang Kampung KB. Kampung KB ini tadi lagi-lagi bagaimana caranya supaya lebih mem-*booming* lagi. Ada kemitraan, ada tidak hanya di kampung-kampung itu saja yang merasakan manfaatnya Kampung KB ini. Jadi BKKBN bersama dengan semua elemen masyarakat untuk mem-*booming*-kan Kampung KB ini, untuk membumikan. Tidak hanya *booming*, tetapi juga membumikan Kampung KB ini, sehingga masyarakat tahu manfaatnya secara maksimal tidak hanya yang di tempat-tempat yang memang sudah dideklarasikan sebagai Kampung KB. Dulu ketika kita punya program Keluarga Berencana yang sangat *booming* itu mereka punya safari yang tidak berhenti-berhenti. Jadi safari yang tidak berhenti untuk bagaimana kita bisa mempunyai.... Kalau dulu kan Keluarga Berencana itu ya keluarga kecil, sehat dan bahagia, sejahtera begitu kan. Kalau ini pakai trend baru, pakai *term* baru, ini bagaimana bisa lebih membumi, masyarakat paham betul yang namanya Kampung KB, kemudian juga merasakan yang namanya *civil*

*society* tadi bisa diberdayakan itu seperti apa dan *civil society* yang sebelah mana sebenarnya.

Saya pikir itu saja.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Ibu Anggi.

Berikutnya Pak Saleh Daulay, Ibu Sri Meliyana.

**F-GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Para Ketua dan Bapak/Ibu Teman-teman Anggota Komisi IX yang saya banggakan,  
Bapak Kepala BKKBN beserta Jajaran,

Kami hanya menambahkan saja yang telah dialami oleh teman-teman. Kami mencoba melihat di sandingan realisasi anggaran BKKBN di halaman 5 per program. Tahun 2017 penyerapannya 81,5. Tahun 2018 sepertinya pemerintah mau mem-*push* BKKBN dengan menaikkan anggaran 100% dari 2,7 menjadi 5,5 miliar, tapi apa daya penyerapanpun tetap rendah 4,298 triliun, 77,1%. Kemudian tahun 2019 anggaran turun lagi. Ini mungkin karena daya serap BKKBN yang memang rendah. Memang terlihat penyerapan 92,56%, tapi sesungguhnya angkanya lebih rendah daripada realisasi anggaran di tahun 2018. Di tahun 2020 anggaran juga sekitar 3,58 triliun.

Kalau lihat dari anggaran ini selama 3 tahun terakhir ini sepertinya BKKBN jalan di tempat, hanya melakukan program-program rutin yang tidak menghasilkan kejutan apa-apa dari BKKBN, sehingga tidak heran juga tidak banyak lagi yang tahu tentang BKKBN. Kalau dulu lagu-lagu KB itu populer, slogan-slogan KB itu populer, sekarang kami tidak melihat kondisi seperti itu lagi, terutama dalam 3 tahun terakhir ini. Hal-hal yang menjadi pekerjaan inti dari BKKBN masih sangat sulit tercapai. Kalau kita lihat pada halaman 7 sasaran dan capaian pembangunan bidang kependudukan dan KB semua masih rendah, kecuali meningkatnya penggunaan MKJP. Yang lain-lain sekitar 81% tingkat putus pakai kontrasepsi menurun, persentase pemakaian kontrasepsi menurun, angka kelahiran total..., ini pasti salah ya Pak, 15-49 tahun. Saya rasa untuk *fertility* tidak 49 tahun barangkali ya. Di halaman 7 itu tertulis di sini, Ibu Ning, angka kelahiran total (*total fertility rate*) per WOS 15 sampai 49 tahun. Mungkin salah ya, Pak, 49 tahun itu sudah pasti *fertil*, Pak.

Kemudian pada halaman 8 persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern yang tercapai hanya 19,43%. Target 70, yang tercapai 13,6. Kemudian pada halaman 11 jumlah lembaga diklat yang terakreditasi target 10 hanya tercapai 4, hanya 40%. Ini program-program rutin, program Tupoksi inti dari BKKBN dan semua masih dalam kondisi serapan yang

memprihatinkan, sehingga tidak ada satupun yang kita bisa bicarakan tentang KB pada hari ini kalau dikorelasikan dengan anggaran.

Kemudian jika beralih ke *branding*, ada *rebranding*, ada pendataan keluarga, ada indeks pembangunan keluarga, ada Kampung KB, untuk *rebranding* berapa anggaran *rebranding* ini? Dari mana anggarannya? Apakah sudah dialokasikan pada tahun 2019?

Kemudian ada makna biru berkelanjutan, gelap, terang, biru dongker dan lain-lain itu bagaimana cara membumikan yang kita cita-citakan ini? Melalui sosialisasi seperti apa? Kemudian logo berubah, maka semua urusan menjadi berubah. Papan nama berubah, stempel berubah, kertas-kertas kerja berubah. Berapa besar anggarannya untuk *rebranding*? Kemudian apa kira-kira implikasi dari *rebranding* ini dalam upaya peningkatan kinerja BKKBN? Kami belum melihat hubungan langsung antara *brand* tersebut dengan tugas-tugas yang ada di masing-masing Kedepuitan.

Kemudian pendataan keluarga. Sama seperti pandangan teman-teman, kita banyak *banget* badan-badan, departemen-departemen, kementerian-kementerian yang melakukan pendataan. Sejauh apa pendataan ini bermanfaat khusus untuk BKKBN dan berapa anggarannya, Pak? Karena itu mendata, mensensus, menyurvei, kami yakin itu membutuhkan dana yang besar.

Kemudian Kampung KB. Sama dengan yang tadi diceritakan teman-teman, Ibu Dewi tadi antara lain, Kampung KB hanya ada gapurnya saja. Saya coba bertanya ke teman-teman di daerah bagaimana dengan Kampung KB. Sama, ada gapurnya saja. Bahkan kami sudah tidak dapat kontrasepsi gratis, KB tidur tidak ada, bahkan di Dinas BKKBN-nya sendiri di daerah tidak banyak yang mereka lakukan. Apalagi kemudian kalau kita melihat ke Kampung KB-nya. Sejauh mana keberhasilan Kampung KB ini dan apa tolak ukurnya? Kita sebut berhasil apa tolak ukurnya? Kemudian pembiayaan terhadap Kampung KB ada dari pusat, ada dari daerah. Berapa besar dari pusat dan berapa besar kontribusi daerah untuk Kampung KB, sehingga yang kita sebut berhasil, berhasil, berhasil dan akan tercapai, akan tercapai, itu benar-benar kita dapat ukur secara seragam di seluruh Indonesia.

Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pendalaman yang lain. Karena ini materinya banyak sekali, kami cukupkan dulu sampai di situ,  
Terima kasih, Ketua.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Terima kasih, Ibu Meliyana.  
Selanjutnya Pak Alifuddin.

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,  
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.*

Yang terhormat Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi IX,  
Kepala BKKBN beserta Jajaran,

Nama saya Alifuddin dari Dapil Kalimantan Barat. Untuk periode sebelumnya tidak ada Anggota di Komisi IX dari Kalbar, Pak. Baru sekarang.

Untuk diketahui bahwa perbatasan Kalimantan Barat berada di 5 (lima) kabupaten: Sambas, Mangkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu. Ketahanan keluarga di wilayah perbatasan ini harus diberdayakan dan ditingkatkan, karena sebagian anggota keluarga bekerja di luar negeri. Jadi untuk itu perlu ditingkatkan ya, Pak. Karena daerah perbatasan ini penyuluhan-penyuluhan tentang BKKBN.

Yang berikutnya tentang penyuluh Keluarga Berencana. Karena luasnya wilayah Kalbar ya, Pak. Desanya itu ada 2.038 desa. Kalau idealnya satu desa 2 penyuluh, sementara data yang sekarang adalah 196 PNS dan 147 non-PNS, jadi sangat jauh ya. Jadi kalau memungkinkan perlunya ada penambahan penyuluh KB. Dan pendataan keluarga 2020 pun sebagaimana tadi Bapak ungkapkan masih kurang ya dari data KK yang ada di Kalbar ya. Kalau memungkinkan dalam perubahan perlu kita perjuangkan.

Yang kelima tentang situasi ya bidang BKKBN kekurangan SDM dan seterusnya, sarana dan prasarana untuk menggerakkan BKKBN Kalbar perlu kita tingkatkan.

Yang keenam, BKKBN Kalbar sudah melaksanakan pelayanan kependudukan KB dan pemberdayaan keluarga. Hindari aliran sungai dengan menggunakan kapal bandung, menyusuri Sungai Kapuas dengan menempuh sekitar 1.143 km dengan melibatkan berbagai mitra antara lain TNI, Polri, Kemenhan dan Dinkes. Jadi ini sudah berlangsung 4 tahun berturut-turut dan mendapat apresiasi yang sangat baik dari Pemda dan masyarakat di daerah aliran sungai yang tidak bisa diakses melalui jalan darat ya. Kegiatan ini perlu dipertahankan karena merupakan bukti bahwa negara hadir di manapun masyarakat berada. Selain itu kegiatan ini merupakan salah satu cara yang efektif bagi pemerintah menyampaikan pesan pembangunan kependudukan KB dan pembangunan keluarga serta program pembangunan sektor lainnya. Dengan demikian apakah mungkin BKKBN menyediakan kendaraan air untuk kegiatan pelayanan KB khusus di daerah aliran sungai yang tidak dapat dijangkau oleh mobil, unit penerangan dan pelayanan KB dengan dana APBN. Jadi selama ini bekerja sama dengan pemerintah daerah. Jadi perlu ditingkatkan, Pak. Jadi program-program penyuluhan di Kalbar yang perlu ditingkatkan, Pak.

Mungkin itu, karena ini masukan dari kami reses kemarin.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Alifuddin.  
Selanjutnya Pak Darul Siska.



**F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,  
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Ibu Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX yang saya hormati,  
Bapak Kepala BKKBN dan segenap Jajarannya.

Saya kira membina keluarga ini sesuatu yang mulia, membina keluarga itu kalau keluarga bagus seluruhnya masyarakatnya pasti bagus. Kalau masyarakatnya bagus pasti negaranya bagus. Oleh karena itu saya kira ini akar masalah yang sedang kita perbincangkan. Lagi-lagi saya ingin menambahkan beberapa saja yang belum dibicarakan oleh teman-teman. BKKBN sibuk dengan *rebranding* sementara komunikasi dan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat rupanya terlupakan dimana sekarang sudah mulai orang berbicara lagi banyak anak itu banyak rejeki dan itu yang dulu dicoba dijelaskan pada masyarakat bahwa mengendalikan keluarga itu bagian dari upaya mensejahterakan keluarga. Saya kira itu sudah lupa dilakukan oleh BKKBN untuk berkoordinasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dalam rangka kaitannya mensosialisasikan program KB. Barangkali sibuk dengan *rebranding*, sementara tugas utamanya jadi terlupakan. Itu yang pertama.

Yang kedua soal pendataan keluarga. Saya kira saya ingin menguatkan pendataan keluarga ini sesuatu yang serius. Apalagi kalau cuma sebagian mau pakai sensus, sebagian mau pakai survei, saya ingin memberikan catatan kalau bisa pendataan keluarga ini ditunda, karena yang pertama anggarannya juga tidak cukup. Percuma kalau sebagian disensus sebagian disurvei, datanya juga tidak akan akurat kita dapat untuk seluruh Indonesia. Oleh karena itu sebaiknya saya beri saran kepada Pimpinan, kita minta pemerintah melakukan sensus yang terpadu untuk semua kegiatan yang terkait dengan kehidupan bangsa kita. Sekarang kan kita tahu Kementerian Sosial buat pendataan, BPS buat pendataan, kemudian instansi apalagi buat pendataan, sehingga kita dalam menetapkan BPJS saja jadi kacau kita karena pendataan yang berbagai itu. Saya kira ini tolong diperbincangkan agak serius soal pendataan keluarga ini. Kalau saya memberi catatan kalau bisa kalau anggarannya tidak cukup, hanya sebagian mau pakai survei, sebagian mau pakai sensus, sebaiknya *pending* dulu, sehingga memang sensusnya betul-betul dilakukan secara lengkap, bukan melalui survei sebagian besar.

Kemudian mengenai IPK. Saya kira ini ide yang bagus untuk mengklasifikasi keluarga, mana yang dianggap sejahtera... Tetapi ini barangkali perlu juga koordinasi dengan kementerian lain. Kementerian lain itu juga punya berbagai stratifikasi keluarga, ada yang keluarga miskin, keluarga pra miskin, keluarga sejahtera, keluarga pra sejahtera. Sekarang muncul lagi istilah yang dimunculkan oleh BKKBN pendekatannya, ada pendekatan tenteram, ada mandiri, ada bahagia, saya kira ini juga perlu penjelasan lebih lanjut kepada kita. Ini kaitannya dengan ditengah-tengah masyarakat nanti bingung mana yang pendekatan BKKBN, mana yang pendekatan istilah-istilah lain yang sekarang sudah ditengah-tengah masyarakat sangat akrab begitu. Dan itu jadi standar juga untuk memberikan

atau meluncurkan salah satu program pemerintah ditengah-tengah masyarakat kita.

Ini mengenai kampung KB. Saya kira ini kan program yang diluncurkan oleh Pak Jokowi. Kalau memang serius mau ditekuni, maka ini harus segera ada Inpres atau ada Perpres yang kalau boleh saya mengusulkan BKKBN tidak usah menyebut nama Keluarga Berencananya. Sebutlah nama lain tapi bisa mengintegrasikan semua program di desa itu kalau memang ini mau dijadikan program yang serius. Kalau masih pakai nama KB, KB itu Keluarga... BKKBN kan tidak punya kaki tangan sampai ke kabupaten/kota dan tidak punya orang-orang sampai ke kecamatan dan desa, padahal Kampung KB ini ada di desa-desa. Ini kan soal. Oleh karena itu Inpres itu harusnya menegaskan namanya tidak perlu Kampung KB, entah kampung apa atau desa apa atau kota apa, tapi memang *leading sector*-nya BKKBN yang mengorganisir kegiatan di situ. Barangkali itu akan lebih efektif ketimbang menggunakan kata KB, sementara intervensi dari instansi lain tidak bisa masuk. Oleh karena itu Bapak-bapak kami mohon, paling tidak saya mohon data desa yang Bapak ada Kampung KB-nya, sehingga kalau kami reses kami ingin lihat seperti apa *sih* Kampung KB yang ada di daerah pemilihan kami, betul tidak sebagaimana yang kita harapkan. Kalau tidak nanti kan ada *feedback* kepada Bapak-bapak. Di Dapil kami Kampung KB cuma ada ini dan ini, yang itunya tidak ada, yang ininya belum ada, sehingga yang dibutuhkan di Kampung KB ini umpamanya ini ada infrastruktur kecil umpamanya. Ini barangkali nanti bisa diberikan kepada kami data Kampung KB yang Bapak-bapak punya kepada kita, sehingga kita di Dapil kita bisa mengecek seperti apa Kampung KB yang diceritakan di dalam rapat ini.

Kemudian ada desa stunting. Bapak tidak menyajikan kepada kita data tahun 2019, padahal kita sudah masuk 2020. Sebetulnya kan BKKBN itu yang saya tahu, saya dulu pernah di BKKBN, sangat canggih soal pendataan itu. Masak data 2019 sekarang kita tidak punya. Kemudian info tentang Kampung KB itu agar diberi kepada kita, Pak.

Yang terakhir adalah soal percontohan Kampung KB yang belum di mana. Kan di kabupaten/kota kita ada 514, yang baru tersedia 470 sekian. Yang belum itu di kabupaten dan kota mana yang belum ada percontohan Kampung KB-nya, sehingga kita bisa lihat ini Dapil siapa, supaya kita dorong-dorong juga kalau memang ini kita anggap kemitraan yang sejajar dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita.

Soal anggaran tadi oleh Ibu Meli sudah dikupas tuntas. Yang terakhir saya titip pesan, Pak. Banyak sekali kader-kader Bapak di bawah, baik PPKBD, sub PPKBD, kader-kader yang sudah mengabdikan dan juga PLKB yang honorer sampai hari ini barangkali itu perlu dipikirkan nasib mereka, sudah mengabdikan sekian puluh tahun mensukseskan program BKKBN, tapi hari ini nasib mereka tidak jelas. Barangkali ini perlu dipikirkan oleh Bapak didata dan apa yang harus dilakukan, sehingga mereka tetap loyal menjadi kaki tangannya BKKBN ditengah-tengah masyarakat di desa dan kelurahan.

Saya kira itu, Ibu Ketua. Saya tidak mau berpanjang-panjang, takut kemalaman nanti.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Darul.  
Selanjutnya Pak Imam Suroso, silakan.

**F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos., S.H., M.M.):**

Terima kasih, Ketua.

Ibu Yayuk dan Teman-teman Komisi IX,  
Yang saya hormati Pak Kepala BKKBN dr. Hasto dan Jajarannya,

*Assalaamu' alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,

Paparannya tadi menurut saya cukup baik *lah*, singkat, padat. Saya tertarik apa yang dipaparkan dr. Hasto tadi menyatakan bahwa BKKBN 2020 ini ada *tagline* Habis Gelap Terbitlah Terang, betul ya, Pak. Menurut saya itu bagus. Di 2020 nanti akan saya lihat dan teman-teman Komisi lihat lebih gelap sebelum dr. Hasto atau terang. Kalau lihat *tagline*-nya harusnya terang, betul ya? Dan saya yakin optimis mampu *lah*, karena dr. Hasto termasuk spesialis obgyn sekaligus bupati. Artinya strategi untuk pengendalian penduduk *is ok*. Betul ya, Pak Hasto? Betul tidak ini? Kalau tidak betul tidak saya lanjut ini, anggaran dikurangi malah. Tapi perlu kita bela *lah*, karena sejak dulu saya penggemar BKKBN. Karena Negara bisa bubar kalau BKKBN-nya tidak jelas.

Pak Hasto, jadi di dalam proporsal *panjenengan* itu di *slide* 56 BKKBN menyatakan telah membentuk 946 Kampung KB di desa stunting. Menurut saya bagus saja ya, karena pengembangan itu. Pertanyaannya bagaimana upaya konkret BKKBN dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi terlebih bagi remaja? Kalau kemarin kan digelorakan itu Kampung KB sosialisasi *bla bla bla*. Ini nanti dr. Hasto lebih semangat ditambah strategi apa atau bagaimana? Kemudian tentang kaitannya keluarga berencana dan kesehatan reproduksi untuk remaja. Dulu ada genre dan apa. Apakah ada terobosan baru? Ini dr. Hasto kan terkenal terobosan *nih*, sama dengan dr. Terawan. Nanti tolong saya dijelaskan.

Kemudian yg kedua, saat ini prevelensi stunting Indonesia turun dari angka 2018 ya 30,8% turun menjadi 27,67% di tahun 2019. Artinya anak buah Pak Hasto ini bagus, karena ada turun. Dibantu DPR RI sosialisasi kemarin bagus, turun. Dengan adanya dr. Hasto yang baru ini di 2020 nanti tolong dijelaskan targetnya turun berapa atau malah dinaikkan. Harusnya *sih* turun, karena kemarin-kemarin turun. Lalu nanti strateginya apa untuk menekan angka prevalensi stunting?

Kemudian yang ketiga tolong dijelaskan BKKBN daerah mana saja di Indonesia yang menjadi sasaran program pemerintah untuk menekan stunting pada 2020. Mana saja itu yang perlu. Ini Presiden Jokowi kan stunting-stunting. Untuk ibu hamil, anak, ini kan ada kematian masih agak lumayan. Tolong strategi-strategi apa yang dr. Hasto nanti mainkan.

Kemudian yang keempat, yang terakhir ini, BKKBN menyatakan bahwa salah satu rencana arah kebijakan BKKBN di 2020 sampai 2024 adalah meningkatkan advokasi pergerakan program KKBPk sesuai dengan segmen sasaran dan karakteristik wilayah. Khusus terkait dengan peningkatan kinerja penyuluhan keluarga berencana atau PLKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana), nanti mohon dijelaskan BKKBN homornya itu berapa, fasilitasnya apa saja. Karena saya di Dapil, teman-teman komisi di Dapil itu kayaknya kasihan itu keluhannya, gajinya ada yang Rp100.000,-, Rp150.000,-. Artinya itu kan jauh. Padahal kunci kesuksesan keluarga berencana adalah petugas lapangan keluarga berencana. Itu nanti tolong dijelaskan juga.

Kemudian kaitannya PLKB itu kan yang mempunyai mayoritas itu kan para bupati/walikota di daerah. Di sini Pak Kepala BKKBN kan mantan bupati. Pertanyaannya bisakah BKKBN... Sekarang kan mereka sudah langsung *nih*, langsung pusat BKKBN. Dulu kan milik kabupaten. Bisakah walaupun kita ini terpusat, vertikal BKKBN, bisakah menggerakkan para bupati? Karena rakyat itu kan miliknya bupati/walikota, betul ya. Bisakah digerakkan membantu maksimum termasuk petugas-petugas lapangan seperti itu? Kalau bisa strategi apa kurang lebih Pak Hasto memainkan? Menurut saya *sih* Pak Hasto harus kerjasama dengan Pak Tjahjo, Menteri Dalam Negeri. Karena bosnya gubernur, bupati, walikota adalah... Bukan Pak Tjahjo. Dulu Pak Tjahjo, sekarang Pak Tito Karnavian, Jenderal Polisi itu. Nanti jelaskan bisakah Bapak bekerja sama. Kalau bisa menurut saya *is ok, the best*, kata Ibu Ning.

Sementara itu saja. Ini sebenarnya masih banyak. Tapi itu saja dulu *lah*. Tadi sudah banyak teman-teman.

Terima kasih, Ketua. Terima kasih, dr. Hasto.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

#### **KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam*, Pak Imam.

Terima kasih.

Selanjutnya Ibu Sri Kustina.

#### **F-NASDEM (Hj. SRI KUSTINA):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Yang terhormat Ibu/Bapak Ketua, Wakil beserta Anggota Komisi IX DPR RI,  
Yang terhormat Bapak Kepala BKKBN beserta Jajarannya,

Saya akan menyampaikan satu pertanyaan dan satu lagi menyampaikan aspirasi dari Dapil saya. Pada halaman 49 tentang Kampung KB, Kampung KB sebagai episentrum program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga. Pertanyaannya apakah selama terbentuknya Kampung KB sampai dengan saat ini telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh BKKBN? Bagaimana langkah BKKBN dalam

memperbaiki kekurangan yang masih menjadi persoalan di Kampung KB itu sendiri?

Nomor dua, ini menyampaikan aspirasi waktu kemarin saya reses. Saya dari Dapil II Sumatera Selatan, saya kemarin berkunjung ke Kabupaten Pali, Penukal Abab Lematang Ilir Dapil II Sumatera Selatan. Mereka menyampaikan bahwa mereka masih kekurangan tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana yang mana kabupaten ini terdiri dari 71 desa dan kelurahan dengan hanya PLKB fungsional pusat hanya 3 orang saja, Pak. Apakah bisa pegawai daerah yang belum fungsional sebanyak 5 orang yang diberdayakan sebagai petugas lapangan keluarga berencana diusulkan menjadi pegawai PLKB fungsional pusat. Juga permohonan penambahan PLKB fungsional di pusat, di Dapil terutama di kabupaten yang sudah saya kunjungi reses ini. Kabupaten ini sudah saya awasi, saya turun ke lapangan. Kampung KB-nya dari tahun 2016 itu mengalami peningkatan sampai dengan 2017 sebanyak 15 Kampung KB. Mereka PLKB-nya dibantu oleh 61 tenaga PLKB non PNS. Lalu kemajuannya yaitu tahun 2016 peserta KB-nya meningkat dr 65% menjadi 85% dr 47.000 pasangan usia suburnya. Juga bagaimana minta dipikirkan masalah PLKB yang non PNS ini seperti apa yang akan kita balikkan untuk hasil kerja mereka, pengabdian mereka selama ini.

Mungkin itu saja.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik. Terima kasih, Ibu Kustina.  
Selanjutnya Pak Yahya.

**F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Mohon maaf, Ibu Ketua, Pimpinan, ada konsultasi dari Sekretariat ini.

Bapak Kepala BKKBN beserta Jajaran yang saya hormati,

Ada beberapa hal yang ingin saya perdalam. Pertama soal *branding* tadi. Saya tidak ingin membandingkan BKKBN zaman *now* dengan zaman *old*, karena itu paradigmanya berbeda. Di zaman orde baru saya kira pendekatan pembangunan kita kan sentralistik, semua dari pusat, sehingga sangat mudah untuk membuat program sampai ke ujung tombak di tingkat desa. Sekarang zaman era otonomi daerah. Bapak-bapak di BKKBN tidak punya kekuatan untuk melakukan *influence* kepada...

**KETUA RAPAT:**

Izin, Pak Yahya. Sebentar.  
Waktunya saya tambah sampai jam berapa? Jam 17.00? Jam 17.00 ya? Baik.

**(RAPAT: SETUJU)**

Silakan.

**F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Terima kasih, Pimpinan.

Sehingga punya keterbatasan-keterbatasan.

Yang kedua, kalau dulu program BKKBN itu menjadi unggulan, Pak. Sekarang kan tidak menjadi unggulan. Jadi juga sangat berpengaruh terhadap daya dorong dalam menyusun anggaran maupun program. Terkait dengan *branding*, kenapa dulu misalnya logo dan *tagline* Dua Anak Cukup, karena tujuannya adalah untuk menekan angka pertumbuhan jumlah penduduk, mengurangi jumlah penduduk *lah* kira-kira begitu, sehingga logo dan *tagline*-nya itu sama, selalu ada gambar ibu, bapak dan dua orang, baik yang gambarnya sederhana maupun yang sudah dimodifikasi. Karena itu tujuannya jelas, Pak. Kalau sekarang misalnya kita akan melakukan *rebranding* karena pangsa pasarnya sudah berubah, 80 juta milenial dan kelompoknya, maka tentu *tagline* dan logonya juga tidak mengubah tujuannya yang utama, Pak. Misalnya tadi Terencana Keren, itu tidak ada tujuannya, Pak. Memang keren, karena itu populer. Tapi kan tidak sesuai dengan tujuannya. Orang kampung saya tidak kenal keren itu, Pak. Itu bahasa orang Jakarta. Mungkin dia anak muda, betul, kira-kira begitu.

Tujuan keluarga itu apa? Tujuan membina keluarga itu adalah bahagia, dalam bahasa agamanya *sakinah, mawaddah, warahmah* (damai, tenteram, penuh cinta dan kasih sayang). Diantara kita yang paling menikmati itu adalah Gus Nabel, Pak. Itu ukurannya jelas itu, keluarga bahagia. Kalaupun mau diubah menurut saya itu jangan 'sehat' Pak, 'Dua Anak Bahagia'. Itu maknanya dalam, Pak. Sebab kalau sehat belum tentu bahagia, betul ya? Itu kalau mau diubah. Jadi tujuannya jelas. Dulu 'Dua Anak Cukup' karena memang untuk mengurangi jumlah penduduk, menekan angka pertumbuhan kelahiran. Sekarang kalau dianggap misalnya jumlah pertumbuhannya sudah cukup terkendali, maka tujuannya harus ditonjolkan apa itu bahagia. Saya sarankan kalau mau diubah *tagline*-nya 'Dua Anak Bahagia'. Itu saran saya, Pak. Jadi ada landasan filosofinya, ada *goal*-nya, Pak. Tapi kalau keren, itu tidak ada tujuannya. Populer, tapi tidak ada tujuannya, tidak ada hakekatnya, kira-kira begitu.

Dari segi tahapan-tahapannya saya kira sudah dilakukan, karena ini kan menggunakan teori marketing ya saya kira. Saya kira sudah jamak *lah* terjadi. Bagaimana cara melakukan *branding* suatu produk, itu sudah ada teorinya. Sudah di mana-mana itu, saya kira tahapannya sudah betul. Ini yang dipertanyakan teman-teman tadi adalah tingkat akselerasinya, Pak. Karena masih banyak pekerjaannya. Kenapa ini setahun baru *branding*? Memang targetnya sampai tahun 2022, betul ya Pak? Ya, jadi memang ini mungkin yang perlu dipercepat, sehingga nanti penganggarannya di DPR bisa sejalan, Pak. Kebetulan kami di Panitia Anggaran, di Banggar, sehingga bisa mengikuti. Kalau kami sarankan tidak perlu distop, Pak. Diteruskan saja, karena sudah menjadi bagian dari program periode sebelumnya, tahun sebelumnya. Kalau distop nanti sayang anggarannya sudah mulai jalan. Jadi bagaimana supaya ada akselerasi saja dalam melakukan *rebranding* ini,

sehingga tujuan akhirnya bisa tercapai. Artinya ada perubahan *mindset* di masyarakat dan anak-anak muda yang notabene akan menjadi generasi baru ini benar-benar kenal terhadap logo, nama dan program-program BKKBN diikuti dengan baik, kan itu kira-kira tujuannya. Saya kira mungkin ini yang pertama.

Yang kedua mengenai IPK, Pak. Di dunia ini ada *benchmark* soal indeks pembangunan manusia. Saya kira itu kan sudah menjadi *benchmark* internasional, Pak. Apa ukurannya? Indeks per kapita tingkat melek huruf, kan begitu, kemudian usia harapan hidup. Ketika ini dicanangkan oleh UNDP pasti ini sudah dilakukan uji coba di beberapa negara, Pak. Tidak mungkin bisa diberlakukan semua negara sebelum dilakukan uji coba di beberapa negara, sehingga sudah menjadi valid, kira-kira begitu. Ukuran-ukurannya pun juga saya kira bisa diukur, misalnya per kapita, ini bisa diukur. Kemudian angka melek huruf, orang lama bersekolah, bisa diukur. Kemudian usia harapan hidup, bisa diukur. Tapi kalau IPK yang dicanangkan oleh Bapak-bapak ini kan susah diukur itu, Pak. Kalau tingkat kemandirian, mungkin ketenteraman masih bisa diraba, Pak. Tapi yang namanya tingkat kebahagiaan susah itu, karena menyangkut aspek batiniah. Belum tentu orang yang keluarganya berkecukupan bisa dikatakan bahagia karena di dalam keluarga tersebut terjadi percekocokan, anaknya kena narkoba, ibu dan bapaknya sering pulang malam misalnya sehingga sampai di rumah waktunya hanya sebentar. Jadi memang sangat sulit untuk mengukur tingkat kebahagiaan. Jadi terlalu berambisi menurut saya ini Bapak-bapak di BKKBN ini. Jadi saya sarankan sebelum ini dicanangkan tolong dikaji lebih mendalam lagi dengan melibatkan ahli-ahli yang pakar di bidangnya, terutama dari kalangan pakar psikologi dan ahli agama, Pak. Karena tidak cukup kalau hanya ahli kesehatan, tidak cukup. Mengukur tingkat kebahagiaan itu sangat sulit itu. Jadi menurut saya itu, Pak. Padahal di sini disebutkan bahwa tujuan daripada pendataan keluarga itu adalah IPK ujungnya, betul ya Pak salah satunya? Jadi ini menurut saya perlu didalami sebelum diluncurkan, terutama terkait dengan parameter... Tadi saya melihat sepintas kayaknya belum sesuai menurut saya itu cara mengukur tingkat kebahagiaan itu.

Berikutnya soal pendataan. Tadi juga sudah banyak disinggung bahwa salah satu kelemahan pemerintah adalah konsolidasi data memang. Banyak dilakukan pendataan oleh departemen, tapi juga banyak data yang tidak valid. Ini menjadi PR kita di Komisi IX. Sudah berulang-ulang saya kira. Sementara ada kewajiban secara konvensional dari BKKBN. Karena setiap 5 tahun pasti ada data baru, betul ya, Pak? Tahun 2015 ada data keluarga. Sekarang sudah tahun 2020 juga harus dilakukan pendataan baru. Persoalannya adalah cukup tidak anggaran, kan itu saja. Kalau kita berbicara anggaran, maka mungkin yang perlu diperhatikan adalah soal fokusnya saja. Di mana letak perbedaannya antara data yang dilakukan oleh BPS, sensus umum... Tadi Bapak mengatakan di sana makro, ini mikro. Mikro tapi lebih detail mestinya, kan begitu. Sementara juga ada data dari Departemen Sosial, Pak. Perlu diingat tahun 2015 Kementerian Sosial itu melakukan validasi dan verifikasi data penduduk miskin, Pak. Angkanya kalau tidak salah sekitar 300 miliar-400 miliar, Pak. Tapi hasilnya juga tidak valid. Banyak data orang miskin yang tidak miskin, sementara orang-orang yang miskin tidak dimasukkan sebagai data orang miskin. Di mana letak kesalahannya? Di faktor orang melakukan survey, karena diserahkan kepada kepala desa. Oleh

karena itu maka tahapan-tahapan dari pendataan ini menjadi sangat penting, mulai dari persiapan, pelatihan, kemudian metode surveinya seperti apa, teknik pengolahan datanya seperti apa. Kalau dana tidak cukup lalu menggabungkan antara sensus dan *sample* memang agak susah. Karena sensus itu kan satu-persatu, kan begitu, dan itu dananya pasti besar dan yang melakukan itu biasanya BPS karena didukung dengan dana yang besar. Sementara kalau survey itu kan pakai *sample*. Memang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, karena ada *margin of error*, tergantung dari berapa besar data atau responden yang dipakai, sehingga bisa diprediksi tingkat errornya berapa. Ini sudah jamak dilakukan di Pilkada, partai politik maupun Pilpres. Jadi menurut saya karena dananya terbatas, misalnya di sini disebutkan antara semula 658 miliar, di sini di presentasinya salah ini, juta di sini, di halaman 28 tertulis salah, jadi saya kira yang dimaksud adalah 658 miliar. Yang tersedia cuma 246 miliar, sedangkan kekurangannya 411. Ini harus dicarikan solusi ini, apakah satu kali anggaran atau dua kali. Ini juga perlu kita bicarakan nanti. Tetapi yang paling penting adalah 246 ini kalau hanya diperuntukkan untuk 6 provinsi rasanya terlalu kecil ini, Pak. Karena anggarannya semula 658, kekurangannya 411, yang ada sekarang ini hanya 6 provinsi, padahal jangkauannya mestinya kan 34 provinsi, kan begitu. Betul ya, Pak Eros? Saya tidak salah ya cara menafsirkannya begitu? Dan pemilihan provinsinya mungkin ada pertimbangan tersendiri ini, ada *unmeet need*, kemudian privalensi perkawinan, macam-macam. Tetapi pengambilan *sample* 6 provinsi ini apakah memang sudah bisa menjamin proyeksinya tingkat paling tidak standar depan, Pak. Ini berbeda dengan tingkat kepadatan penduduk, kan begitu. Kalau kepadatan penduduk kan Jawa, kemudian di provinsi-provinsi besar di luar Jawa, kan begitu. Tapi ini mungkin punya pertimbangan sendiri dengan dua kategori tadi. Menurut saya adalah bagaimana mengefektifkan dana yang ada. Kalau bisa jangan hanya 6 provinsi supaya sisanya tidak terlalu besar nanti. Karena ini sudah direncanakan, sudah dianggarkan, menurut saya tetap dilanjutkan, tetapi supaya efisien fokus saja data yang ditargetkan itu seperti apa. Kalau terlalu luas akan menjadi besar, sehingga nanti bisa 2-3 tahun ke depan. Ini yang juga sangat berpengaruh terhadap kualitas data yang dihasilkan. Kalau survei dilakukan tidak waktu yang bersamaan secara serentak, variabelnya pasti akan berbeda. Betul ya, Pak? Akan berbeda, karena pertumbuhan masyarakat juga berubah. Jadi varian-variannya itu di lapangan akan sangat berubah. Tolong dipertimbangkan ini. Kalau misalnya tidak memungkinkan dilakukan sensus ya survei saja, tapi disampaikan secara terbuka. Kan survei juga dijamin validitasnya dengan tingkat *margin error*-nya yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi itu menurut saya mungkin tolong dipertimbangkan *lah* antara kebutuhan dengan ketersediaan dana. Kalau dananya cukup sensus saja, tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau dananya terbatas ya mungkin dipertimbangkan. Jadi kalau menggunakan dua pendekatan, dua metode, mungkin nanti agak susah bagaimana cara menjamin kualitas datanya. Satu ada yang disensus, satu ada yang disurvei. Bayangan saya semula pertama sensus, yang kedua survei, kan mubazir juga, terhadap daerah yang sama, kan begitu. Karena sensus lebih akurat dibandingkan survei, betul ya? Kira-kira begitu.

Saya kira itu dari saya. Jadi harapan-harapan saja dan usulan-usulan. Saya yakin Pak Hasto dan teman-teman akan mampu membuat yang lebih



baik dibanding dengan masa-masa sebelumnya dengan dukungan penuh dari teman-teman Komisi IX.

Demikian, terima kasih.

*Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalaam.*

Terima kasih, Pak Yahya.  
Pak Haruna, silakan.

**F-PKB (H. HARUNA, M.A., M.B.A.):**

Sedikit ini, Ibu,

*Bismillaahirrahmaanirahiim,*

Yang kami hormati Ibu Ketua dan Teman-teman,  
Bapak Kepala BKKBN dan Deputi,

*Asslaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Saya ini sedikit, Pak.

Pertama, mereferensi pertanyaan dari Ibu Wenny dan Ibu Dewi Asmara yang menyatakan apa fungsi Kampung KB yang notabene jumlahnya 15.585, ini survei di lapangan. Kalau saya survei di rumah sakit, ada program apa paling menarik. Buat klinik di setiap rumah sakit. Biayanya rendah, fungsinya banyak dan dinikmati oleh banyak masyarakat. Di Makassar itu yang rumah sakit punya klinik dari dulu Pak Kepala yang lama rata-rata rumah sakit Makassar punya Klinik KB. Siang gratis, jam kerja gratis, malam rumah sakit dapat *profit*. Jadi dua-duanya untung, Pak. Dari KB juga dapat tempat gratis, AC gratis, ruangan gratis. Itu pada siang hari, Pak. Pada malam hari rumah sakit yang dapat *profit*. Jadi dua-duanya diuntungkan. Nanti ada komplain, Pak. Ini berjalan bagus sekali dan ramai sekali dan dinikmati sekali. Banyak sekalinya, Pak. Saya kira kita kerja sama saja dengan rumah sakit minta ruangan. Kalau saya kasih 6 kali 18 meter rumah sakit saya. Adapun yang lain saya lihat 4 kali 6 itu sudah maksimal pelayanan gratisnya. Jadi jam kerja itu orang BKKBN yang ditempatkan pada siang hari dan jam kerja, tapi pada malam hari itu orang rumah sakit untuk cari *profit* dan laku juga, Pak. Jadi dua-duanya diuntungkan. Bapak tidak perlu buat lagi sarana, karena sarana ini sudah luar biasa, ada AC-nya, ada apanya itu rumah sakit. Rumah sakitnya saya ulangi lagi dapat juga *profit*.

Saya kira itu sekedar apakah sudah ada anggaran seperti itu. Saya kira teman-teman paling *support*. Kan ini akurat sekali hasilnya, Pak. Saya kira itu untuk Pak Hasto dan Deputi. Sekian.

*Wallaahul Muwafiq Illa Aqwamith Thoriq,*

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Haruna.  
Ibu Netti, silakan.

**F-PKS (Dr. Hj., NETTY PRASETIYANI, M.Si.):**

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,*  
*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Teman-teman Komisi IX yang saya cintai,  
Kepala BKKBN, Dr. Hasto, beserta seluruh Jajaran yang juga saya hormati,

Sudah banyak disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya ingin menanyakan beberapa hal yang memang menurut saya ini fundamental, Pak. Sebetulnya tadi Pak Yahya sempat menggarisbawahi tentang indikator keluarga seperti apa yang harus kita bangun. Justru saya ingin menanyakan sejauhmana upaya BKKBN untuk melakukan *family main streaming*? Jadi bagaimana kiya mengutamakan keluarga sebagai terminologi yang harus ada di setiap kementerian/lembaga yang memang terkait untuk bersama-sama memformulasikan program yang ujung-ujungnya semuanya keluarga itu ya tadi, entah keluarganya sejahtera, bahagia, berkualitas dan sebagainya. Kenapa? Karena kalau saya pikir kalau kita bicara keluarga pasti kita semua meyakini kita semua adalah orang yang setinggi-tingginya kita berkarir, sejauh-jauhnya kita bepergian, pasti kita ingin segera kembali ke keluarga. Bagi saya keluarga adalah dermaga untuk menambatkan harapan hidup, kan seperti itu. Jadi kalau tadi boleh saya tambahkan kalau kita bicara tentang klasifikasi keluarga boleh jadi masih banyak keluarga-keluarga Indonesia itu yang kemudian tipenya itu seperti kuburan, tidak ada komunikasi, sepi, begitu kan, atau kemudian tipe keluarga seperti pasar yang jotos-jotosan, yang tawar-menawar saya dapat apa, saya untung apa, saya rugi dan lain sebagainya, atau mungkin tipe keluarga yang lebih baik lagi, tipe keluarga seperti sekolah, semuanya mau belajar, semuanya mau mengikuti aturan dan sebagainya. Ini kan penying untuk diarus utamakan kepada kementerian dan lembaga yang lain. Saya ingin kemudian bertanya kira-kira strategi apa sudah Bapak lakukan? Karena jangan sampai yang namanya BKKBN ini kemudian dipersepsi sebagai sebuah badan yang kemudian ujung-ujungnya berapa banyak metode kontrasepsi jangka panjang sudah digunakan oleh masyarakat, berapa banyak alat kontrasepsi sudah terdistribusikan. Bukan hanya itu. Bahwa kemudian seorang anak diasuh, dibesarkan, dilindungi, itu juga menjadi *core*, menjadi *main duty* dari BKKBN, seperti itu. Oleh karena itu menurut saya ini penting untuk mulai dipikirkan. *Family main streaming*, terminologi keluarga itu kan tadi banyak, Kementerian Sosial ada keluarga, Kementerian Agama juga ada keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga ada keluarga. Bagaimana kemudian yang namanya terminologi keluarga itu bisa masuk ke semua sektor. Jangan

kemudian jadi ego sektor dari *ah* keluarga itu kalau di BKKBN ya bagi-bagi kontrasepsi, kemudian bagaimana menekan *total fertility rate*. Kan bukan cuma itu. Itu yang pertama, Pak. Jadi jangan sampai kemudian kita selalu mengatakan bahwa peraturan kelahiran bisa kita lakukan, pendewasaan usia perkawinan juga bisa kita sosialisasikan, pembinaan ketahanan keluarga juga mulai kita lakukan dan sebagainya. Tapi kita kemudian menjadi puas sendiri, sementara yang lain itu tidak tahu ternyata sepenting ini terminologi keluarga itu. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua saya juga ingin menyoro tentang IPK, Pak. IPK ini meskipun baru diujicobakan di 10 provinsi, tapi kan hasilnya..., saya tidak tahu ya ini bagus atau tidak, kalau di sini ada dosen, di sini ada Pak Eddy, ada Ibu Kurniasih ya, kalau kemudian hasilnya 39,74 sampai 54,24, kalau dirata-ratakan 49,9, ini sebetulnya masih jelek begitu kan, Pak. Tidak tahu kalau dibuat huruf ini hurufnya apa, hurufnya b atau c, kan begitu ya. Ini yang menurut saya seharusnya sudah ada langkah-langkah antisipatif, apakah kemudian ketika kita mendapati IPK yang tadi diujicobakan di 10 provinsi, apalagi 10 provinsi ini mewakili Indonesia Timur, mewakili Indonesia Barat, mewakili provinsi dengan jumlah penduduk yang besar seperti Jawa Barat, yang pasti permasalahannya sangat kompleks, kira-kira strategi apa yg sudah disiapkan oleh BKKBN untuk mengantisipasi gambaran IPK ini? Kenapa? Karena IPK ini luar biasa. Kalau kita lihat IPK ini indikatornya dimensinya ada kemandirian, ketenteraman, kebahagiaan, ini luar biasa ini kalau keluarga kita memenuhi tiga dimensi ini luar biasa ya, Ibu. Tidak ada korupsi, tidak ada penyimpangan seksual, tidak ada kejahatan seksual, seperti itu kan. Itu kan yang kita harapkan, Pak. Bayangkan kalau kita dapat laporan seorang ibu membunuh adik angkatnya karena cemburu melihat adik angkatnya melakukan hubungan seksual dengan anaknya yang sudah terbiasa *incest* dengan ibunya. Ini potret keluarga seperti apa ini kalau kejadiannya seperti begini? Ini yang menurut saya IPK ini perlu terus dikaji, didalami dan kemudian dibincangkan dengan kementerian/lembaga yang lainnya, Pak. Kenapa? Karena ini dimensinya luar biasa. Bukan hanya menjadi *core*, menjadi kepentingan BKKBN, tapi juga K/L yang lainnya. Sehingga kalau menurut saya ini harus segera dilakukan duduk bersama, Pak. Ada anak yang berusia sekolah tapi tidak bersekolah, itu kan juga masuk di salah satu dimensi itu. Berarti kan kita harus melibatkan atau menggandeng kementerian yang lain. Jadi langkah antisipatif, termasuk rekomendasi dari hasil 10 provinsi ini sudah dilakukan apa? Rekomendasinya apakah sudah mulai didistribusikan ke kementerian/lembaga yang lainnya untuk bisa bersama-sama memperbaiki dimensi ini dan pada gilirannya pada saat kita ukur lagi lebih baik begitu ya.

Terakhir, ketika kita bicara, "Kamu tidak bisa", tadi sudah banyak diulas oleh Ibu Dewi dan juga teman-teman. Saya hanya ingin mengingatkan masyarakat kita itu masyarakat yang sangat apa ya, kalau saya pengalaman 10 tahun itu mereka termotivasi, bersemangat ketika ada lomba, ada penghargaan, ada status terbaik, ada status ini dan itu, bahkan sesuatu yang tidak substantif pun dimunculkan. Jadi kalau Ibu/Bapak pernah jadi tim penilai atau tim monitoring kan begitu ya, yang atraksi seninya, yang macam-macamnya yang sebetulnya tidak berorientasi langsung pada substansi yang ingin kita nilai. Tapi itulah masyarakat kita. Kadang apa yang kita lihat itu tak seindah warna aslinya kan, Pak. Oleh karena itu saya teringat pada saat

kemudian dicanangkannya Kampung KB itu luar biasa gegap gempita, sampai Pak Jokowi itu pernah datang ke Cirebon untuk mencanangkan Kampung KB, tidak tahu siapa yang pernah datang waktu itu, sampai ramainya luar biasa, bagi-bagi sepedanya, kan begitu ya. Tapi yang penting bagi kita adalah bagaimana menjaga sustainabilitas dari apa sih program dari Kampung KB itu, apa sih yang baru dari Kampung KB itu, apa yang kemudian harus direvitalisasi. Karena bagi saya ketika kemudian programnya itu-itu saja tentu saja masyarakat juga tidak akan bergerak lebih cepat. Kalau menurut bahasa manajemen *you can not sale your yesterday's product to today's consumer*. Kan tidak bisa kita menjual barang kemarin ke pembeli hari ini. Jadi harus *re-packaging*, harus ada strategi untuk kemudian menjadikan Kampung KB ini betul-betul menjual.

Terakhir sedikit saja, pendataan ini, tadi sudah banyak sekali, apa sih yang baru? Apa sih yang beda? Apa diferensiasi pendataan yang dilakukan ini? Kenapa? Karena kalau saya melihat kebiasaan kader, baik kader posyandu, kader dasawisma, kader-kader kita yang lain, ini sudah biasa buat data seperti ini, biasa membuat pendataan-pendataan kegiatan keluarga, betul tidak? Siapa yang hamil, siapa yang hamil dengan anemia, yang punya remaja, pakai KB-nya apa dan sebagainya. Kira-kira apa diferensiasi, apa yang baru, apa yang membedakan dan itulah yang sebetulnya yang harus kita kejar. Jadi jangan bicara biaya dulu, tapi kemudian apa yang kemudian menjadi diferensiasi dari pendataan yang dilakukan oleh BKKBN yang tidak dimiliki oleh BPS dan sebagainya yang itu kemudian menjadi salah satu *trigger* bagi kemajuan bangsa ini ke depan.

Demikian yang bisa saya sampaikan.

*Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,  
Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Pak Fadholi silakan, Pak.

**F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

1 menit saja cukup, Ketua.

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Bapak/Ibu Pimpinan yang saya hormati,  
Bapak/Ibu Anggota yang saya hormati,  
Bapak Kepala BKKBN yang saya hormati,

Ini satu pertanyaan yang saya akan tanya kepada BKKBN. Ini tidak perlu dijawab tapi perlu ditindaklanjuti. Yang pertama, Bapak tahu bahwa mitra kita adalah Komisi IX. Tapi apakah Bapak sudah tahu nama-nama Komisi IX dan di mana Dapilnya? Ini penting untuk bisa diketahui oleh BKKBN. Karena ini nanti akan menjadi mitra Bapak di wilayahnya masing-

masing. Jadi kalau ini sampai ada BKKBN tidak tahu, saya dari Dapil mana kan Bapak tidak tahu, ini harus, sebagai mitra harus tahu.

Kemudian yang kedua saya mau tanya, sebentar lagi kan kita reses. Kita mau datang ke Kampung KB saya harus berbicara apa? Apa yang harus saya sosialisasikan dari program Bapak yang riil? Ini saja. Nanti sebentar lagi kita akan reses. Bagaimana kita akan ikut mensosialisasikan program Bapak kalau kita tidak tahu program yang riil. Jadi kalau hal-hal yang tadi sudah banyak dibahas oleh para pendahulu kita, tapi saya akan tanyakan..., dari pendahulu saya maksud saya, yang bicara duluan, sekarang ini coba Bapak sampaikan program riil yang bisa kita berikan dan bisa kita sampaikan ke masyarakat, baik Kampung KB ataupun yang mau kita ajak KB dan lain sebagainya, riilnya apa. Jadi ini tolong disampaikan dengan jelas. Program-program yang ini kan tadi Bapak sudah menjadi satu perencanaan. Saya pikir Bapak tinggal meyakinkan saja bahwa apa yang sudah direncanakan ini Bapak bisa laksanakan. Tinggal meyakinkan saja kepada kami. Tetapi yang kami perlukan adalah hanya itu. Jadi kalau nanti saya di Kampung KB ditanya alat kontrasepsi saja tidak tahu kan saya susah juga, kan begitu. Apalagi ada yang minta, "Pak, bantulah bagaimana caranya alat kontrasepsi", kalau kita tidak punya kan susah juga. Jadi saya minta ada satu program riil dari Bapak yang bisa nanti kita bantu di wilayah Dapil masing-masing untuk bisa kita segera selesaikan. Ini menjadi satu bagian yang sangat penting untuk bisa direalisasi agar bukan sekedar... Tetapi kalau yang kaitannya dengan kebijakan-kebijakan mungkin kita bisa jawab apa yang menjadi satu kebijakan. Tetapi Bapak perlu ketahui bahwa DPR ini kan dipilih oleh masyarakat. Dia itu pokoknya tanyanya bukan sekedar tanya, tetapi juga usul seperti yang banyak tadi diusulkan. Bisa tidak kita menambah tenaga penyuluh? Bagaimana dengan nasib tenaga penyuluh yang ada? Karena semua sekarang urusannya sudah disentralisasi di atas. Ini persoalannya harus dijawab dengan jelas. Kami akan undang Bapak ke Dapil saya untuk bisa saya kumpulkan semua penyuluh yang ada di wilayah Dapil saya. Nanti bisa didengarkan bersama-sama keluhan mereka. Jadi bukan semata-mata dari kami. Nanti Bapak bisa dengarkan. Bapak bisa langsung datang apa yang sekarang dialami, bagaimana mensejahterakan, membuat satu Kampung KB yang bagus. Sebab berbicara masalah Kampung KB kan bukan sekedar seperti apa tadi, kan ada rasa bahagia. Kalau yang mau dimakan saja sudah susah. Mau hiburan yang lain juga tidak ada. Makanya hiburannya ya itu saja, kan begitu. 3 menit, Pak Ketua. Ini saya minta tolong rencanakan yang konkret saja, Pak. Ada yang perlu kita bahas di sini, tetapi juga ada yang perlu kita jelaskan di Dapil untuk bisa memperkuat ini. Saya yakin Bapak-bapak mantan bupati kan tahu apa yang kita mau begitu ya. Pakai Coca Cola saja, kutahu yang kau mau.

Terima kasih.

*Wassalaamu;alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam.*

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

Kawan-kawam Komisi IX telah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Langsung saja nanti Pimpinan kalau mau, sela-sela saja. Saya berikan kesempatan ke...

**INTERUPSI F-PD (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):**

Izin, Pimpinan. Saya 1 menit saja.

**KETUA RAPAT:**

1 menit ya, Pak.

**F-PD (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):**

Ya, kalau tidak *ngomong* tidak ini.

Saya beri masukan kepada sahabatku ini. Jadi saya Dapil Jambi. Pak Agus ini dulu sering sama-sama saya waktu di Dapil Jambi.

Di Jambi itu ada Suku Anak Dalam. Saya ada mengangkat anak Suku Anak Dalam itu, orang hutan, "Kenapa kamu punya anak hanya dua?" "Kami susah hidup, Rajo", katanya, dia bilang begitu. "Jadi bagaimana caranya kamu ini?" "Kalau kami, istri kami habis lahir sekarang, tahun depan baru bisa tidur dengan istri lagi", itu kata dia.

Kedua, "Suami kamu bagaimana?" "Suami saya ada makan jamu, jamu ramuan." Jamu dalam hutan itu. "Bagaimana, berapa lama tahannya?" "Itu paling lama 1 minggu", katanya. Jadi tidak kepingin sama sekali tidur dengan istri. Untuk mengetes itu kita coba saja, yang laki-laki di dalam gedung ini nanti saya bawa ramuannya. Ini bukan main-main, betul-betul itulah yang dilakukannya. Jadi tahannya jamu itu habis minum satu gelas katanya itu 1 minggu tidak ada berpikir kepada istrinya.

**KETUA RAPAT:**

Sudah 3 menit *loh*, Pak.

**F-PD (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):**

Jadi ini bukan main-main, ini benar-benar. Akhir bulan ini saya 6 orang saya bina lagi, saya khitanan 6 orang.

**F-... (.....):**

Berapa istri yang dibina?

**F-PD (Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD):**

Tidak, itu kan Suku Anak Dalam.

Saya membina Suku Anak Dalam itu. Jadi saya tanya, ini ada kebenarannya juga. Jadi dari kita pusing-pusing menghabiskan uang miliaran, itu saja, jamu orang kubu itu saja kita minta.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sudah, Pak?

Baik, langsung saja Pak Hasto, silakan.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Ya, baik.

Terima kasih atas masukan dan beberapa pertanyaan.

Yang pertama, tadi disampaikan oleh Ibu Wenny dari...

**KETUA RAPAT:**

Izin, Pak Hasto.

Mungkin langsung umum, dalam arti tidak usah orang per orang. Tapi kalau pertanyaannya ini langsung saja.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Ya, baik.

Jadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin juga hampir sama. Salah satunya yang kami terima di sini adalah bagaimana relevansi dengan katakanlah generasi yang lama, kemudian generasi yang sekarang, kemudian sekarang perlu ada *rebranding*. Memang kalau kita lihat sasaran Keluarga Berencana itu dulu dan sekarang sarasannya adalah pasangan usia subur. Jadi orangnya juga orang muda. Hanya memang di era sekarang dengan era *disruption* ini tentu perubahan sejak generasi milenial itu sangat berubah sama sekali, sehingga cara berkomunikasi sangat berbeda, cara untuk pendidikannya juga sangat berbeda. Oleh karena itu *mindset*-nya juga berbeda. Sehingga kami mendahului dengan survey namanya *Formative research* tadi dengan harapan memang menangkap apa yang menjadi ide dari mereka dan apa yang mengena di hati mereka.

Perlu kami sampaikan bahwa kalau tadi disampaikan bahwa kita sudah 1 tahun *rebranding*, tetapi kami mohon izin bahwa saya di BKKBN mulai Juli, kemudian kami melihat *rebranding*-nya memang belum mulai, sehingga kami bekerja untuk *rebranding* ini praktis 5 bulan terakhir. Mulai dari *formative research* itu kami kerjakan di bulan Agustus. Kemudian 1 bulan *formative research* baru hasil *formative research* itulah dipakai sebagai dasar untuk lomba, sehingga lomba juga memakan waktu 3 bulan. Ini kami mohon izin bahwa memang waktunya kami merasakan mulai dari Agustus sampai di Desember itu melakukan *rebranding*.

Kemudian yang berikutnya yaitu tentang apakah kalau seandainya nanti misalkan tidak menggembar-gemborkan atau menggaungkan tentang dua anak cukup, apakah tidak membahayakan bagi ledakan penduduk? Kami memang belajar dari transisi demografi itu selama Pak Haryono Suyono memimpin dari tahun 1970 sampai tahun 1995 itu penurunannya sangat drastis yaitu dari TFR itu 5,6 menjadi 2,6. Itu luar biasa, dalam waktu 25 tahun turunnya luar biasa. Kemudian setelah era reformasi maka TFR ini stagnan,

dari 2,6 itu berhenti sampai tahun 2012 itu tetap 2,6, sehingga tahun 2012 sampai 2017 baru turun menjadi 2,4. Jadi penurunan seperti itu. Tetapi memang tidak ada kenaikan. Ini yang menarik juga, fenomena yang menarik. Sesuai dengan teori transisi demografi bahwa teori pertama penurunan gratis, kemudian transisi tahap kedua itu akan stagnan, sehingga pemerintah tugasnya itu menjaga, kemudian transisi yang ketiga itu mengkhawatirkan karena bisa terjadi *zero growth* seperti di Jepang dan di Singapura. Oleh karena itu memang kami mengamati ini juga bahwa sekarang ini tahapannya adalah bukan transisi yang tahap pertama, tapi tahap yang kedua, sehingga kita tetap harus menahan, tetapi memang tidak seperti yang di transisi tahap pertama. Karena kemarin juga sudah kita lihat dari waktu ke waktu.

Yang berikutnya tadi ada yang sangat penting kalau menurut saya bahwa capaian-capaian program di tahun 2019 itu merah semua. Saya akui iya. Bahkan saya bilang kepada teman-teman, saya hadir di BKKBN ini saya mendapat raport merah. Tahun yang paling pahit, karena semua raportnya merah. Kemudian setelah saya introspektif, saya pelajari, yang namanya Alkon itu stok *out*. Yang namanya susuk itu banyak peminatnya, tapi di mana-mana tidak ada, di seluruh Indonesia tidak ada. Yang namanya ring itu tidak ada. Ring itu untuk steril, itu tidak ada. Saya ke NTB tidak ada, kemana-mana tidak ada. Saya tanya ke Ibu Deputy, "Ibu Deputy, apakah ring itu tidak diadakan?" "Sudah 5 tahun tidak diadakan dan bahkan belum pernah punya pengalaman mengadakan." BKKBN itu tidak punya pengalaman katalog sektoral, hanya katalog nasional ikut Kemenkes, sehingga lama prosedurnya. Sehingga kami dalam waktu yang singkat itu mengejar katalog sektoral supaya BKKBN punya katalog sektoral. *Alhamdulillah* dalam waktu 3 bulan bisa berhasil katalog sektoral. Saya bolak-balik ke LKPP dan akhirnya berhasil, sehingga bisa menyerap sampai 92 miliar itu. Karena apa? Itu komponen Alkonnya..., 92% maksud saya, itu komponen Alkonnya sendiri hampir 400 miliar. Kalau kami tidak membuat katalog sektoral jelas kita tidak akan bisa menyerap itu. Sehingga *Alhamdulillah* di awal tahun 2020 ini susuk terpenuhi, ring juga tadi terpenuhi, bisa kita pasang ring dan susuk. Kami tinggal mengusahakan yang lebih mudah yaitu kondom, kemudian pil. Pil itu butuh namanya *progesteron only pill* yang untuk pasca persalinan. Tapi dulu kan tidak pernah ada itu. Sehingga orang yang melahirkan sebanyak 5,2 juta setahun tidak pernah dapat KB pill, KB-nya cuma ditawarkan mau susuk atau IUD. Kalau orang habis melahirkan kan sering tidak mau juga ditawarkan itu. Tapi coba kalau kita bawai pil saja untuk 3 bulan dulu. Dan pilnya itu kan punya efek samping yang positif, bisa air susunya tambah banyak, kemudian juga dia aneminya berkurang karena *progesteron only pill*. Inilah yang kemudian kita lakukan terobosan di *quick win* tadi dalam rangka untuk mengatasi kondisi seperti itu supaya kita tersedia dengan baik alat-alat kontrasepsi dan BKKBN berani *dong* melakukan katalog sektoral, provinsi masing-masing buat sendiri-sendiri begitu, kemudian aturannya sama, harganya sudah ada. Inilah yang kemudian mohon maaf seandainya di 2019 itu obat-obat baru tersedia di akhir tahun, kemudian capaian-capaiannya merah semua. Saya bukan menjanjikan, tapi *Insy Allah* di tahun 2020 ini mestinya harus lebih baik.

Kemudian yang juga penting kami jawab yang masih terkait dengan...



**INTERUPSI F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Izin, Pak. Interupsi.

**KETUA RAPAT:**

Silakan dulu, Ibu Dewi.

**F-PG (Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.):**

Melalui Pimpinan, kami interupsi, Pak.

Itu kan 2019 ya yang katalog sektoral? Mengenai 2020 kami minta informasi, karena sepengetahuan kami Kemenkes itu ingin melakukan katalog nasional, sementara Bapak sektoral. Itu jadi bagaimana? Apa tidak nanti terlambat lagi? Karena kan yang Bapak bicara 2019, sementara 2020 mungkin kan masih baru mengundang. Jangan-jangan juga belum proses tender dan sebagainya. Kami ingin penjelasan apakah 2020 Bapak ikut e-katalog sektoral, sementara Kemenkes e-katalog nasional. Mohon penjelasan.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Terima kasih, Ibu Dewi.

Jadi kami memang mempertahankan katalog sektoral bagi pengadaan Alkon dan juga alat-alat yang lainnya yang belum tertulis di dalam katalognya Kementerian Kesehatan. Namun demikian kalau Kementerian Kesehatan itu berubah menjadi katalog nasional dan nanti kalau itu menjadi lama, maka kami akan menarik juga untuk semua pengadaan yang BKKBN di katalog sektoralkan. Karena waktunya sangat tidak mengejar. Ini pengalaman sedikit, jadi ketika masyarakat kami di Kulon Progo itu dapat vaksin tahun 2017, vaksin HPV, harus divaksin lagi paling telat November kemarin itu tidak tervaksin. Karena apa? Karena pengadaannya telat. Jadi kalau sektoral saja telat, nasional lebih telat. Itu sudah hal yang otomatis, logis *lah*.

Saya diskusi dengan LKPP, beliau kalau harus mengakomodir nomenklatur semua barang dan alat berat tak sanggup, karena semua kementerian akan keroyok LKPP semua. Jadi saya kira sulit sekali itu. Oleh karena itu kami mem-*back up*, dengan kata lain mem-*back up*.

**KETUA RAPAT:**

Ya betul, betul, betul. Setuju ya, Ibu?

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Itu logika saja dan pengalaman, memang pengalaman begitu.

**F-PG (EMANUEL MALKIADES LAKA LENA):**

Ini penjelasan Pak Hasto yang paling ditunggu-tunggu ini.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Iya, karena korbannya sudah banyak, korban untuk *delayed*, kami merasakan.

**KETUA RAPAT:**

Interupsi, Pak Hasto.

Ada satu hal tadi yang perlu saya sampaikan terkait dengan Alkon. Kemarin kan dicanangkan KB mandiri ya, Pak. Itu justru menurut saya menghambat untuk berjalannya pelaksanaan Keluarga Berencana. Oleh karena itu menurut saya sediakan sajarah Alkon ini secara gratis kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Karena masyarakat kemarin ketika kita tanya, "Kenapa tidak KB?" "Sekarang mahal, bayar sendiri." Karena pernah dicanangkan KB mandiri. Menurut saya lebih baik saya usul sudah, masyarakat yang mau KB silakan, yang penting Bapak sudah punya perencanaan bagaimana untuk menahan lajunya pertumbuhan tadi.

Terima kasih, lanjut.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Terima kasih, Ibu.

Jadi kami punya semangat yang sama bahwa kami sekarang siap alat kontrasepsi, kami itu harus mengantar ini dengan gratis, harus gratis itu kalau menurut saya. Hanya sekarang hambatannya satu, ada di BPJS. Jadi ketika alat kontrasepsi itu kami berikan gratis kan Permenkesnya membunyikan bahwa yang harus diberi gratis adalah yang anggota BPJS. Kalau tidak anggota BPJS maka tidak bisa gratis. Kemudian BPK kalau mengecek kemudian mengecek apakah alat kontrasepsi ini diberikan sesuai kuperuntukannya atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan Permen maka dianggap tidak sesuai keperluan, sehingga saya sangat menunggu-nunggu adanya perubahan yang besar di BPJS ini, sehingga kami ini mudah. Kami sebelum BPJS ini berubah...

**INTERUPSI F-PG (EMANUEL MALKIADES LAKA LENA):**

Sebentar, Pak Hasto. Itu di Permen yang mana itu, Pak? Di Permen yang mana? Permen BPJS ya?

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Permenkes, di Permenkes. Jadi pengaturan di Permenkes, bukan BPJS. Jadi aturan untuk akseptor-akseptor dari BKKBN itu aturan-aturannya diatur di dalam Permenkes, diantaranya dan menyulitkan kami seperti kalau mau tubektomi harus jumlah anak kali umur harus lebih dari 100, sehingga kalau anaknya dua umurnya 39 tidak bisa ditubektomi. Padahal 39 sudah

*high risk*, sudah risiko tinggi. Kan banyak Permen ini betul-betul hanya mengikuti apa yang diinginkan BPJS, sehingga akhirnya kemudian kami mengalami kesulitan di lapangan.

**F-PG (EMANUEL MALKIADES LAKA LENA):**

Pak Hasto, nanti tolong Permennya itu dikasih ke kami, nanti biar kita *ngomong* sama Menkes ya.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

*Njeh, njeh*, siap, kami nanti akan sampaikan.

Terima kasih.

Jadi saya kira itu yang memang kami alami di lapangan. Kemudian kami menyiapkan beberapa strategi atau inovasi untuk supaya kami bisa memberikan obat gratis. Yang pertama saya sudah kolaborasi dengan PKBI. PKBI itu ada 31 klinik dan di seluruh Indonesia. Kemudian saya ingin mengedrop obat-obat ke PKBI dan PKBI punya dana untuk jasa medis tanpa menunggu BPJS. Ini kan bagus, karena dia punya dana dari CSR dari luar. Kemudian kami juga ingin..., PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia). PKBI, LSM. Mohon maaf Pak. Jadi PKBI, bukan PK ya. Oleh karena itu tadi kalau kami diusulkan untuk rumah sakit itu punya klinik yang kemudian siangnya itu sangat menguntungkan, malamnya juga menguntungkan, kami sangat nyambung karena kami sudah memutuskan untuk di tahun 2020 kami akan menggaungkan kembali PKBRS. dulu kan ada PKBRS ini adalah program Keluarga Berencana Rumah Sakit, kemudian rumah sakit itu dilombakan, ada namanya PERSI Award itu, sekarang itu nggak ada sehingga laporan cakupan kontrasepsi dari rumah sakit tuh jadi tidak melaporkan sekarang ini dan Rumah Sakit banyak stok out untuk alat kontrasepsi tetapi kita kelebihan alat kontrasepsi. ini kan terjadi ironis, padahal kalau seandainya bisa menggratiskan maka kamilah yang akan mengedrop alat kontrasepsi. Jadi makanya kami senang sekali kalau seandainya kami didukung untuk PKBRS dan PKBRS ini Program Keluarga Berencana Rumah Sakit fokus kepada pasca persalinan juga karena ada 5,2 juta orang melahirkan kalau semua itu pulang dibawai alat kontrasepsi minimal pil sudah luar biasa, sudah luar biasa karena memudahkan mereka.

**KETUA RAPAT:**

Interupsi, Pak.

Pilnya tadi itu sama dengan pil KB biasa itu atau khusus untuk ibu yang menyusui?

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Ya ini pilnya khusus untuk ibu yang menyusui. Jadi pil namanya progesteron only pill adalah untuk menyusui dan manfaatnya memang air susu tetap lancar, kemudian perdarahannya lebih cepat berhenti, sehingga tidak anemia ya dan beberapa tahun BBKKBN nggak punya maka tahun ini kami minta untuk mengadakan itu juga saya minta untuk mengerjakan suntik

yang sekali suntik untuk tiga bulan tapi tetap menstruasi ya. Kemarin, dulu kan masyarakat banyak yang menolak kalau tidak menstruasi tetapi sekarang kita minta untuk bikin yang kemudian bisa menstruasi. ini beberapa hal yang mungkin menjadi apa ya terobosan agar angka-angka yang merah tadi bisa membaik.

Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,

Kami terima kasih sekali atas masukan tentang penyusunan indeks pembangunan keluarga dan juga pendataan keluarga. kami punya pemikiran yang sama sebetulnya bahwa kalau saya ditanya saya sampaikan ke teman-teman di BKKBN ini Pak Deputi, Bu Deputi kalau saya ditanya yang paling membuat saya stress di BKKBN ini apa. Saya jawab adalah pendataan keluarga dan pembuatan indek pembangunan keluarga karena tanggung jawabnya berat sekali karena ini harus validitasnya tinggi karena benchmarkingnya belum ada ya sehingga ini harus kita bikin sendiri, kita cicipi sendiri, kita puji sendiri ya, kalau hasilnya jelek kan kita pasti dipukuli sendiri ya karena memang harus dipertanggungjawabkan sendiri. kami sangat menyadari itu, makanya ketika tadi ini kan sebetulnya ada enam provinsi kemudian yang ini, yang enam provinsi ini sensus, kemudian tapi yang 28 provinsi yang lainnya ini juga dilakukan tetapi dalam bentuk survei karena uangnya tidak cukup begitu. yang enam provinsi sensus semua didatangi, yang 28 kita survei. kita didampingi BPS supaya validitasnya baik nah kami berharap ini kan sama dengan survei di dalam 34 provinsi tapi yang enam itu dipertebal dengan sensus sehingga harapan saya validitasnya cukup tinggi. Harapan saya begitu. Namun demikian kita ini kan cita-citanya membuat indeks pembangunan keluarga untuk ukuran mikro bisa menilai keluarga. kalau indeks pembangunan manusia itu hanya untuk mengukur wilayah atau kabupaten atau provinsi, di sini IPM nya sekian tapi rumah tangga kan ndak pernah ditentukan IPM nya tapi kalau ini kan rumah tangganya bisa dipotret dengan indeks pembangunan keluarga.

Makanya sebetulnya kami sangat penuh harap kalau seandainya ini bisa pendata semua maka lahirlah indek pembangunan keluarga. saya sendiri sebetulnya kalau tidak bisa mendaftarkan semua dan tidak bisa melahirkan indeks pembangunan keluarga. kalau menurut saya ayo kita diskusi lagi itu untuk berpikir ulang tentang hal ini begitu karena bagi saya penting ini tetapi saya mohon bahwa ini itu dianggap penting itu penting kalau menurut saya. Karena apa, untuk mengintervensi suatu perubahan masyarakat itu unit cost, unit analysis terkecilnya adalah keluarga. Kalau seandainya kita bisa mendiagnosis di tingkat keluarga kemudian kita bisa memberikan rekomendasi di masing-masing keluarga sebetulnya luar biasa dan belum pernah dilakukan. itulah bedanya mungkin kalau kita dibandingkan dengan kementerian dan lembaga yang lain karena kementerian dan lembaga yang lain sebagian adalah data makro, memotret wilayah sebagian adalah motret khusus kemiskinan. Desil 1, Desil 2, Desil 3 sampai D10 misal b itu. kemudian Desil 5, 1 sampai 5 diberikan treatment tetapi kami ini kan ingin mendiagnosis ditingkat keluarga bapak ya sehingga kepentingannya di situ itu sebetulnya. tapi kalau itu teman-teman tidak merasa wah ini tidak penting begitu, ya kita diskusi kalau memang ini dianggap tidak penting tapi bangsa kita belum pernah memotret keluarga untuk mengurai permasalahannya di dalam

keluarga dan ada rekomendasi di tingkat keluarga yang dulu hanya masalah kemiskinannya saja tetapi masalah sosial yang lainnya, masalah rumah tangganya tidak terprotret dengan baik sehingga perceraian yang tinggi pun tidak, tidak bisa dicari solusi ya.

Itu saya kira. kami tentu bukan lembaga yang kemudian dalam bahasa Jawanya *ngotot* begitu. Tapi tidak ya, tapi kami justru di kesempatan ini. Kami senang sekali mendapatkan masukan-masukan tentang bagaimana pentingnya pendataan keluarga kemudian indeks pembangunan keluarga. kalau indeks tadi sebetulnya di luar ekspektasi saya. rata-ratanya hasil uji cobanya cuman 49 saya bilang ini kalau saya bikin kurva 0-100 maka kurvanya masih condong ke kiri sehingga memang ini adalah kurva yang menunjukkan bahwa kita masih sangat terbelakang. sebetulnya kalau saya punya pendekatan sebagai proksimasinya adalah IPM (Indeks Pembangunan Manusia) makanya indeks pembangunan keluarga ini kan dari 6, 53 variabel kemudian dikelompokkan menjadi tiga variabel kemudian dilakukan oleh para Profesor melalui penentuan determining faktor dari masing-masing variabel itu. kemudian akhirnya ketemulah ada 17 variabel. Namun demikian sekali lagi kami sangat terbuka sekali untuk menyikapi ini ya.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Hasto itu dari indeks, indeks pembangunan keluarga itu kan ada salah satu variabelnya adalah legalitas keluarga, legalitas keluarga ya. Legalitas keluarga itu kan maksudnya apakah resmi secara administratif atau tidak lalu langkah-langkah apa yang dilakukan ketika di dalam keluarga itu misalnya nikahnya nikah siri, kan masih banyak kan nikah siri seperti itu. Lalu apa-apa ada langkah yang akan dilakukan dalam rangka untuk menuju pembangunan keluarga atau hanya sekedar untuk mencari tahu tentang kondisi-kondisi keluarga tersebut.

Terima kasih.

#### **KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Terima kasih, Ibu.

Jadi memang ketika kita mendapatkan data ini kemudian tadi banyak pertanyaan dan masukan untuk kolaborasi dengan kementerian dan lembaga yang lain itu saya kira satu hal yang penting, kunci yang penting bagi kami dan kami catat betul itu karena apa, kami ini bisa membuat raport tetapi hasil raport ini yang akan menyelesaikan adalah Kementerian Lembaga yang terkait sehingga ketika kami bisa membuat raport dan kami bisa menyebutkan *by name, by address* bawah ini ada yang nikahnya hanya nikah siri, alamatnya di sini, kemudian data nama dan penduduknya jelas, maka data itulah yang kami berikan kepada Kementerian lembaga terkait, misal Kementerian Agama.

Seperti kami sudah memulai juga ini sambil apa, melakukan uji apa uji coba ini, kami koordinasi dengan Kalimantan Barat. Coba dipotret itu yang ada di perbatasan kan ada 135.000 orang bekerja di Kelapa Sawit itu 135.000 itu kan orang Indonesia yang kerja di pedalaman sana. Berapa murid SD di satu rayon murid, SD nya 2.000 ya itu baru satu rayon. Terus ternyata ada

yang tidak kawin tapi anaknya yang lima anaknya empat karena apa, datang ke sana tidak ada layanan untuk nikah lagi di dalam itu.

Kemudian juga tidak ada layanan kontrasepsi, maka kami dalam waktu dekat ini juga melayani itu dan sekaligus kami mengambil permasalahan ini kemudian akan kami sampaikan ke Kementerian Agama juga karena memang saya juga prihatin di ada ribuan 135.000 orang tinggal di perkebunan kelapa sawit yang ada di Kalimantan Barat dan kemudian hari tadi pagi sarapan dengan Pak Konjen Kucing saya tanggal 26 nanti saya ke sana, tanggal 16 kami ke sana. Itu contoh saja Ibu bahwa sebetulnya ketika kita bisa memotret keluarga maka banyak yang bisa kita berikan kepada Kementerian dan Lembaga yang lain dan kami terima kasih sekali karena memang kami harus, harus selalu berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga yang lain untuk menyampaikan hasil-hasil ini dan untuk minta masukan- masukan agar tidak terjadi over lap tadi.

**INTERUPSI F-PG (Drs. H. DARUL SISKKA):**

Interupsi Ibu Ketua, boleh?

Pak Kepala BKKBN, saya mau klarifikasi karena di sini sebut metodenya ada kombinasi sensus dan sampel. Kalau sampel itu kan tidak setiap keluarga yang didata, artinya hanya beberapa keluarga dalam satu desa begitu loh. Ini kan sampel. Sampel kan akurasi kita ragukan. Tapi penjelasan Pak Kepala tadi bukan sampel, tapi ada yang *direct* didatangi, ada yang melalui data smartphone dikirim. Mana yang betul, Pak?

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Terima kasih, Bapak.

Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa yang 28 ini sampling, tapi samplingnya yang menghitung adalah ahlinya dalam hal ini BPS, supaya random samplingnya betul-betul validitasnya cukup. Kemudian yang 6 provinsi itu sensus, sehingga antara yang disensus dan sampling ini yang 6 provinsi itu sudah seperti disampling. Tapi kan lebih valid karena disensus, sehingga harapan saya kolaborasi semua wilayah ini tadi tetap hasilnya itu bisa lebih valid, karena memang BPS yang juga yang memberikan masukan ini ya, Bapak.

**INTERUPSI F-PG (Drs. H. DARUL SISKKA):**

Ibu Ketua, lagi Ibu Ketua. Ibu Ketua, izin ya.

Pak, Datanya akurat tidak? Nanti Bapak punya data akurat tidak seluruh keluarga Indonesia? Bapak punya datanya tidak dari hasil pendataan keluarga ini?

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Ya, dari 2015 BKKBN sudah punya, sejak dulu kita punya memang data keluarga itu hanya butuh di update dan sekarang update, jadi kami punya basic data, iya dan tadi bapak mohon izin yang apa, 40-60 karena

yang 40% itu kan orangnya masih di desa-desa, yang di kampung-kampung, yang belum dengan smartphone sehingga kami masih memfasilitasi yang masih di desa-desa, di kampung-kampung itu, kami fasilitasi melalui Balai Penyuluh di kecamatan begitu begitu bapak sehingga mereka datang ke Balai penyuluh Kecamatan bawa data kemudian dari Balai Penyuluh itu baru pakai IT, dikirim begitu. Kemudian yang lainnya memang yang 60% kebetulan sudah bisa dengan smartphone ya. Jadi saya kira itu jadi yang 60-40 bukan atas dasar pertimbangan statistik, tetapi pertimbangannya adalah karena keadaan di lapangan. Ya, mohon izin.

**KETUA RAPAT:**

Kita tambah dulu ya waktunya, sudah Jam 17.00. Kita tambah sampai 17.30.

**(RAPAT: SETUJU)**

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Ya, baik. Kemudian kami sampaikan juga hal yang terkait dengan tadi disampaikan di beberapa Dapil itu PJB itu sangat kurang jumlahnya dan penyuluh Keluarga Berencana tuh di mana-mana kurang. dulu di masa sebelum tahun 2000 itu jumlahnya hampir 35.000 penyuluh KB itu sehingga cukup perbandingannya 1 banding 3 desa paling banyak dulu itu. sekarang rata-rata 1:6 sampai 7 Desa bahkan saya ke Manado kemarin ada yang 1 sampai 16 desa padahal itu pulau-pulau jadi sulitnya setengah mati. saya ke Maluku Utara juga ada yang satu itu menampung 21 Desa padahal pulau-pulau, sulitnya setelah mati sehingga kami hari ini punya penyuluh yang dulu 35.000 tinggal 14.000 lebih sedikit kemudian penyuluh Non-PNS nya 9.977 dan itu digaji oleh Bapak Bupati Walikota Kepala Daerah setempat sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing ya yang gajinya ada yang sudah besar ada yang masih kecil meskipun saya dua bulan yang lalu sudah menyurati beliau untuk supaya gaji ini disesuaikan dengan UMR setempat. Kemudian kami minta namanya diseragamkan namanya PLKB dengan tujuan kalau kami berjuang P3K yang setara dengan PNS itu maka nama-nama di daerah ini sudah, sudah seragam itu. saya repot sekali nanti kalau seandainya namanya di sana bukan PLKB namanya penyuluh apa, petugas honorer apa. kalau mau dimasukkan ke P3K bisa nggak masuk begitu makanya kami mohon juga melalui forum ini mungkin di daerahnya di Dapilnya juga bisa disamakan namanya PLKB sehingga kalau nanti perjuangan kami bisa dikabulkan menambah PKP non PNS ini bisa masuk ke sana dan ini menjadi masalah yang kedua.

**F-GERINDRA (Ir. SRI MELIYANA):**

Izin, Ibu Ketua.

Pak, tadi berhubung ada pertanyaan dari Dapil saya kan tenaga PLKB PNS-nya cuma 3 yang dibantu oleh tenaga PLKB yang ditugaskan dari Dinas lain ke Dinas BKKBN KB tadi. Bagaimana mereka bertanya? Apakah mereka bisa minta untuk diangkat menjadi tenaga PLKB Pusat yang lima tadi? Jadi tenaga PLKB pusat bisa menjadi delapan di Dapil itu, Pak.

Terima kasih.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Terima kasih, Ibu.

Mohon izin, iya. Jadi beberapa kali kami sudah memproses itu Ibu jadi namanya pindah antar instansi sehingga oleh karena itu meskipun prosesnya memakan waktu tetapi bisa jadi ditempuh bisa maka kami, sebetulnya kami senang Ibu karena kami mendapatkan tenaga baru dan tidak perlu rekrutmen yang penting orangnya itu apa ya bagus gitu kalau karena ada juga yang mau pindah hanya karena ada, gangguan jiwa dipindah juga pernah ada. Tetapi kalau bagus saya kira kami dengan senang dan kami senang sekali menerima itu, Ibu.

Terima kasih.

**INTERUPSI F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):**

Ibu Ketua, saya agak cerewet, maaf ya.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak.

**F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):**

Catatan untuk Pak Kepala kala kami ketemu dengan ibu-ibu itu di Kampung KB mereka mengatakan, "Kami cuma dibayar Rp250.000,- sebulan. Itu kami terima juga 3 bulan sekali", katanya. "Kalau kami jemput itu sebulan sekali itu habis untuk ongkos." Saya kira ini kita bicarakan sesuatu yang harus menjadi perhatian kita orang yang mengabdikan untuk program BKKBN tapi diperlakukan rasanya kurang manusiawi oleh pemerintahan daerah. Saya kira harus dipikirkan secara sungguh-sungguh ini, Pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Terima kasih.

Jadi saya mohon izin memberikan tambahan juga bahwa sebetulnya Bupati dan Walikota itu punya DAK ya, DAK-nya itu adalah DAK yang dialokasikan harusnya untuk program Keluarga Berencana. Tetapi kami evaluasi dengan Pak Irtama ini bersama Kementerian Dalam Negeri. Kami



selama 6 bulan ini kami juga dengan Pak Irtama mengaudit terintegrasi antara Kemendagri dengan BKKBN. Hasilnya sangat mengecewakan. Karena apa? Karena mayoritas hanya untuk pertemuan, pertemuan, pertemuan, pertemuan dan saya cek DAK yang harusnya diarahkan untuk program Keluarga Berencana ini besarnya tidak, tidak sedikit ya bisa sampai 2,6 triliun 1 tahun untuk seluruh Indonesia artinya satu kabupaten itu bisa 4 miliar begitu. Tetapi saya cek ini hanya audit, join audit dengan Kemendagri karena ini ranahnya Kemendagri. Saya hanya ingin membuktikan seperti apa pelaksanaannya tapi betul-betul saya juga ikut kecewa karena apa, karena mayoritas di Kampung KB pun untuk pertemuan. Pertemuan, pertemuan, pertemuan itu semua pertemuan sehingga hasilnya tidak memberikan daya ungkit. Makanya saya di tahun 2020 ini tidak punya kesempatan merubah itu karena itu sudah ditetapkan di, di awal tahun 2019 sehingga saya di tahun 2020 itu merubah untuk yang tahun 2021 tidak untuk pertemuan. Kami arahkan untuk pelayanan di Puskesmas, untuk pelayanan di klinik-klinik dan juga di rumah sakit tadi. Jadi kami akan mengawal ke sana, sehingga nanti harapan kami untuk pelayanannya yang di rumah sakit, yang di klinik-klinik itu bisa minta tolong Bapak Ibu Bupati untuk mengerahkan itu dan saya sudah audiensi dengan Pak Mendagri untuk kami didukung agar ada surat-surat yang dukungan kepada Bupati Walikota dan kami mengusulkan kepada Pak Mendagri bahwa penilaian evaluasi kinerja Pemerintah Daerah itu indikator-indikator cakupan kependudukan dan keluarga berencana harus masuk Pak sementara ini kan tidak masuk sehingga ketika apa daerah itu dimulai mau dinilai penyelenggaraan pemerintahannya tidak harus bagus raportnya tentang kependudukan, keluarga yang berencana dan juga pembangunan keluarga dan kami juga kolaborasi dengan pemerintah daerah itu karena di dalam Undang-Undang diamanatkan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus membuat grand design pembangunan kependudukan, harus membuat grand design pembangunan kependudukan dan itu sejak sudah ada Peraturan Presiden nya tahun 2014 dan juga sudah tertuang dalam Undang-Undang di Tahun 2009. Oleh karena itu tentu kami harus berkolaborasi dengan Bupati Walikota untuk melaksanakan grand design pembangunan kependudukan ya itulah bidang di kependudukan di kami.

Kami menambah sedikit yang tentang surveyor ya itu agak loncat sedikit tetapi karena ada pertanyaan supaya. Saya sama cemasnya terhadap surveyor itu ya karena apa saya tahu BPS itu kalau survei di lapangan menghonor orang lapangan, tenaga musiman kira-kira dua bulan tiga bulan. Itu dilatih itu kemudian kalau mau pemilu tujuan survei itu yang melatih tetapi ternyata orang yang dilatih itu kalau orang desa juga belum tentu keterampilannya bagus. Lah kami sebetulnya hanya punya optimisme sedikit karena surveyor nya BKKBN itu tidak pernah berubah jadi dari tahun ke tahun surveyor nya adalah PKB yang di bawahnya ada PPKBD dan Sub PPKBD atau kader-kader itu. Makanya tadi Ibu Neti bilang sudah itu-itu saja tadi nanya itu, nanya itu, itu memang kader biasanya tanya tentang itu. Itu sudah terbiasa meskipun kami juga hati-hati dengan terbiasa itu juga ada bias. Bias karena terbiasa ya kemudian akhirnya ngisi nomor sampai 1 sampai 5 Terus yang berikutnya hanya ditebak itu kan juga, kami juga harus hati-hati. Jadi Kami memang punya optimisme tapi kami terima kasih bahwa diberikan peringatan supaya hati-hati terhadap surveyor.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Tadi juga pertanyaan yang kuat tentu kami ini tidak boleh yang tidak fokus ya harus fokus saja pada pekerjaannya apa itu. Ya kami siap ya karena apa, kita itu visinya sudah ditentukan yaitu pembangunan mohon maaf, pertumbuhan penduduk seimbang keluarga berkualitas sehingga kami harus fokus mengendalikan penduduk biar tumbuh seimbang dan fokus keluarga harus berkualitas sehingga visi itu tertera di dalam Renstra dan juga Bappenas semua sudah bahwa BKKBN lah yang kemudian betul-betul fokus di dalam keluarga berkualitas.

Mungkin kementerian/lembaga lain tidak ada yang mencantumkan dalam dan visinya keluarga berkualitas sehingga waktu saya audiensi dengan Pak Presiden minta arahan tentang Re-branding tentang kemudian visi misi ini maka Beliau mengatakan bahwa sudah kalau begitu BKKBN fokus keluarga. Jadi kalau saya bilang keluarga saya serahkan ke BKKBN sehingga sejak itulah kami itu juga merasa, oh ya kalau begitu urusan keluarga ini memang sangat penting karena Kementerian Lembaga yang lain meskipun menyebut-nyebut keluarga tapi mungkin tidak menjadi anu utamanya itu menjadi bagian aja. Oleh karena itu, itulah yang kemudian kami ini harus fokus kepada bagaimana menjaga pertumbuhan penduduk seimbang dan kemudian juga kita harus menjaga agar keluarga berkualitas.

Tadi disampaikan bahwa kegiatan-kegiatan di Kampung KB, ini yang terakhir. Banyak ceremonial-ceremonial kemudian orang kita itu senang yang *ceremonial* kemudian system ability nya itu kurang. Saya sangat setuju juga dengan pendapat itu, saya sangat setuju karena apa, ya saya merasakan memang biasanya kita ini senang dipuji kemudian senang mendapat hadiah bahkan saya pernah dikritik, sebagai bupati dikritik sama Kyai, Kyai M. Hainun Najib itu. Wah jadi Bupati itu jangan onani, onani itu kan yang di atas suka yang dimasukkan suka tapi tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kritiknya itu kan cukup tepat menurut saya karena kita sering kalau berkunjung ke warga itu senang karena apa, dipuji-puji, dikalungi bunga, di macam-macam itu. Kemudian setelah itu kita senang kemudian yang, yang kita kunjungi kita kasih hadiah senang juga itu tapi kan kita cuman ditipu, karena apa, ternyata pot bunga, ikan yang banyak itu cuman didatangkan spontan setelah kita pergi kan hilang lagi itu ya. Jadi, nah oleh karena itu saya setuju dengan itu makanya itulah PR bagi kami sehingga tadi ada masukan, tolong dievaluasi Kampung KB Iya ini yang yang saya baru lima bulan bekerja saya pikir ini harus kita evaluasi. Sampai saya juga bilang sama Pak Deputy Prof. Damanik sebagai Litbangnya kalau kita meneliti tuh harus yang menyentuh kebutuhan rakyat, harus. Ini bagaimana membandingkan manfaat Kampung KB misalnya begitu. Itu memang kami rasakan, Pak.

Oleh karena itu kami senang mendapatkan masukan bahwa ayo dipelajari, dilihat lagi seperti apa Kampung KB. Oleh karena itu 2019 turuk moratorium, tidak ada Kampung KB baru, sudah bagus kalau menurut saya. ya karena kita harus menikmati dulu yang ada ini, karena ternyata banyak yang tidak sesuai. Sesuai dengan apa? Kitanya. Karena dulu Pak Jokowi maunya ini adalah kampung yang dari perifer yang kemudian orang-orang terbelakang tapi ternyata kan mereka dipilih, yang mudah dijangkau, yang masyarakatnya itu mau diajak kerjasama ya pilihannya begitu sehingga saya

juga mendatangi beberapa Kampung KB tempatnya di tempat-tempatnya strategis gitu padahal harapan saya ini justru di tempat yang sulit begitu.

Itu makanya di moratorium tidak ada lagi kemudian dievaluasi, saya kira itu yang harus saya lakukan. Kemudian saya manfaatkanlah Kampung KB itu harus dimanfaatkan untuk apa tadi kalau Bapak tanya, saya kalau ke daerah harus bicara apa kalau reses. Ya satu adalah kualitas yang dibicarakan di Kampung KB itu kalau, kalau dijawab sih bilang dua anak cukup, dua anak cukup kan nggak apa-apa tapi kalau di Papua bilang dua anak cukup, kita ya hati-hati tapi kualitasnya dulu, kualitasnya ini jarak melahirkan itu harus diatur. Maka terima kasih Bapak tadi ada yang beri masukan Suku Anak Dalam itu apa itu tadi ya kalau apa kemakan ramuan terus seminggu impoten tapi kan cuman sementara kalau kebanyakan ya bisa bablas juga tapi kan itu bagus juga artinya satu ramuan tradisional yang perlu di contohkan dan hartinensia, abstinensia sampai 1 tahun pasca persalinan ini ya hebat tetapi kalau orang desa bisa ya mungkin tapi orang kota berat sekali abstinensia karena tiga bulan habis melahirkan itu sudah cantik lagi jadi kan berat untuk mengendalikan apa ya hasratnya itu ya. Itu manusiawilah gitu kan manusiawi sehingga kalau kami pikir di Kampung KB ini kami akan kerja sama dengan Bupati Walikota, Kepala Daerah untuk operasional yang listrik, yang air, yang itu kami serahkan ke Kepala Daerah karena tahun 2019 akhir keluar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang isinya ada akun-akun yang harus diisi oleh Bupati untuk mendukung kegiatan Kampung KB selama ini kan Bupati tidak pernah mendukung itu hanya menunggu DAK, DAK, DAK begitu. Makanya kami bikin surat kepada Pak Bupati melalui Pak Mendagri supaya Bupati mengisi itu.

Kemudian uang yang biasanya DAK, DAK itu kami sampaikan ke Pak Mendagri kemudian kita minta izin ke Kementerian Keuangan supaya itu diarahkan tidak untuk pertemuan-pertemuan tapi untuk mengejar stunting, misalnya itu. PUS (Pasangan Usia Subur) yang punya stunting ada berapa, spacingnya ada berapa, kemudian setelah itu nanti dilakukan treatment apa gitu. Jadi sebetulnya kita punya kesempatan Bapak, kenapa, BKKBN ini kan punya kader yang digaji ada 250000 atau apa itu jumlahnya 1,2 juta yang digaji sehingga saya lihat apa itu anggaran DAK nya Pak Bupati seluruh Indonesia itu yang untuk gaji kader nya tadi sebanyak sekitar 800 milyar, kalau tahun 2020 itu 700 sekian miliar untuk gaji kader-kader tadi. kader itu kader PPKBD jadi sebetulnya punya pasukan yang luar biasa yang bisa kita kerahkan itu untuk makanya kalau misalkan nanti mau dikumpulkan misalkan tadi pas reses kemudian mereka mau dikumpulkan kemudian kita minta supaya dia tuh kerjanya jangan hanya meeting tapi perhatikanlah stunting, perhatikanlah spacing jarak antara kelahiran satu dan kelahiran berikutnya. Itu saya kira akan sangat baik dan kami akan bekerja sama untuk bagaimana menghadirkan masyarakat kemudian teman-teman dari Komisi IX DPR RI bisa hadir kemudian juga bersama-sama memberikan konseling di sana.

Kami tadi ada beberapa masukan bahwa diantaranya tentang ada pelayanan-pelayanan yang di lapangan yang sudah bagus dengan teknik KB ABRI sebetulnya dengan Polri kemudian tadi disampaikan bawah ini bisa dilanjutkan. Saya sudah apa audiensi, saya sudah *sowan* ke Pangab. Kemudian kami mohon izin untuk supaya didukung kegiatan di lapangan dan kemudian tentu dalam hal ini Pangap sangat mendukung dan akan kami mulai kegiatan di tahun 16 besok itu yang ada di perbatasan di Kalimantan

Barat itu. Oleh karena itu kami pelayanan-pelayanan yang tadi dengan kapal dan seterusnya saya kira kami sangat mendukung itu kita lanjutkan, kita teruskan untuk kemudian kita bisa meningkatkan layanan di tengah-tengah masyarakat dan sebetulnya Bapak Ibu sekalian kami meskipun Re-branding kami itu bukan *re-branding* itu bukan untuk segala-galanya, tidak. Kami tetap ada fase tertentu itu kerjasama dengan tokoh agama, ada kemitraan dengan media itu sudah 5 tahun IPKB di pusat ini mati suri, sudah kami hidupkan, kita akomodasi lagi, besok kami ajak ke Kalbar. Kemudian ada Saka Kencana itu sudah lima tahun juga mati itu juga kemudian kita hidupkan kembali. Jadi saya pikir kami tidak hanya apa Re-branding fokusnya tapi kami juga kerja sama dengan lintas sektor. Kalau tidak kerja sama dengan lintas sektor saya kira kami tidak akan bisa sukses karena justru lintas sektorlah yang bisa mensukseskan kami.

Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada beberapa hal yang terkait dengan cakupan program tadi yang merah tadi sudah kami akui dan ini menjadi pemacu kami dan karena memang hari ini amanahnya bukan membicarakan tentang anggaran maka mohon maaf kami tidak mengurai secara detail tapi kami mengakui bahwa capaian-capaian 2019 itu raportnya merah, merah semua dan harus kita berusaha keras untuk memperbaiki itu. Saya kira itu sementara. terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*

**KETUA RAPAT:**

*Wa'alaikumsalam Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

Terima kasih Pak Kepala BKKBN. Masih ada teman-teman? Sudah cukup ya? Alhamdulillah udah cukup.

Baik.

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Selanjutnya kita akan menyampaikan draft kesimpulan. Untuk itu silakan tampilkan dulu.

Baik, kita perhatikan bersama-sama. Draft kesimpulan RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Selasa tanggal 4 Februari 2020:

1. Komisi IX DPR RI bersama BKKBN untuk melakukan sosialisasi secara masif terkait *rebranding*, terutama kepada generasi milenial agar tujuan BKKBN untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berkualitas dapat tercapai.

Silakan Bapak/Ibu sekalian masukan untuk nomor 1. Anggota dulu. Sudah? Pak Darul ada masukan? Ibu Ning? Ibu Aulia? Oke.

2. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk meningkatkan kualitas surveyor dalam pendataan keluarga tahun 2020 guna menghasilkan data yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan mengingat

data yang dihasilkan dijadikan acuan untuk program kependudukan, keluarga bencana serta pembangunan keluarga di Indonesia.

**INTERUPSI F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):**

Ibu Ketua...

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak Darul.

**F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):**

Saya *sih* bukan..., yang penting meningkatkan kualitas surveyornya, Ibu. Yang penting akurasi datanya yang kita pentingkan. Kualitas surveyor ya terserah. *Wah* itu kan satu tahapan dalam rangka mendapatkan data yang akurat. Tapi yang penting adalah akurasi data yang kita butuh untuk langkah-langkah selanjutnya dalam rangka pengembangan program.

**KETUA RAPAT:**

Masukannya bagaimana, Pak? Surveyornya hilang ya, kualitas pendataan keluarga tahun 2020 guna menghasilkan, begitu ya Pak saya kira. Ya sehingga menghasilkan data yang akurat, valid, relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dan seterusnya, oke lanjut.

3. Komisi IX DPR RI DPR RI mendesak BKKBN untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam mengevaluasi program dalam rangka mengevaluasi program Kampung KB untuk bersinergi dan ada keterpaduan antara program kependudukan keluarga berencana serta pembangunan keluarga dengan program pembangunan sektor terkait.

**INTERUPSI F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Ibu Ketua, saya kira bukan hanya dengan pemerintah daerah itu, itu dengan instansi yang terkait juga. Kementerian/lembaga lain *lah* istilahnya.

**KETUA RAPAT:**

Ya, *Kementerian*-nya dulu, *dan*-nya dihapus dulu. Tidak, kalau menurut saya *sinergi*-nya dihilangkan, sehingga ada keterpaduan. Karena yang dibutuhkan ada keterpaduan antara program pemerintah daerah, kemudian dari BKKBN dan lembaga-lembaga terkait. Oke, ada masukan? Silakan. Ada masukan? Oke.

4. Komisi IX DPR RI mendukung keputusan BKKBN untuk tetap melakukan pengadaan alat kontrasepsi secara sektoral guna memastikan ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi bagi seluruh masyarakat.

Setuju ini ya?

**INTERUPSI F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):**

Satu lagi, Ibu.

**KETUA RAPAT:**

Ya, silakan.

**F-PG (Drs. H. DARUL SISKA):**

Saya kira di samping pengadaan kontrasepsi yang penting juga retribusinya Bu, distribusinya secara tepat sasaran, saya kira harus ada penambahan kalimat untuk distribusi.

**KETUA RAPAT:**

Ketersediaan, pemenuhan kebutuhan dan distribusi alat kontrasepsi bagi seluruh masyarakat. Ini kan tadi ada keluhan dari..., bukan keluhan ya..., istilahnya ada persoalan tadi adanya peraturan Kemenkes ya Pak ya, Permenkes ya, Permenkes yang memang berkaitan dengan BPJS sehingga KB, KB secara gratis itu ada, ada persoalan di dalamnya. Tambah poin sendiri pak. Lima. Kalau yang nomor 4 sudah oke ya?

**INTERUPSI F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Ada tambahan satu, Mbak.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):**

Mungkin yang poin 5 kali ya. Tadi kan paparannya cukup bagus semuanya. Jadi agar tidak terhambat atau terhalang program-program yang selama ini lagi jalan, lagi apa lagi jalan ya baik Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia begitu ya, kemudian juga program ketahanan keluarga lainnya begitu, termasuk Kampung KB maupun juga Dalduk (Pengendalian Penduduk), ini yang saya alami sudah bagus. Ini kan terhalang dengan ada pemotongan anggaran. Kalau bisa di Komisi V DPR RI ini apa di poin 5. Ini kita membuat di situ bahwa Komisi IX DPR RI mendukung penambahan anggaran. Apalagi nanti kalau ada di APBN ya untuk ini. Karena ini kan untuk menjawab bonus demografi yang kurang lebih 15 tahun lagi. Dari sekarang harus kita persiapkan. Tapi kalau generasi kita ini kita tinggalkan begitu saja. Jadi saya ingin apa ada ada poin 5 lah untuk mendukung anggaran BKKBN secara umum saja program Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga begitu saja. Apalagi tadi juga kan yang paparkan dari indeks pembangunan keluarga itu kalau tidak dibantu dengan

anggaran itu sama saja bohong begitu. Tapi kalau ditambah lagi dengan ini kita akan bisa berimprovisasi, bisa membuat apa namanya..., leluasa kita untuk ini kan, walaupun ini juga hanya penguatan. Ini hanya penguatan begitu. Tapi penguatan ini ada di otak kita masing-masing begitu, sehingga nanti rapat selanjutnya..., apalagi nanti terus sampai kita bahas anggaran mungkin bulan 6-bulan 7 ya ini tetap dalam pegangan kita begitu.

Saya tambah itu saja poin 5 ya.

**KETUA RAPAT:**

*Iya. Komisi IX DPR RI mendukung adanya..., tidak usah pakai adanya ya, mendukung peningkatan anggaran. Ada-nya dihilangkan, ya peningkatan anggaran program keluarga keluarga berencana BKKBN Iya..*

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):**

Ditulis ditulis ketahanan keluarga bagus juga..

**KETUA RAPAT:**

Program BKKBN terkait..

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc):**

Ini salah satu hasil kunjungan kita juga kemarin ke Surabaya bahwa Ibu Risma itu ya kalau dia dibantu lagi dengan dengan biaya itu lebih bagus lagi gitu lebih massive lebih massive lagi begitu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ada masukan?

**INTERUPSI F-PG (Drs. H. DARUL SISKI):**

Ibu ketua, agak takut berbeda dengan Pimpinan. Tapi saya kira perlu sekali-sekali.

**KETUA RAPAT:**

Tidak dilarang, Pak. Tidak dilarang. Silakan.

**F-PG (Drs. H. DARUL SISKI):**

Dilarang kan? Iya. Kata anggarannya saja saya keberatan karena sekarang kita tidak bicara anggaran jadi anggarannya nanti kita bicara dukungan anggaran itu baru pembahasan anggaran untuk APBN 2021. Jadi kita mendukung programnya oke. Komitmen kita program ini harus menjadi program strategis nasional. Kira-kira begitu.

**KETUA RAPAT:**

Setuju, Pak? Oke. Mendukung peningkatan program BKKBN nanti ke depan ketika kita membahas anggaran kita berdasar ini, kemudian kita tingkatkan anggarannya. Karena sekarang tidak membahas, kecuali kalau ada perubahan ya, perubahan anggaran.

**F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc.):**

Pimpinan, jadi ditulis anggaran dengan tidak ditulis saya kira di sini yang penekanannya di sini kan anggaran bukan penekanannya sini anggaran. Kalau program itu penekanannya ya istilahnya yang ada saja sudah cukup begitu. Tapi kan ini kita ingin meningkatkan program itu dengan anggaran begitu. Jadi walaupun kita tidak bahas anggaran apa lagi siapa tahu nanti kita bahas anggaran APBN bulan 2-bulan 3 ini tapi ini sudah ada di pikiran kita masing-masing begitu karena melihat program yang dipaparkan tadi itu itu apa namanya kalau tanpa anggaran itu ya kita hanya rapat-rapat saja begitu. Saya kira nggak ada salahnya saya tapi terserah yang lain.

**F-PKB (H. HARUNA):**

Saya kira itu yang benar bu, apa bu yang kita bicarakan mesti anggaran berhubung mengenai jumlah anggaran nanti dibahas di Banggar nanti. Yang penting jelas kita kasih dukungan kepada mereka bahwa kita siap mendukung anggaran itu aja kesiapan kita jumlahnya nanti dibahas di rapat berikut. Saya kira ini sudah betul bu jadi 21. Terima kasih Bu.

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

Bu Pimpinan tambahan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan pak.

**F-PKS (H. ALIFUDDIN, S.E., M.M.):**

Seperti kemarin kan di Surabaya dapat dukungan dari APBD Kota di Jawa Barat dari APBD Provinsi maksudnya kalau ditambahkan dukungan dari APBD provinsi/kota/kabupaten begitu ya kan kita mendukung itu saja bu.

**KETUA RAPAT:**

Artinya tidak disebutkan anggarannya dari mana ya, nggak perlu apakah itu daerah atau nasional ndak perlu disebutkan. peningkatan anggaran. Oke bagaimana? Pak Darul bagaimana? Oke ya anggaran ya? Bagaimana? oke Pak, oke pak. Jadi Komisi IX Republik Indonesia DPR RI mendukung peningkatan anggaran program BKKBN terkait keluarga berencana dan ketahanan keluarga. Anggaran program BKKBN sebenarnya anggaran BKKBN itu pasti belum tentu program soalnya bisa saja untuk untuk



apa namanya tambahan-tambahan yang lain di luar itu. Anggaran program ya ada programnya apa nggak, tetap ada. Ya oke ya setuju Bapak Ibu sekalian? Baik. Saya serahkan kepada Bapak Kepala BKKBN untuk melihat satu persatu kalau ada tambahan masukan silakan.

**INTERUPSI F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Ibu Ketua, tadi yang soal Permen-Permenkes tadi bagaimana?

**KETUA RAPAT:**

Oke, yang saya sampaikan tadi ya sampai lupa masuk tadi, kalimatnya coba yang ke-6 terkait... Saya tambah waktu 15 menit.

**(RAPAT: SETUJU)**

Tadi ada perbedaan, bukan perbedaan ya, ada peraturan bahwa kalau KB gratis tidak bisa dilaksanakan karena ada peraturan Kementerian Kesehatan, begitu ya Pak, harus menggunakan BPJS. Kalau menggunakan BPJS berarti tidak bisa gratis, kan begitu istilahnya. Ini maunya kita mau seperti apa, koordinasi, komunikasi atau mengevaluasi atau seperti apa maunya kita terkait dengan... Maunya kita apa, Pak Yahya? Maunya dengan adanya peraturan itu masyarakat tidak bisa begitu saja menggunakan KB gratis. Meminta BKKBN berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan BPJS Kesehatan terkait pelayanan untuk melakukan evaluasi ya, evaluasi terhadap Permen nomor berapa Pak tadi? Permenkes Nomor...

**INTERUPSI F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Saya kira begini, jangan hanya evaluasi saya kira. Mencari solusi saya kira lebih tepat, karena ada masalah soalnya kan.

**KETUA RAPAT:**

Masalahnya karena itu, Pak. Tidak boleh itu.

**INTERUPSI F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Jadi solusinya seperti apa? Apakah Permennya diubah kira-kira begitu jalan keluarnya atau ada pengecualian? Begitu kan. Jadi solusinya saya kira harus dikedepankan.

**INTERUPSI F-PDIP (dr. RIBKA TJIPTANING):**

Pimpinan, kalau menurut saya yang nomor 6 ini justru bukan BKKBN yang berkoordinasi. *Wong* dia yang mengeluh sama kita *kok*. Kita justru yang menekan kepada Kementerian Kesehatan. Kan itu Permennya dia. Jadi ini catatan buat kita ketika nanti kita rapat dengan Menteri Kesehatan. Ini catatan kita ini diingat-ingat saja ketika nanti kita rapat kita tanggal sekian sekian RDP dengan BKKBN ada keluhan seperti ini, masukkan di dalam kesimpulan rapat

dengan Menteri Kesehatan atau dengan BPJS supaya ini dicabut dan diperhatikan, pokoknya itu. Dihapus *lah* kayak begini-begini ini begitu. Jadi bukan BKKBN yang kita beri tugas lagi berkoordinasi. Ini keluhan BKKBN dengan kita. Kalau menurut saya jangan dimasukkann kesimpulan sekarang.

**KETUA RAPAT:**

Catatan saja. *Oh* didrop malahan.

**F-PG (EMANUEL MALKIADES LAKA LENA):**

Iya, Ibu. Jadi saya maksudkan tadi itu biar kita juga jangan sampai nanti masing-masing kita masukkann semua. Terkait soal tadi keluhan dari Pak Hasto untuk Permenkes tadi ya, Permenkes itu kan kita sudah ada di poin ketiga itu. Nanti dari situ seperti yang sudah Ibu Ning sampaikan itu untuk kita evaluasi besok ini dan nanti dengan Kemenkes dan dengan BPJS kita tanya itu kenapa BKKBN jadi punya kendala ketika urusan mau bagi kontrasepsi. Masalah itu ya, Pak. Karena nanti pas rapat tolong kami diini, nanti kita cek.

**INTERUPSI F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Ibu Ketua, saya kira mungkin bunyinya saja yang harus diubah, misalnya...

**KETUA RAPAT:**

Silakan, Pak.

**F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Komisi IX DPR RI dan BKKBN menyetujui terhadap, itu kan bisa juga itu merupakan kesimpulan kita sehingga tidak hilang. Tadi ada dokumennya. Jadi ini menjadi catatan dan kesimpulan rapat kita. Kalau dihapus nanti hanya dalam hati saja kita. Tapi kalau itu jadi kesepakatan ya kan jadi kesimpulan resmi begitu *loh*. Menyetujui misalnya kan, tadi itu isinya. Jadi harus jadi kesimpulan kita, karena ini menjadi kesepakatan kita bersama begitu. Itu usul saya begitu, Ibu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Begini Pak, karena nomor 6 ini memang sudah ada, di nomor 3 sudah ada, tetapi supaya spesifik, supaya Pak BKKBN, Pak Hasto juga kan ini kaitannya Perpres, Permenkes, jadi tidak enak juga beliaunya nanti. Maksudnya dipakai, jangan dimasukkan dalam kesimpulan, tetapi masukkan dalam catatan. Jadi bukan kesimpulan. Didrop keenamnya, kemudian ada catatan tentang hal tersebut.

**INTERUPSI F-PG (Drs. H. DARUL SISKI):**

Atau Pak Yahya punya informasi tambahan di poin ketiga. Bisa masuk situ tidak, Pak?

**F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Sebentar, Ibu. Tadi kan Pimpinan menyimpulkan secara sepihak BKKBN tidak enak hati, kan itu kan belum tentu. Kalau ini kesepakatan kita untuk rakyat saya kira tidak apa-apa. Jadi justru membantu BKKBN, kan begitu, dapat support dari kita. Nanti kita perjuangkan. Ini bukan keputusan sepihak, ini keputusan kita bersama yang disetujui oleh mitra dalam hal ini adalah BKKBN untuk kepentingan rakyat. Saya kira tidak ada unsur tidak enaknyanya di sini.

**KETUA RAPAT:**

Silakan, silakan. Kalau memang ada ininya, kalimatnya seperti apa.

**F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Ibu Ketua, *sharing* saja Ibu Ketua. Saya kira intinya adalah dengan BKKBN itu sepakat untuk mencari atau mengupayakan selaras aturan yang terkait dengan program KB. Jadi kita tidak menyebut bahwa kita akan mendorong Menteri Kesehatan, kita minta nanti implementasinya. Kita akan minta Menteri Kesehatan iya, tapi di sini kalimatnya umum saja, menyelaraskan aturan dalam rangka pelaksanaan kelancaran pelaksanaan Program KB. Kira-kira begitu, Ibu Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Pak Yahya ada lagi?

Saya kira begini, bersepakat mengenai perlunya ada solusi saya kira terhadap...

**INTERUPSI F-PDIP (dr. RIBKA TJIPTANING):**

Bisa *sharing*? Begini Bang Yahya, melalui Pimpinan, biasanya pasti ini dr. Hasto juga tidak enak. Biasanya antar lembaga itu ada egosentrisnya masing-masing. Pasti dalam hati iya begitu kan. Biasanya mereka kalau punya masalah itu minta tolongnya sama DPR untuk *jewel*. Tidak enak pasti langsung menegur. Itu bahasanya kayak apa cuma kita. Kan ketika menerima seperti kita menerima aspirasi saja punya catatan ketika nanti kita bawa dalam rapat sama yang bersangkutan. Ini ada keluhan ini seperti kita terima aspirasi ini karena RDP, *oh* ada permasalahan di BKKBN seperti ini yang nanti kita akan hantam lewat rapat dengan yang bersangkutan, siapa Kemenkes. Karena ini Permen. Permen itu tidak boleh lebih tinggi dari undang-undang, begitu kan. Jadi ketika nanti kita dengan Menkes atau mungkin operatornya si BPJS kita sampaikan. Ini persoalan yang ada di BKKBN kalau menurut saya itu begitu. Karena kalau masuk di dalam

memang betul apa kalau masukan di sini mengikat, tapi jadi bahasanya bagaimana begitu kan, tidak enak begitu. Pasti jadi penjewernya kalau kita kan waktu kita RDP dengan BKKBN ada satu keluhan begini begini begini, apa betul Saudara Menteri, maka kita minta Komisi IX DPR RI untuk mencabut atau mengevaluasi kembali masalahnya ini masuk di dalam kesimpulan nanti begitu. Itu usul saya *sih*.

**KETUA RAPAT:**

Iya saya kira masuk ke catatan itu sudah cukup nggak jangan masuk ke kesimpulan karena itu menjadi komitmen kita nanti ketika RDP Rapat Kerja dengan Kemenkes. Nggak enak tidak enak ini sama Pak Asto nanti kalau dipaksa untuk itu kan juga nggak enak karena kaitannya dengan aturan juga ini makanya kita perlu komunikasi dengan Kemenkesnya. Bagaimana kalau masuk catatan Pak?

**INTERUPSI F-PG (M. YAHYA ZAINI, S.H.):**

Saya kira begini Ibu, jadi yang akan melakukan koordinasi atau menekan Kemenkes itu kan bukan BKKBN, tapi kan kita. Tapi bukti ada masalah yang menjadi pembahasan bersama diantara kita dengan mitra adalah kesimpulan. Kalau catatan kan tidak mengikat, ya setahu saya begitu. Jadi saya kira kita posisikan BKKBN tidak dalam posisi untuk menekan Kemenkes. Yang akan menekan Kemenkes adalah kita di sini Komisi IX DPR RI. Tetapi fakta ada permasalahan seperti ini adalah hasil kesepakatan kita bersama begitu. Bunyinya seperti ini bisa direvisi. Saya kira itu soal bunyi supaya juga ada variasi di dalam kesimpulan, tidak semata-mata mendesak salah satu pihak, tetapi juga ada bentuk lain dari kesimpulan yang merupakan kesepakatan bersama dengan para pihak. Kalau misalnya nanti hanya mendesak kepada pihak yang bersangkutan, tidak ada kaitannya dengan pihak yang lain. Jadi kita monoton rapat. Kita nanti tidak bisa menyelesaikan persoalan, padahal masalahnya terkait dengan instansi atau kementerian yang lain. Itu pendapat saya barangkali begitu. Saya yakin BKKBN tidak ada masalah karena akan mendesak..., bukan teman-teman BKKBN, tapi kita yang ada di Komisi IX DPR RI ini. Saya kira itu kalau pendapat saya, nanti Bu Ning siap menyampaikan nanti dengan Kemenkes. Tapi...

**INTERUPSI F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Usul, Ibu.

**KETUA RAPAT:**

Begini saja, begini saja.

**INTERUPSI F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Usul, Ibu.

Baik, terima kasih. Saya pikir ini...

**KETUA RAPAT:**

Waktunya tambah 10 menit.

**(RAPAT: SETUJU)**

**INTERUPSI F-NASDEM (Drs. FADHOLI):**

Jadi intinya Komisi IX DPR RI menerima usulan dari BKKBN atas pelayanan Program KB di JKN dan kemudian Komisi IX DPR RI akan menindaklanjuti dengan instansi terkait. Saya pikir begitu saja. Jadi intinya kita menerima usulan dari BKKBN agar Program KB ini dilakukan di JKN. Saya pikir itu saja jadi yang pertama..

**KETUA RAPAT:**

Izin, Pak.

Itu tadi bukan usulan BKKBN loh, Pak. Nanti salah nanti, nanti ada persoalan.

**F-PG (EMANUEL MELKIADES LAKA LENA):**

Saya coba cari titik tengah ya Bu. Coba saja mudah-mudahan kita bisa bersepakat. Komisi IX DPR RI mendukung penguatan pelayanan KB di Program JKN melalui harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jadi biar kita tidak usah sentuh siapa-siapa tapi ini DPR ambil alih siapa tahu ada masalah ini. Komisi IX DPR RI mendukung penguatan pelayanan KB di Program JKN melalui harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan. Jadi itu yang kita maksudkan tadi seperti yang tadi disebutkan oleh Pak Yahya tapi juga tidak singgung dulu salah satu kan itu kerjaan kita lah. Jadi Komisi IX DPR RI mendukung penguatan program JKN melalui harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, yang kita sudah pahami adalah masukan dari Pak Asto tadi. Nanti tinggal besok kita bicarakan Kemenkes dan BPJS terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, langsung saja saya serahkan ke Pak Hasto mana yang disepakati, mana yang perlu masukan.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Ya, terima kasih.

Dari nomor 1 sampai nomor 6 saya kira semua sudah bagus dan yang nomor 1 itu memang pembangunan keluarga yang berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang itu tercapai, karena memang kami punya dua itu. Mungkin kalau seandainya itu mohon izin bisa masuk mungkin itu melengkapi visi kami.

**KETUA RAPAT:**

Tumbuh penduduk yang seimbang.

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Ya, penduduk tumbuh seimbang, tumbuh seimbang ya, tumbuh seimbang dapat dicapai.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Penduduk tumbuh seimbang atau bagaimana? Betul itu, Pak? Sudah? Oke. Langsung yang nomor 6 sudah oke, Pak?

**KEPALA BKKBN (dr. HASTO WARDOYO, Sp.OG(K).):**

Sangat oke, karena memang DPR kemudian mengharmonisasi dalam rangka JKN. Saya kira tiga hal sangat tepat.

**KETUA RAPAT:**

Oke.

Bapak/Ibu sekalian,

Demikianlah draft yang telah kita bahas bersama, sehingga draft nomor 1 sampai dengan nomor 6 kita sepakati bersama sebagai kesimpulan RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Selasa tanggal 4 Februari tahun 2020.

**(RAPAT: SETUJU)**

Baik.

Bapak/Ibu sekalian,

RDP kita lalui bersama dan *alhamdulillah* pada hari ini mulai Jam 14.00 sampai dengan Jam 17.49 sudah selesai. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar apa yang kita kerjakan hari ini, kesimpulan yang kita kerjakan hari ini bisa kita pakai sebagai dasar untuk melangkah ke depan. berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilahkan.

**(BERDOA BERSAMA)**

Terima kasih.

Dengan ucapan *alhamdulillah* *robbil 'alamiin* Rapat Dengar Pendapat hari ini dengan Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN dan seluruh jajarannya secara resmi saya nyatakan ditutup.

Terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.50 WIB)**

Jakarta, 4 Februari 2020  
a.n. KETUA RAPAT  
Sekretaris Rapat

Yanto Supriyanto, S.H.  
NIP. 196305241992031001